

PROFIL DESA PEDULI GAMBUT

KEPENGHULUAN TANJUNG LEBAN
KECAMATAN KUBU
KABUPATEN ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU



PROFIL DESA KEPENGHULUAN
TANJUNG LEBAN
KECAMATAN KUBU
KABUPATEN ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU



PROGRAM DESA PEDULI GAMBUT
BADAN RESTORASI GAMBUT
KEDEPUTIAN BIDANG EDUKASI, SOSIALISASI,
PARTISIPASI DAN KEMITRAAN

LAPORAN HASIL PEMETAAN SOSIAL DAN SPASIAL
Kepenghuluan Tanjung Leban Tahun 2019

Penyusun:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Gusty Kacil | sebagai Fasilitator Kepenghuluan Tanjung Leban |
| 2. Edi Sucipto | sebagai Enumerator Kepenghuluan Tanjung Leban |
| 3. Ramdani Arsyad. S | sebagai Enumerator Kepenghuluan Tanjung Leban |
| 4. Erwin Suryana | sebagai Tim Asistensi Sosial |
| 5. Mairaji | sebagai Tim Asistensi Spasial |

Lembar Persetujuan Desa :


Kami yang bertanda tangan di bawah ini, selaku Penghulu dan Sekretaris Kepenghuluan Tanjung Leban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir menyatakan bahwa hasil ini telah disampaikan kepada perwakilan masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban serta menyatakan menyetujui laporan hasil pemetaan sosial yang dilakukan oleh Tim Penyusun dari Badan Restorasi Gambut (BRG) Republik Indonesia di atas.

Kepenghuluan Tanjung Leban, 19 April 2019

Sekretaris Desa


(WANDRI)

Penghulu


(HAYATUL GAMAL, S.Pd)

KATA PENGANTAR

Laporan Profil Desa Peduli Gambut ini merupakan hasil dari kegiatan pemetaan sosial yang telah dilaksanakan pada bulan Februari - April 2019 dan bekerjasama dengan para pihak, mulai dari tingkat provinsi, kecamatan, dan desa. Melalui proses ini, telah disampaikan informasi tentang konsep restorasi ekosistem, kegiatan yang direncanakan dan telah dilaksanakan, rencana kelola serta proses pemetaan desa yang telah mengadaptasi umpan balik dari para pihak akan rencana yang disepakati dan persetujuan legal.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Badan Restorasi Gambut (BRG) yang sudah mempercayakan kami sebagai tim pemetaan sosial. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban yang mendukung kami dalam menyelesaikan pekerjaan sebagai tim pemetaan sosial. Semoga hasil yang kami peroleh dapat menjadi penunjang dalam segala aktivitas dalam mengembangkan potensi lahan gambut dan sumber daya manusia di Kepenghuluan Tanjung Leban

....., April 2019

Tim Pemetaan Sosial Kepenghuluan Tanjung Leban

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Metodologi dan Pengumpulan Data	3
1.4. Struktur Laporan.....	5
 BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI	
2.1. Lokasi Desa.....	7
2.2. Orbitasi	8
2.3. Batas dan Luas Wilayah.....	9
2.4. Fasilitas Umum dan Sosial.....	12
 BAB III LINGKUNGAN FISIK DAN EKOSISTEM GAMBUT	
3.1. Topografi.....	19
3.2. Geomorfologi dan Jenis Tanah	20
3.3. Iklim dan Cuaca	22
3.4. Keanekaragaman Hayati.....	25
3.5. Hidrologi di Lahan Gambut	28
3.6. Kerentanan Ekosistem Gambut.....	31
 BAB IV KEPENDUDUKAN	
4.1. Data Umum Penduduk.....	33
4.2. Laju Pertumbuhan Penduduk	36
4.3. Tingkat Kepadatan Penduduk	37
 BAB V PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	
5.1. Jumlah Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kesehatan.....	39
5.2. Kondisi Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan	41
5.3. Angka Partisipasi Pendidikan.....	45
5.4. Jumlah Korban Bencana Kebakaran dan Asap Tahun 2015	45
 BAB VI KESEJARAHAN DAN KEBUDAYAAN MASYARAKAT	
6.1. Sejarah Desa	47
6.2. Etnis, Bahasa, dan Agama	50
6.3. Legenda	51
6.4. Kesenian Tradisional	52
6.5. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam	53

BAB VII PEMERINTAHAN DAN KEPEMIMPINAN

7.1.	Pembentukan Pemerintahan	55
7.2.	Struktur Pemerintahan Desa.....	57
7.3.	Kepemimpinan Tradisional.....	61
7.4.	Aktor Berpengaruh.....	61
7.5.	Mekanisme Penyelesaian Sengketa/Konflik Penguasaan Lahan	63
7.6.	Mekanisme/Forum Pengambilan Keputusan Desa	64

BAB VIII KELEMBAGAAN SOSIAL

8.1.	Organisasi Sosial Formal	65
8.2.	Organisasi Sosial Nonformal	66
8.3.	Jejaring Sosial Desa	67

BAB IX PEREKONOMIAN DESA

9.1.	Pendapatan dan Belanja Desa.....	71
9.2.	Aset Desa	75
9.3.	Tingkat Pendapatan Warga.....	76
9.4.	Industri dan Pengolahan di Desa	82
9.5.	Potensi dan Masalah dalam Pengelolaan Lahan Gambut	87

BAB X PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DAN SUMBER DAYA ALAM

10.1.	Pemanfaatan Tanah dan Sumber Daya Alam	91
10.2.	Penguasaan Tanah dan Sumber Daya Alam	97
10.3.	Penguasaan Lahan Gambut atau Parit/Handil	100
10.4.	Peralihan Hak Atas Tanah (termasuk Lahan Gambut)	101
10.5.	Sengketa Tanah di Lahan Gambut dan Non-Gambut	102

BAB XI PROYEK PEMBANGUNAN DESA

11.1.	Program Pembangunan Desa	105
11.2.	Program Kerjasama dengan Pihak Lain	108

BAB XII PERSEPSI TERHADAP RESTORASI GAMBUT

12.1.	Persepsi Terhadap Restorasi Gambut	109
-------	--	-----

BAB XIII PENUTUP

13.1.	Kesimpulan	111
13.2.	Saran	113

DAFTAR PUSTAKA.....	115
LAMPIRAN	117

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Orbitasi	9
Tabel 2	Batas-batas Kepenghuluan Tanjung Leban	9
Tabel 3	Fasilitas Sosial Di Kepenghuluan Tanjung Leban	12
Tabel 4	Fasilitas Umum Di Kepenghuluan Tanjung Leban	15
Tabel 5	Ketebalan dan Kematangan Gambut di Kepenghuluan Tanjug Leban	21
Tabel 6	Suhu dan Curah Hujan Kepenghuluan Tanjung Leban Tahun 2018	22
Tabel 7	Kalender Musim	23
Tabel 8	Bagan Kecenderungan Perubahan Keanekaragaman Hayati	26
Tabel 9	Hidrologi di Lahan Gambut	29
Tabel 10	Hotspot Tahun 2014-2018 di Kepenghuluan Tanjung Leban	32
Tabel 11	Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kepenghuluan Tanjung Leban	34
Tabel 12	Penduduk Berdasarkan Usia Tahun 2018	35
Tabel 13	Tingkat Pendidikan Tahun 2018	35
Tabel 14	Laju Pertumbuhan Penduduk	36
Tabel 15	Angka Kepadatan Penduduk Kepenghuluan Tanjung Leban	37
Tabel 16	Tingkat Kepadatan Penduduk	38
Tabel 17	Jumlah Tenaga Pendidik	40
Tabel 18	Jumlah Tenaga Kesehatan	41
Tabel 19	Sarana dan Prasarana Pendidikan	42
Tabel 20	Sarana dan Prasarana Kesehatan	44
Tabel 21	Jumlah Anak Sekolah di fasilitas pendidikan Kepenghuluan Tanjung Leban	45
Tabel 22	Korban Karhutla Tahun 2018	45
Tabel 23	Penganut Agama & Kepercayaan.....	51
Tabel 24	Sejarah Pemerintahan Kepenghuluan.....	56
Tabel 25	Perangkat Kepenghuluan Tanjung Leban	59
Tabel 26	Tupoksi Perangkat Kepenghuluan Tanjung Leban	60
Tabel 27	Analisa Aktor Di Kepenghuluan Tanjung Leban	63
Tabel 28	Organisasi Sosial Formal di Kepenghuluan Tanjung Leban	65
Tabel 29	Organisasi Sosial Non Formal di Kepenghuluan Tanjung Leban	67
Tabel 30	Analisis Hubungan Kelembagaan di Kepenghuluan Tanjung Leban	68
Tabel 31	Sumber Pendapatan Kepenghuluan Tanjung Leban tahun 2018.....	72
Tabel 32	Belanja Kepenghuluan Tanjung Leban 2018	73
Tabel 33	Penerimaan Pembiayaan Kepenghuluan Tanjung Leban 2018	74
Tabel 34	Aset Desa	75
Tabel 35	Jenis Mata Pencarian Masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban	76
Tabel 36	Tingkat Pendapatan Warga Berdasarkan Rumah Tangga	79
Tabel 37	Bagan Mata Pencarian	80
Tabel 38	Matrik Profil Aktifitas Dalam Analisis Gender	81
Tabel 39	Matrik Profil Akses dan Kontrol dalam Analisis Gender:	82
Tabel 40	Pedagang Pengumpul Desa.....	83
Tabel 41	Usaha Produksi & Pengolahan	85
Tabel 42	Potensi dan Masalah dalam Pengelolaan Lahan Gambut	89
Tabel 43	Pemanfaatan Lahan di Kepenghuluan Tanjung Leban	92
Tabel 44	Pola Penguasaan Ruang	94
Tabel 45	Transek Desa	95
Tabel 46	Program dan Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan	106
Tabel 47	Progam dan Kegiatan Bidang Pembangunan	106
Tabel 48	Progam dan kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	107
Tabel 49	Program danKegiatan Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Lokasi Kepenghuluan Tanjung Leban	8
Gambar 2	Peta Administratif Kepenghuluan Tanjung Leban	11
Gambar 3	Fasilitas Sosial di Kepenghuluan Tanjung Leban	14
Gambar 4	Fasilitas Umum di Kepenghuluan Tanjung Leban	16
Gambar 5	Pengambilan Sampel Tanah Gambut di Kepenghuluan Tanjung Leban	21
Gambar 6	Hidrologi di Lahan Gambut	30
Gambar 7	Fasilitas Pendidikan di Kepenghuluan Tanjung Leban	43
Gambar 8	Fasilitas Kesehatan di Kepenghuluan Tanjung Leban	44
Gambar 9	Penganut Agama & Kepercayaan	51
Gambar 10	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	58
Gambar 11	Diagram Venn Analisis Kelembagaan	69
Gambar 12	Diagram Pendapatan Kepenghuluan Tanjung Leban	72
Gambar 13	Diagram Belanja Kepenghuluan Tanjung Leban tahun 2018	73
Gambar 14	Diagram Penerimaan Pembiayaan Kepenghuluan Tanjung Leban Tahun 2018	74
Gambar 15	Diagram Mata Pencarian Masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban	78
Gambar 16	Tempat Pedagang Pengumpul Sawit	84
Gambar 17	Usaha Produksi / Pengolahan di Kepenghuluan Tanjung Leban	86
Gambar 18	Diagram pemanfaatan lahan	93
Gambar 19	Peta Pemanfaatan Lahan	93
Gambar 20	Transek Kepenghuluan Tanjung Leban	96
Gambar 21	Peta Penguasaan Lahan	99



Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dijelaskan bahwa Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, wilayah setingkat Desa mengambil nama berdasarkan penyebutan lokal yaitu Kepenghuluan, yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 2015 Kabupaten Rokan Hilir tentang Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Kepenghuluan dan Perubahan Status Kepenghuluan Menjadi Kelurahan. Dalam Pasal 1 ayat 7 Perda Kabupaten Rokan Hilir No. 8 tahun 2015 penjelasan mengenai Kepenghuluan sama dengan penjelasan Desa yang dimaksud dalam pasal 1 UU Desa. Bahkan sebelum UU Desa diterbitkan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir sudah menggunakan penyebutan Kepenghuluan untuk wilayah setingkat Desa, sebagaimana ada dalam beberapa Perda yang pernah diterbitkan di Kabupaten ini¹.

Salah satu Kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir tersebut yaitu Kepenghuluan Tanjung Leban yang secara administratif bagian dari Kecamatan Kubu. Berada di Utara Barat Laut Provinsi Riau, letak astronomis Kepenghuluan Tanjung Leban yaitu 01°56'0" - 02°03'0" Bujur Timur (BT) dan 100°24'0" - 100°37'0" Lintang Utara (LU). Dengan ketinggian ± 6-10 meter di atas permukaan laut (mdpl), Kepenghuluan ini adalah daerah dataran rendah yang melandai di tepi barat Sungai Kubu.

¹ Lihat misalnya Perda Kabupaten Rokan Hilir No. 7 Tahun 2009 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Penghapusan, Penggabungan Kepenghuluan dan Perubahan Status Kepenghuluan Menjadi Kelurahan.

Wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban berbatasan dengan Kepenghuluan lain dalam Kecamatan Kubu serta Kepenghuluan lain di luar Kecamatan Kubu. Pemetaan partisipatif Kepenghuluan Tanjung Leban menghasilkan peta berbatas indikatif dari masyarakat seluas 21.434,60 Ha.

Tanah gambut di Kepenghuluan Tanjung Leban berada setelah radius 500 meter hingga lebih 3 km dari aliran Sungai Kubu dan Sungai Tolang Kanan (Sungai Simpang Kanan), tetapi warga tidak tahu posisi kubah gambut pada kawasan ekosistem gambut wilayah ini. Penggunaan lahan kawasan gambut di Kepenghuluan ini adalah Pemukiman, kebun masyarakat, dan semak belukar yang terdapat lahan bekas terbakar. Pemetaan partisipatif 2019 memperlihatkan luas kawasan gambut 16.724,68 Ha atau 78,03% dari luas kepenghuluan ini. Kawasan gambut di tengah Kepenghuluan ini menurut warga berkedalaman 2–3 meter dan umumnya lebih dari 3 meter. Berdasarkan klasifikasi ketebalan serta tingkat kematangan material gambut, tanah gambut di Kepenghuluan ini terbagi empat yaitu gambut dangkal (50-100 centimeter (cm)) bertingkat kematangan saprik dan hemik; gambut sedang (100-200 cm) bertingkat kematangan saprik dan hemik; gambut dalam (200-300 cm) bertingkat kematangan saprik, hemik dan fibrik; serta gambut sangat dalam (>300 cm) bertingkat kematangan hemik dan fibrik.

Kondisi keanekaragaman hayati Kepenghuluan ini dipengaruhi pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang berlangsung sebagai faktor dominan penentu kualitas dan kuantitas keanekaragaman hayati yang ada. Pemanfaatan hasil hutan serta pembukaan lahan hutan diikuti budidaya pertanian monokultur, mendesak ruang hidup berbagai jenis flora dan fauna di wilayah ini. Hal ini diperparah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang semakin sering terjadi sejak tahun 2003-2004. Kerentanan Karhutla meningkat karena lahan bekas terbakar berubah menjadi area semak belukar.

Mata pencaharian utama warga Kepenghuluan ini bergantung kegiatan pengolahan tanah dan kekayaan alam, terlihat dari besarnya penduduk bermata pencaharian Pertanian dan Peternakan serta Nelayan, serta sangat dimungkinkan warga bermata pencaharian Pekerjaan lainnya adalah Buruh Tani/Kebun. Warga Kepenghuluan ini terserap juga dalam mata pencaharian sektor formal sebagai Aparat Sipil Negara (ASN), Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Pengajar. Mata pencaharian warga Kepenghuluan Tanjung Leban lainnya adalah Wiraswasta, yang terhubung sektor pertanian berupa jual beli komoditas hasil pertanian serta perdagangan pemenuhan konsumsi harian warga. Usaha produksi yang menonjol adalah pembuatan batu bata dan budidaya sarang burung walet, serta di sektor jasa ada beberapa bengkel alat transportasi.

Aktifitas kehidupan masyarakat awalnya pada kawasan tanah non gambut di bagian Timur Laut dimana pemukiman bermula di tepi Sungai Kubu, berkembang seiring aktifitas pemanfaatan hutan dan budidaya pertanian ke Barat Daya mengikuti sungai alam serta parit-parit di Kepenghuluan ini. Aktifitas awal budidaya pertanian masyarakat di lahan pertanian dari pembukaan hutan adalah menanam Karet, Kopi, Coklat dan Kelapa.

Pada awal dan pertengahan dekade 1990-an, Kelapa Sawit menggantikan tanaman budidaya sebelumnya menjadikan lanskap lahan pertanian monokultur. Perkembangan harga sawit mendorong warga maupun masyarakat luar membuka hutan untuk budidaya Sawit di awal dekade 2000-an. Karhutla yang berulang merubah lanskap Kepenghuluan ini terutama kawasan gambut didominasi tutupan lahan semak belukar. Di luar area semak belukar, warga memanfaatkan lahan seluas 14,21% dari luas wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban untuk budidaya pertanian berupa kebun Kelapa Sawit, Nanas, Karet, serta pemukiman tempat warga mengembangkan aktifitas sosialnya.

Badan Restorasi Gambut (BRG) dibentuk Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut untuk percepatan pemulihan fungsi hidrologis gambut akibat Karhutla. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut adalah tugas yang diemban BRG. Program Desa Peduli Gambut (DPG) oleh BRG meliputi kegiatan fasilitasi pembentukan kawasan perdesaan, perencanaan tata ruang desa dan kawasan perdesaan, identifikasi dan resolusi konflik, pengakuan dan legalisasi hak dan akses, kelembagaan untuk pengelolaan hidrologi dan lahan, kerja sama antar desa, pemberdayaan ekonomi, penguatan pengetahuan lokal dan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana kebakaran gambut. Untuk mencapai tujuan program Desa Peduli Gambut (DPG) tepat sasaran maka dibutuhkan data profil desa berupa peta (spasial), serta non spasial (profil manusia dari segi sosial, ekonomi dan potensi-potensi lainnya).

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pembuatan profil desa peduli gambut melalui pemetaan partisipatif adalah menyediakan data dasar sosial, potensi ekonomi, kerentanan dan spasial yang terkait dengan pengelolaan, perlindungan dan pemanfaatan ekosistem gambut di desa gambut. Dengan demikian, profil Desa Peduli Gambut merupakan salah satu dokumen di desa yang dapat digunakan dalam proses perencanaan pembangunan serta integrasi aspek perlindungan dan pemanfaatan ekosistem gambut di tingkat desa dan kawasan.

1.3 Metodologi dan Pengumpulan Data

Waktu kegiatan penyusunan laporan profil di Kepenghuluan Tanjung Leban dimulai sejak pelaksanaan FGD I pada tanggal 19 Februari 2019, FGD II di tanggal 1 Maret 2019 dan berakhir pada saat finalisasi draf laporan dengan adanya FGD III pada tanggal 19 April 2019. Sedangkan Wawancara, Observasi, dan Studi dokumen mulai dilaksanakan setelah pelaksanaan FGD I hingga sebelum FGD III berlangsung.

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, seperti berikut ini:

- 1) Wawancara informan kunci, terdiri dari serangkaian pertanyaan terbuka yang dilakukan terhadap masyarakat di Kepenghuluan Tanjung Leban yang sudah diseleksi karena dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai topik atau keadaan di wilayahnya. Wawancara bersifat kualitatif, mendalam dan semi-terstruktur.
- 2) Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion*, FGD) melibatkan 10-20 anggota yang berasal dari masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban yang telah dipilih dan diundang berdasarkan keterwakilan kelompok yang ada di desa, yaitu para Aparatur Desa, Ketua Dusun (RT), Tokoh Masyarakat serta masyarakat desa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Setelah itu, mencatat proses diskusi dan kemudian memberikan komentar mengenai hasil pengamatan. Diskusi Terfokus dalam pemetaan partisipatif DPG ini dilaksanakan tiga kali:
 - a. FGD I, agenda FGD I ini adalah sosialisasi terkait program pemetaan partisipatif desa peduli gambut. Diskusi awal ini juga menggali data- data yang outputnya adalah: Peta sketsa desa, deliniasi peta citra, kalender musim, bagan kecenderungan perubahan, penguasaan ruang, diagram venn, identifikasi sumber penghidupan/mata pencaharian.
 - b. FGD II, agenda diskusi tahap kedua ini adalah konfirmasi dan klarifikasi terkait data yang terkumpul baik itu sosial maupun spasial.
 - c. FGD III, diskusi tahap akhir ini beragendakan pengesahan terkait data-data yang sudah terkumpul (final)
- 3) Pengamatan langsung dilakukan di Kepenghuluan Tanjung Leban dengan mengumpulkan data berupa informasi mengenai kondisi geografis, fasilitas umum dan fasilitas sosial, sumber daya alam yang tersedia, kegiatan program yang sedang berlangsung, interaksi sosial dan lain-lain.
- 4) Studi dokumen digunakan untuk mencari data sekunder dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sumber data sekunder yang akan digunakan diantaranya: kecamatan dalam angka, monografi, RPJMDes, dan peta partisipatif yang pernah dilakukan. Beberapa data yang didapatkan dari studi dokumen yaitu: lokasi desa; orbitasi; topografi; geomorfologi dan jenis tanah; data umum penduduk; jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan; angka partisipasi pendidikan; jumlah korban bencana kebakaran dan asap 2015; etnis, bahasa, dan agama; pembentukan pemerintahan; struktur pemerintahan desa; pendapatan dan belanja desa; asset desa; peralihan hak atas tanah (termasuk lahan gambut); program pembangunan desa; program kerja sama desa dengan pihak lain.

1.4 Struktur Laporan

Berikut ini struktur laporan yang terdiri dari 13 (tiga belas) bab, yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN.

Memuat latar belakang, tujuan dibuatnya profil desa, metode pengumpulan data, dan struktur penyajian profil desa.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI.

Menunjukkan letak desa, menjelaskan jarak orbitrasi desa ke pusat-pusat pemerintahan atau ekonomi (jarak desa ke kecamatan, desa tetangga, kabupaten, dan ke ibukota provinsi), menunjukkan dan menjelaskan batas dan luas wilayah desa, serta fasilitas umum dan sosial yang terdapat di desa tersebut.

BAB III LINGKUNGAN FISIK DAN EKOSISTEM GAMBUT.

Memuat tentang topografi, geomorfologi dan jenis tanah yang ada di wilayah desa, iklim dan cuaca, keanekaragaman hayati, vegetasi, kondisi hidrologi di lahan gambut, serta kondisi dari kerentanan ekosistem gambut.

BAB IV KEPENDUDUKAN.

Memuat tentang data umum penduduk, struktur penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin, laju pertumbuhan dari masyarakat di desa, dan tingkat kepadatan di desa tersebut.

BAB V KESEHATAN DAN PENDIDIKAN.

Mendeskripsikan tentang sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, kondisi ketersediaan tenaga pendidik dan kesehatan, tingkat partisipasi pendidikan warga, serta kesiapan fasilitas kesehatan menghadapi kebaakaran gambut.

BAB VI KESEJARAHAAN DAN KEBUDAYAAN MASYARAKAT.

Memuat tentang sejarah desa/komunitas/permukiman, etnis yang ada di desa tersebut, bahasa yang digunakan, religi yang dianut, kesenian yang pernah ataupun yang masih dipraktikkan, serta kearifan dan pengetahuan local yang dimiliki oleh masyarakat yang berkaitan dengan bagaimana mereka menjalani kehidupan sehari-harinya (tidak hanya yang berkaitan dengan seni tetapi juga aktivitas ekonomi seperti bercocok tanam, mencari ikan, dan lain-lain).

BAB VII PEMERINTAH DAN KEPEMIMPINAN.

Menjelaskan tentang bagaimana proses dan perjalanan pemerintahan desa terbentuk, struktur pemerintahan di desa yang ada saat pemetaan dilakukan, bentuk dan penjelasan mengenai peran dan subjek dari kepemimpinan local/tradisional, serta actor yang berpengaruh di desa tersebut di setiap sector, baik itu ekonomi, politik, actor yang berpengaruh di kalangan perempuan, dan sebagainya.

BAB VIII KELEMBAGAAN SOSIAL.

Menjelaskan tentang organisasi sosial formal dan organisasi sosial informal yang ada di desa serta manfaat dan perannya bagi warga, juga jejaring warga yang menjelaskan bagaimana kedekatan antar lembaga tersebut dengan warga di desa.

BAB IX PEREKONOMIAN DESA/KOMUNITAS.

Memuat tentang pendapatan dan belanja desa selama 3-5 tahun terakhir, aset-aset yang dimiliki oleh desa beserta dengan penjelasan dari masing-masing kondisi dan fungsi dari aset desa tersebut, tingkat pendapatan warga beserta penjelasan mata pencaharian dari warga yang ada di desa tersebut, industri dan pengolahan yang ada di desa, serta potensi dan masalah dalam sector pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, dan lain-lain yang ada di desa.

BAB X PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH & SUMBER DAYA ALAM.

Menjelaskan tentang pemanfaatan lahan (*land use*), penguasaan lahan dan bentuk pengakuan, penguasaan lahan gambut dan parit/handil, peralihan hak atas tanah (termasuk di lahan gambut) dan sengketa di lahan gambut dan non-gambut.

BAB XI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN.

Penjelasan mengenai pembangunan dengan pendanaan dari Negara dan inisiatif pihak lain dalam bentuk kerjasama program.

BAB XII PERSEPSI TERHADAP RESTORASI GAMBUT.

Memuat tentang persepsi masyarakat desa terhadap restorasi gambut yang diwakili tiap komunitas dan perwakilan setiap gender yang ada di desa.

BAB XIII PENUTUP.

Berisi tentang kesimpulan dan saran.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

(Peta, foto, dan lain-lain).

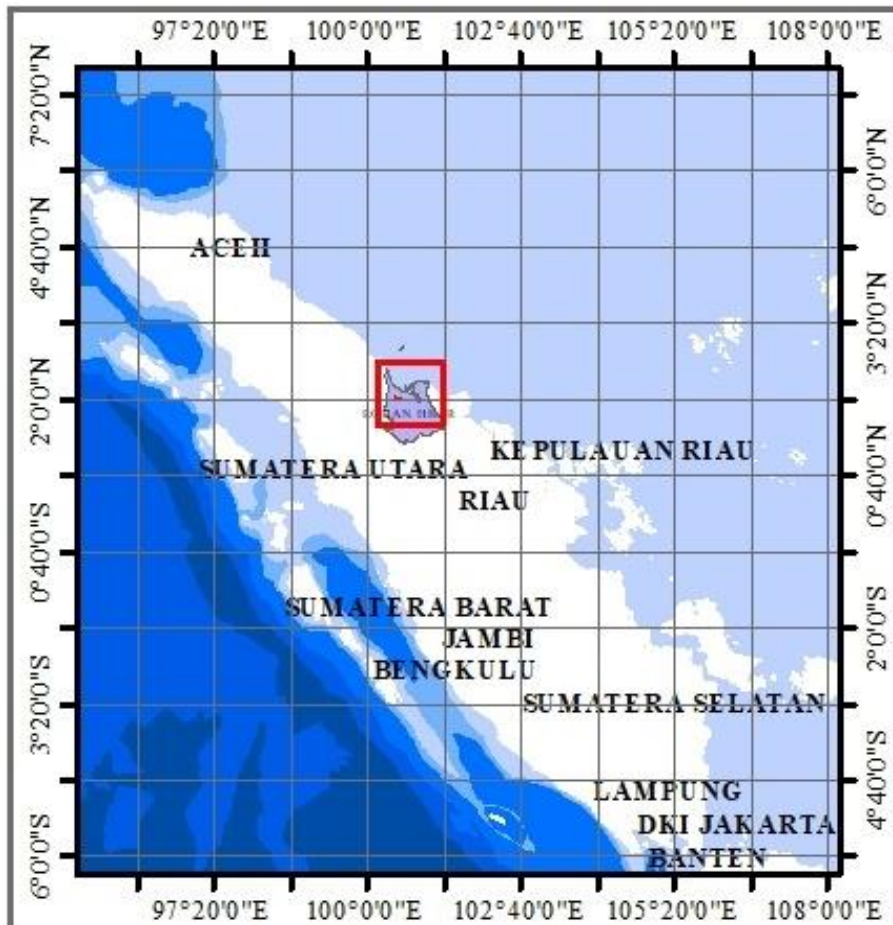


Bab II

Gambaran Umum Lokasi

2.1 Lokasi Desa

Kepenghuluan adalah penyebutan wilayah administrasi setingkat Desa di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, salah satu Kepenghuluan tersebut yaitu Kepenghuluan Tanjung Leban yang secara administratif bagian dari Kecamatan Kubu. Kepenghuluan Tanjung Leban terdiri dari 6 Dusun, 13 Rukun Warga (RW), dan 29 Rukun Tetangga (RT). Berada di bagian Utara Barat Laut Provinsi Riau, letak astronomis Desa Tanjung Leban adalah $01^{\circ}56'0''$ - $02^{\circ}03'0''$ Bujur Timur (BT) dan $100^{\circ}24'0''$ - $100^{\circ}37'0''$ Lintang Utara (LU). Berada pada ketinggian ± 6 -10 meter di atas permukaan laut (mdpl), Kepenghuluan Tanjung Leban merupakan daerah dataran rendah yang melandai dari barat hingga berada di tepi barat aliran Sungai Kubu. Rincian letak dan posisi Kepenghuluan Tanjung Leban dapat dilihat pada peta berikut:

Gambar 1 Peta Lokasi Kepenghuluan Tanjung Leban

Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DPG 2019

2.2 Orbitasi

Perjalanan menuju Ibukota Kecamatan Kubu yang terletak di Kelurahan Teluk Merbau dari Kepenghuluan Tanjung Leban ditempuh melalui perjalanan darat menggunakan kendaraan roda dua dan empat tanpa ada kendaraan umum dengan kondisi jalan beragam. Beberapa bagian jalan dalam kondisi rusak berlubang dan beberapa bagian jalan dalam kondisi baik yang diperkeras dengan aspal pada sebagian besar ruas jalan serta sebagian berupa jalan beton. Perjalanan darat menuju ke Ibu Kota Kabupaten Rokan Hilir, Bagan Siapi-api dan Ibu Kota Provinsi Riau yaitu Pekanbaru, ditempuh dengan akses jalan berupa jalan yang diperkeras dengan aspal dan beton yang pada beberapa bagian kondisinya sedang rusak berlubang dan bergelombang serta sebagian jalan kondisinya baik tanpa kerusakan. Perjalanan ke Bagan Siapi-api serta Pekanbaru dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan roda empat. Untuk mencapai kepenghuluan ini dari dan ke Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Provinsi terdapat angkutan umum berupa kendaraan minibus dari dan ke Simpang Pelita yang kemudian dilanjutkan dengan kendaraan lain hingga tiba di Kepenghuluan ini. Berikut ini adalah informasi tentang aksesibilitas dari dan ke Kepenghuluan Tanjung Leban:

Tabel 1 Orbitasi

No	Uraian	Keterangan
I.	Ibu Kota Kecamatan	
1.	Jarak ke Ibu Kota Kecamatan (Km)	11 Km
2.	Waktu Tempuh dengan kendaraan bermotor (Jam)	±30 Menit
3.	Jumlah Kendaraan Umum ke ibu Kota Kecamatan (Unit)	-
II.	Ibu Kota Kabupaten Rokan Hilir (Bagan Siapi-api)	
1.	Jarak ke Ibu Kota Kabupaten /kota (Km)	245 Km
2.	Waktu Tempuh dengan kendaraan bermotor (Jam)	±3,5 Jam
3.	Jumlah Kendaraan Umum Ke Ibu Kota Kabupaten (Unit)	3 Unit
III.	Ibu Kota Provinsi Riau (Pekanbaru)	
1.	Jarak ke Ibu Kota Provinsi (Km)	480 Km
2.	Waktu Tempuh dengan kendaraan bermotor (Jam)	±10 Jam
3.	Jumlah Kendaraan umum ke Ibu Kota Provinsi (Unit)	5 Unit

Sumber: *Kepenghuluan Tanjung Leban, 2019.*

2.3 Batas dan Luas Wilayah

Sebagai salah satu dari sepuluh wilayah administratif setingkat desa yang berada di dalam Kecamatan Kubu, wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban memiliki batas dengan wilayah Kepenghuluan lain dalam Kecamatan serta berbatasan dengan Kepenghuluan lainnya di luar wilayah kecamatan Kubu. Adapun batas alam wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban di sebelah barat adalah aliran Sungai Kubu yang mengarah ke hulu sungai. Lebih jelasnya mengenai batas-batas Kepenghuluan Tanjung Leban dengan Kepenghuluan-kepenghuluan lain sebagai berikut:

Tabel 2 Batas-batas Kepenghuluan Tanjung Leban

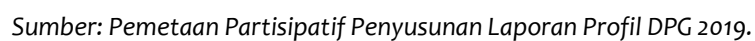
Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Sungai Segajah	Kubu
Sebelah Selatan	Teluk Nilap	Kubu Babussalam
Sebelah Timur	Sungai Kubu Hulu	Kubu
Sebelah Barat	Bukit Selamat	Simpang Kanan

Sumber : *Pemerintah Desa Tanjung Leban, 2017 & Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DPG 2019.*

Luas wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban menurut BPS Kabupaten Rokan Hilir, (2018) adalah 14,93 km² atau 1.493 hektar (Ha). Adapun sumber lainnya menyebutkan bahwa wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban menurut Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri (2018) adalah seluas 33 km² atau 3.300 Ha. Pemetaan partisipatif di Kepenghuluan Tanjung Leban menghasilkan peta menggunakan batas-batas indikatif yang ditunjukkan masyarakat dengan luas wilayah kepenghuluan sebesar 21.434,60 Ha.

Ketiadaan batas definitif Kepenghuluan menyebabkan tiap lembaga pemerintahan membuat peta batas wilayah berdasarkan bayangan gambaran yang mereka miliki tentang wilayah desa untuk memenuhi kepentingan administrasi. Pembuatan peta-peta ini terkadang hanya dilakukan melalui proses deliniasi batas di atas meja tanpa melakukan konsultasi dengan masyarakat atau lebih jauh survei tapal batas. Perbedaan luas wilayah dalam berbagai data yang dikeluarkan bermacam instansi ini tidak hanya dialami Kepenghuluan Tanjung Leban, banyak wilayah-wilayah setingkat desa di Indonesia mengalami hal yang serupa. Luas hasil Pemetaan Partisipatif lebih mendekati luas wilayah Kepenghuluan ini, karena pemetaan partisipatif melalui proses diskusi bersama warga untuk mengenali dan menunjukan batas-batas wilayah dalam melakukan deliniasi Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT), serta menggunakan beberapa titik batas yang diambil bersama warga dengan alat *Global Positioning System* (GPS) di lapangan. Meskipun masih terdapat beberapa bagian wilayah dalam peta hasil pemetaan partisipatif Kepenghuluan ini yang membutuhkan penyelesaian tapal batas dengan kepenghuluan dan kecamatan lain. Peta yang dihasilkan melalui pemetaan partisipatif ini di masa depan bisa digunakan sebagai alat bermusyawarah menyelesaikan masalah tapal batas wilayah dengan kepenghuluan lain.

Perbedaan luas ini bersumber dari tidak adanya penetapan batas-batas definitif wilayah administratif Kepenghuluan Tanjung Leban secara legal formal oleh instansi yang berwenang. Hal yang serupa mengenai tidak adanya penetapan batas-batas definitif juga terjadi terhadap wilayah administratif Kecamatan Kubu. Akibatnya, sering terjadi sengketa tapal batas dengan wilayah kepenghuluan lainnya baik yang berada dalam Kecamatan Kubu dan di luar Kecamatan Kubu. Sengketa ini biasanya dipicu dari sengketa tanah antar warga atau pihak pengelola tanah yang mendasarkan penguasaan tanah dengan surat keterangan tanah dari kepenghuluan yang berbeda-beda pada suatu area yang tidak jelas tapal batas antar wilayah kepenghuluan.



2.4 Fasilitas Umum dan Sosial

Kepenghuluan Tanjung Leban memiliki berbagai fasilitas umum dan sosial yang dibangun dari berbagai sumber dana, diantaranya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau, APBD Kabupaten Rohil, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan (APBKep) Tanjung Leban serta swadaya dari masyarakat. Fasilitas Sosial yang terdapat di Tanjung Leban terdiri dari sarana dan prasarana pendidikan, Kesehatan, ibadah, pemakaman serta gedung dan perkantoran. Adapun kondisi fasilitas sosial ini beragam, meskipun pada umumnya masih banyak yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki karena masih kurang layak dan memadai untuk digunakan. Lebih lengkap tentang fasilitas sosial yang terdapat di Kepenghuluan Tanjung Leban dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3 . Fasilitas Sosial Di Kepenghuluan Tanjung Leban

No	Fasilitas	Volume	Lokasi	Kondisi	Pembiayaan
Pendidikan					
1	Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah (MDTA) Darul Ulum	1 unit	Jl. Parit Mat Ali RT 07 RW 03 Dusun Sempurna	Kurang Layak (Menumpang / bergantian dengan PAUD Akbar)	APBD Kab. Rohil
2	Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Mifthanul Jannah	1 unit	Dusun Karya	Kurang Layak	APBD Kab. Rohil
3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Akbar	1 unit	Jl. Parit Mat Ali RT 07 RW 03 Dusun Sempurna	Kurang Layak (Menumpang / bergantian dengan MDTA Darul Ulum)	APBD Kab. Rohil
4	Taman Kanak-kanak (TK) Jusmanidar	1 unit	Dusun Rantau Benuang	Kurang Layak	Yayasan
5	Sekolah Dasar Negeri (SDN) 009 Tanjung Leban	1 unit	Jl Inpres Dusun Karya	Layak	APBD Kab. Rohil
6	SDN 015 Tanjung Leban	1 unit	Dusun Rantau Benuang	Kurang Layak	APBD Kab. Rohil
7	SD Lokal Jauh Tanjung Leban	1 unit	Dusun Cipta Jaya	Kurang layak	Swadaya
8	Sekeolah Menengah Pertama (SMP) Hariri	1 unit	Dusun Rantau Benuang	Layak	Yayasan
Kesehatan					
1.	Pondok Bersalin Desa (Polindes) Bunga Matahari	1 unit	Dusun Karya	Kurang Layak	APBD Kab.
2.	Puskesmas Pemabntu (Pustu) Bunga Selasih	1 unit	Dusun Rantau Benuang	Layak	APBD Kab.
3	Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Bunga Matahari	1 unit	Dusun Karya	Kurang Layak (Menumpang Polindes)	APBKep
4	Posyandu Bunga Selasih	1 unit	Dusun Rantau Benuang	Layak (Menumpang Pustu)	APBkep

Ibadah					
1.	Masjid Nurul Iman	1 unit	Dusun Karya	Layak	APBD Kab.
2.	Masjid Al Ikhlas	1 unit	Dusun Sempurna	Layak	Swadaya
3.	Masjid Al Amin	1 unit	Jl. Karya Mukti Dusun Cipta Jaya	Kurang Layak	Swadaya
4.	Masjid Al Hidayah	1 unit	Dusun Cipta Jaya	Kurang Layak	Swadaya
5.	Mesjid As Syahnur	1 unit	Dusun Cipta Jaya	Kurang Layak	Swadaya
6.	Masjid Al Bahroin	1 unit	Dusun Sukadamai	Kurang Layak	Swadaya
7.	Masjid Amanah	1 unit	Dusun Rantau Benuang	Kurang Layak	Swadaya
8.	Musala Al Hikmah	1 unit	Dusun Cipta Jaya	Kurang Layak	Swadaya
9.	Musala Al Falah	1 unit	Dusun Suka Damai	Tidak Layak	Swadaya
10.	Musala Al Barokah	1 unit	Dusun Rantau Benuang	Tidak Layak	Swadaya
11.	Musala Al Amin	1 unit	Dusun Sempurna	Kurang Layak	Swadaya
12.	Musala Nurul Iman	1 unit	Dusun Mayang Sari	Tidak Layak	Swadaya
13.	Musala Al Muhajirin	1 unit	Dusun Mayang Sari	Kurang Layak	Swadaya
14.	Musala	1 unit	-	Dalam proses pembangunan (Sengketa wilayah)	APBKep
15.	GBI	1 unit	Dusun Rantau Benuang	Kurang Layak	Swadaya
16.	Gereja HKBP Sion	1 unit	Dusun Rantau Benuang	Kurang Layak	Swadaya
17.	Gereja Methodis	1 unit	Dusun Mayang Sari	Kurang Layak	Swadaya
18.	Gereja GMI	1 unit	Dusun Mayang Sari	Kurang Layak	Swadaya
19.	Gereja HKBP	1 Unit	-	-	Swadaya
20.	Gereja	1 Unit	-	-	Swadaya
Olahraga					
1	Lapangan Bola Voli	1 unit	Dusun Sempurna	Kurang Layak	Swadaya
2	Lapangan Bola Voli	1 unit	Dusun Cipta Jaya	Kurang Layak	Swadaya
3	Lapangan Bola Voli	1 Unit	Dusun Karya	Kurang Layak	Swadaya
4	Lapangan Bola Voli	1 Unit	Dusun Rantau Benuang	Kurang Layak	Swadaya
Pemakaman					
1	Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dusun Karya	1 unit	Dusun Karya	Kurang Layak	Wakaf
2	TPU Dusun Sempurna	1 unit	Dusun Sempurna	Kurang Layak	Wakaf
3	TPU Dusun Cipta Jaya	1 unit	Dusun Cipta Jaya	Kurang Layak	Wakaf
4	TPUDusun Suka Damai	1 unit	Dusun Suka Damai	Kurang Layak	Wakaf
5	TPU Dusun Rantau Benuang	1 unit	Dusun Rantau Benuang	Kurang Layak	Wakaf
6	TPU Dusun Mayang Sari	1 unit	Dusun Mayang Sari	Kurang Layak	Wakaf
Gedung & Perkantoran					
1	Kantor Kepenghuluan	1 unit	Dusun Cipta Jaya	Layak	APBD Kab.
2	Balai Pertemuan	1 unit	Dusun Rantau Benuang	Layak	APBD Kab.

Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DPG 2019.

Gambar 3 Fasilitas Sosial di Kepenghuluan Tanjung Leban



Masjid Nurul Iman Dusun Karya



Masjid Al Hidayah Dusun Cipta Jaya



Masjid Al Bahroin Dusun Suka Damai



Musala Al Falah Dusun Suka damai



Musala Al Barokah Dusun Rantau Benuang



Musala Al Hikmah Dusun Cipta Jaya



Lapangan Bola Voli Dusun Sempurna



Kantor Kepenghuluan Tanjung Leban



Tempat Pemakaman Umum Dusun Karya

Sumber: Dokumentasi Pribadi.

Mengenai fasilitas umum di Kepenghuluan Tanjung Leban, terdiri dari jalan dan jembatan yang merupakan akses untuk transportasi di dalam wilayah kepenghuluan. Secara umum kondisi fasilitas umum yang terdapat pada kepenghuluan ini masih jauh dari memadai dan membutuhkan peningkatan serta perbaikan agar dapat diakses lebih baik oleh masyarakat terutama di Kepenghuluan Tanjung Leban. Berikut ini merupakan tabel fasilitas umum yang dapat ditemukan di Kepenghuluan Tanjung Leban:

Tabel 4 Fasilitas Umum Di Kepenghuluan Tanjung Leban

No	Fasilitas	Volume	Lokasi	Kondisi	Pembiayaan
I	Jalan				
1	Jl. Lintas PU		Dusun Rantau Benuang	Tidak Layak	APBD Prov. Riau
2	Jl. Batu Bara	2 Km	Dusun Karya	Kurang Layak	APBD Kab. Rohil
3	Jl. Impres	2 Km	Dusun Karya	Layak	APBD Kab. Rohil
4	Jl. Parit Mat Ali	3 Km	Dusun Sempurna	Tidak Layak	APBD Kab. Rohil
5	Jl. Beringin	1,5 Km	Dusun Sempurna	Kurang Layak	APBD Kab. Rohil
6	Jl. Dermaga	1,5 Km	Dusun Cipta Jaya	Kurang layak	APBD Kab. Rohil
7	Jl. Kampung Stabat	4 Km	Dusun Cipta Jaya	Kurang Layak	APBD Kab. Rohil
8	Jl. Syafii Jais	1 km	Dusun Cipta Jaya	Layak	APBD Kab. Rohil
9	Jl. Jaya Mukti	3 Km	Dusun Cipta Jaya	Tidak Layak	APBKep
10	Jl. Sentosa	3 km	Dusun Cipta Jaya	Tidak Layak	APBKep
11	Jl. Harapan	3 km	Dusun Karya	Tidak Layak	APBD Kab. Rohil
12	Jl. Anak Sekolah	2 Km	Dusun Cipta Jaya	Tidak Layak	Swadaya
13	Jl. A. Kasim	4,7 Km	Dusun Rantau Benuang	Kurang Layak	APBD Kab. Rohil
14	Jl. Jabil Syamsudin	5 Km	Dusun Rantau Benuang	Kurang Layak	APBD Kab. Rohil
15	Jl. Kampung Baru Pematang	4 Km	Dusun Cipta Jaya	Kurang Layak	Swadaya
16	Jl. Sepakat Jaya	1,5 Km	Dusun Suka Damai	Tidak Layak	Swadaya
17	Jl. Datuk Kancil	1,6 Km	Dusun Suka Damai	Tidak Layak	Swadaya
18	Jl. Berastagi	1,5 Km	Dusun Suka Damai	Tidak Layak	Swadaya
19	Jl. Indra Bangsawan	1 Km	Dusun Suka Damai	Tidak Layak	Swadaya
20	Jl. Melati	3 Km	Dusun Mayang Sari	Kurang Layak	Swadaya
21	Jl. Sei Mayang	5 Km	Dusun Mayang Sari	Tidak Layak	Swadaya
22	Jl. Mawar	3 Km	Dusun Mayang Sari	Kurang Layak	Swadaya
23	Jl. H. Oloan	1,5 Km	Dusun Suka Damai	Tidak Layak	Swadaya
24	Jl. Belukar		Dusun Suka Damai		
25	Jl. Kisaran		Dusun Suka Damai		
26	Jl. Sekapur Sirih	3 Km	Dusun Rantau Benuang	Tidak Layak	Swadaya
27	Gg. Ahmad Yani	200 m	Dusun Sempurna	Layak	APBKep
28	Gg. Sutrisno	1,5 km	Dusun Sempurna	Kurang Layak	APBKep
29	Gg. Sei Buluh I	1 km	Dusun Karya	Tidak Layak	Swadaya
30	Gg. Sei Buluh II	900 m	Dusun karya	Tidak Layak	Swadaya
31	Gg. Sepakat		Dusun Cipta Jaya		

II	Jembatan				
1	Jembatan	1 unit	Jl. Parit Mat Ali, Dusun Karya	Layak	APBD Kab. Rohil
2	Jembatan (Box Culvert) Gg. Ahmad Yani	1 unit	Dusun Sempurna	Layak	APBD kab. Rohil
3	Jembatan (Box Culvert) Jl. Dermaga	1 unit	Dusun Cipta Jaya	Kurang Layak	APBD Kab. Rohil
4	Jembatan (Box Culvert) Jl. Syafii Jais	1 unit	Dusun Cipta Jaya	Layak	APBD Kab. Rohil
5	Jembatan (Box Culvert)	1 unit	Dusun Cipta Jaya	Layak	APBD Kab. Rohil
6	Jembatan (Box Culvert)	1 unit	Dusun Cipta Jaya	Layak	APBD Kab. Rohil
7	Jembatan (Box Culvert)	1 unit	Dusun Sempurna	Layak	APBD Kab. Rohil
8	Jembatan (Box Culvert) Sungai Buluh	1 unit	Dusun Sempurna	Layak	APBD Kab. Rohil
9	Jembatan (Box Culvert) Jl. pematang	1 unit	Dusun Cipta Jaya	Layak	APBKep
10	Jembatan (Gorong-gorong)	1 unit	Dusun Suka Damai	Layak	APBKep
11	Jembatan (Box Culvert) Jl. Sepakat Jaya	1 unit	Dusun Suka Damai	Layak	APBKep
12	Jembatan (Gorong-gorong)	1 unit	Dusun Suka Damai	Layak	APBKep
13	Jembatan (Gorong-gorong)	1 unit	Dusun Rantau Benuang	Layak	APBKep

Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DPG 2019.

Gambar 4 Fasilitas Umum di Kepenghuluan Tanjung Leban



Jl. Batu Bara Dusun Karya



Jl. Parit Mat Ali Dusun Sempurna



Jl. Indra Bangsawan Dusun Suka Damai



Jl. H. Oloan Dusun Suka Damai



Jl. Belukar di Dusun Suka Damai



Jembatan & Jl. Berastagi Dusun Suka Damai



Box Culvert Jl. Ahmad Yani Dusun Sempurna



Box Culvert Jl. Sentosa Dusun Cipta Jaya



Box Culvert Jl. Beringin Dusun Karya



Box Culvert Jl. Parit Mat Ali Dusun Karya



Box Culvert Dusun Cipta Jaya



Jembatan dan Jl. Kisaran Dusun Suka Damai



Gorong-gorong Dusun Rantau Benuang



Gorong-gorong Jl. Lintas PU Dusun Suka damai



Jembatan Dusun Suka Damai

Sumber: Dokumentasi Pribadi.



Bab III

Lingkungan Fisik dan Ekosistem Gambut

3.1 Topografi

Wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban adalah dataran rendah dengan ketinggian antara 6-10 mdpl (BPS Kabupaten Rokan Hilir, 2018). Di bagian Timur wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban mengalir Sungai Kubu sebagai batas alam di sebelah Barat yang alirannya sungainya berhulu di sebelah Selatan hingga mencapai pertemuan antara Sungai Tolang Kanan dan Sungai Tolang Kiri. Wilayah Tanjung Leban di sebelah Selatan ini dimulai dari pertemuan Sungai Kubu dan Sungai Tolang kanan, selanjutnya wilayah Tanjung Leban di bagian Selatan mengikuti aliran ke arah Hulu Sungai Tolang Kanan yang mengarah ke Barat. Posisi aliran parit-parit yang terdapat di wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban dengan demikian menuju ke arah Sungai Kubu di sebelah Timur dan Sungai Tolang kanan di sebelah Selatan.

Secara legal administratif, wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban terbagi dalam dua kawasan penguasaan, yaitu Kawasan Hutan Negara Berupa Hutan Produksi Terbatas (HPT), serta Kawasan Area Penggunaan Lain (APL). Kawasan APL terdapat pada ujung timur laut dan ujung barat daya dari wilayah kepenghuluan ini, sisanya semua wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban masuk dalam Kawasan HPT. Lahan Gambut di Kepenghuluan Tanjung Leban semuanya berada di kawasan HPT dengan posisi setelah tanah mineral yang berada di sepanjang aliran Sungai Kubu dan Sungai Tolang Kanan dengan radius antara 500 meter hingga lebih dari 3 km. Baik kawasan APL maupun HPT di Kepenghuluan ini tidak memiliki perbedaan ekosistem yang berbeda karena telah dikelola menjadi area budidaya pertanian dengan komoditas utama yang diusahakan yaitu Kelapa Sawit. Namun kebakaran hutan di wilayah kepenghuluan Tanjung Leban yang berulang-ulang di tahun 2014, 2015, 2017, dan 2018 mengakibatkan lahan pertanian menjadi korban kebakaran dan kini berubah menjadi area dengan dominasi penutupan lahan berupa semak belukar.

Wilayah gambut di Kepenghuluan Tanjung Leban berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) No. SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 Tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional, termasuk dalam wilayah Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) Sungai Barumun – Sungai Kubu yang merupakan KHG lintas Provinsi yang berada pada wilayah Kabupaten Rokan Hilir di Provinsi Riau serta Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan di Provinsi Sumatera Utara. Keberadaan Kubah Gambut merupakan salah satu ciri dalam Kawasan ekosistem gambut. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 16 tahun 2017 pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa kubah gambut sebagai areal kesatuan hidrologis yang mempunyai topografi lebih tinggi dari wilayah sekitarnya sehingga secara alami mempunyai kemampuan untuk menyerap dan menyimpan air lebih banyak, serta memasok air pada wilayah sekitarnya. Tanah gambut di Kepenghuluan Tanjung Leban dapat ditemukan setelah radius 500 meter hingga lebih dari 3 km sepanjang aliran sungai Kubu dan Sungai Tolang Kanan, meskipun demikian warga umumnya tidak mengetahui keberadaan kubah gambut pada kawasan ekosistem gambut di wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban.

Pemukiman, kebun masyarakat, dan semak belukar serta lahan bekas terbakar adalah penggunaan lahan yang kini secara fisik terdapat pada lahan gambut di Kepenghuluan Tanjung Leban. Tidak dapat ditelusuri secara pasti kapan dimulainya pembangunan parit-parit untuk memanfaatkan hasil hutan dan membuka lahan pertanian dimulai pada Kepenghuluan ini. Jika diperhatikan dengan baik dan berdasarkan penuturan warga maka parit-parit yang paling awal dibangun di sekitar timur laut wilayah kepenghuluan dimana kawasan pemukiman awal dan parit-parit ini tidak masuk jauh ke dalam lahan gambut. Tetapi proses pembukaan lahan secara masif di Kepenghuluan Tanjung Leban mulai dilakukan pada tahun 1990-an dan 2000-an. Proses pembukaan lahan dilakukan untuk penanaman sawit sebagai komoditas yang sedang *booming*. Hal ini dilakukan oleh warga setempat maupun pendatang dari luar wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban. Seiring dengan pembukaan lahan di tahun-tahun tersebut parit-parit mulai dibangun pada lahan gambut di Kepenghuluan Tanjung Leban.

3.2 Geomorfologi dan Jenis Tanah

Geomorfologi dan jenis tanah di Kepenghuluan Tanjung Leban kondisinya terbagi dalam tanah mineral dan tanah gambut. Tanah mineral berada pada wilayah tepian sungai alam yang menjadi batas alami kepenghuluan Tanjung Leban baik di area semak belukar pemukiman dan budidaya pertanian masyarakat. Sedangkan Tanah gambut berada pada radius 500 meter hingga lebih 3 km dari sungai alam setelah tanah mineral. Pada umumnya tanah gambut di Kepenghuluan Tanjung Leban tutupan lahannya berupa semak belukar, lahan budidaya pertanian dan pemukiman masyarakat.

Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif 2019, luas kawasan gambut di Kepenghuluan Tanjung Leban adalah 16.724,68 Ha atau seluas 78,03% dari luas kepenghuluan ini. Sisanya seluas 4709,92 Ha atau 21,97% dari luas Kepenghuluan Tanjung Leban adalah kawasan tanah mineral.

Seperti yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Gambut merupakan material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang belum terurai sempurna serta terakumulasi pada daerah rawa (atau genangan air). Adanya genangan di daerah rawa, danau dangkal atau cekungan yang secara berangsur-angsur ditumbuhi oleh tumbuhan air dan vegetasi lahan basah menjadi awal mula dari proses pembentukan tanah gambut. Tumbuhan yang mati melapuk tidak sempurna dan secara bertahap membentuk lapisan-lapisan gambut sehingga genangan tersebut dipenuhi timbunan gambut. (Suryadiputra, 2018).

Berdasarkan penuturan, warga pada kawasan gambut di wilayah tengah Kepenghuluan Tanjung Leban memiliki kedalaman antara 2 – 3 meter dan bahkan umumnya pada beberapa tempat lebih dari 3 meter. Berdasarkan penggolongan ketebalan atau kedalaman serta tingkat kematangan atau dekomposisi material gambut, tanah gambut pada Kepenghuluan ini dibagi dalam empat golongan seperti tercantum di tabel berikut:

Tabel 5 Ketebalan dan Kematangan Gambut di Kepenghuluan Tanjung Leban

No	Ketebalan Gambut	Tingkat Dekomposisi
1.	Gambut dangkal (50 cm-100 cm)	Saprik, Hemik
2.	Gambut sedang (100-200 cm)	Saprik, Hemik,
3.	Gambut dalam (200 -300 cm)	Saprik, Hemik, Fibrik
4.	Gambut sangat dalam (>300 cm)	Hemik, Fibrik

Sumber: Wawancara dan Observasi dalam Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan DPG 2019

Gambar berikut merupakan pengambilan sampel tanah gambut di salah satu sekat kanal yang dibangun di Dusun Rantau Benuang, sebagai berikut:

Gambar 5 Pengambilan Sampel Tanah Gambut di Kepenghuluan Tanjung Leban



Tanah gambut sebelum peremasan



Tanah gambut setelah peremasan

Keterangan:

Pengambilan sampel dilakukan di wilayah dusun Rantau Benuang Kepenghuluan Tanjung Leban. Sampel gambut yang diambil memiliki tingkat kematangan Hemik yang secara fisik dapat dikenali dari warna yang coklat tua kehitaman, mempunyai tingkat pelapukan sedang, sebagian bahan telah mengalami pelapukan dan sebagian lagi berupa serat. Pada saat diperas dengan jari dalam keadaan basah, gambut hemik agak mudah melewati sela-sela jari dan kandungan serat yang tertinggal pada telapak tangan kurang dari tiga perempat ($\frac{3}{4}$) hingga seperempat ($\frac{1}{4}$) bagian atau lebih.

Sumber: Dokumentasi Pribadi dan Observasi dalam Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DPG 2019

3.3 Iklim dan Cuaca

Pada Kepenghuluan Tanjung Leban di tahun 2018, suhu rata-rata adalah 26.7 °C dengan curah hujan rata-rata 2.616 mm. Kepenghuluan ini memiliki iklim tropis. Curah hujan di Tanjung Leban adalah petunjuk kandungan kelembapan udara yang berbentuk cairan (presipitasi²) bahkan selama bulan terkering. Menurut Köppen dan Geiger, iklim ini diklasifikasikan sebagai Af atau iklim hutan hujan tropis. Jumlah curah hujan paling sedikit terjadi pada bulan Juli dan mencapai presipitasi puncaknya pada Oktober. Variasi dalam presipitasi antara bulan terkering dan bulan terbasah adalah 163 mm. Suhu rata-rata tertinggi pada bulan Mei, dan bulan Desember adalah bulan terdingin sepanjang tahun. Variasi dalam suhu tahunan adalah sekitar 1,0°C. Lebih lengkap mengenai suhu dan curah hujan di Kepenghuluan Tanjung Leban sepanjang tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 Suhu dan Curah Hujan Kepenghuluan Tanjung Leban Tahun 2018

Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Suhu Rata-rata (°C)	26,5	26,5	26,9	27,1	27,3	27,1	26,8	26,7	26,6	26,5	26,5	26,3
Suhu Minimum (°C)	21,6	21,5	21,9	22,4	22,6	22,4	22,0	22,0	22,1	22,1	22,1	21,8
Suhu Maksimum (°C)	31,4	31,6	32	31,9	32	31,8	31,6	31,4	31,2	31,0	30,9	30,9
Curah Hujan (mm)	253	170	202	204	185	150	133	205	254	296	294	270

















Sumber: Climate-Data.org, 2019.

Kepenghuluan Tanjung Leban sebagaimana umumnya daerah-daerah di Indonesia, sepanjang tahun mengalami dua musim utama, yaitu musim Hujan dan Musim Kemarau/ Kering. Musim Hujan di wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban dimulai pada bulan September dan berakhir di sekitar bulan Maret dengan puncak musim hujan pada November hingga Februari. Bulan Maret merupakan masa pancaroba dimana Musim Kemarau akan bermula hingga di pertengahan atau akhir bulan September. Musim Kemarau berlangsung penuh pada Bulan Mei hingga bulan Agustus dimana pada masa ini kerawanan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terjadi di Kepenghuluan Tanjung Leban.

Komoditas pertanian di Kepenghuluan ini berupa Kelapa Sawit dan Nanas yang dalam pola budidaya pertanian yang dijalankan masyarakat dipengaruhi oleh kondisi musim yang berlangsung. Dua jenis tanaman komoditas ini yang sekarang paling banyak dibudidayakan dan memberikan penghasilan yang cukup berarti bagi ekonomi rumah tangga di Kepenghuluan Tanjung Leban. Pengaruh musim terutama pada pilihan saat menanam yang biasanya dilakukan pada masa awal akhir musim hujan, serta hasil yang didapat ketika masa panen meskipun intensitas panen tetap sama tetapi akan berbeda kuantitas dan kualitas komoditas yang dihasilkan antara musim hujan dan musim kemarau. Informasi mengenai musim, waktu kerentanan alam dalam setahun, serta produksi komoditas pertanian yang diusahakan oleh warga Kepenghuluan Tanjung Leban dapat dilihat lebih terperinci pada tabel kalender musim berikut ini:

² Presipitasi adalah suatu istilah meteorologi yang berarti kandungan kelembapan udara yang berbentuk cairan atau bahan padat, seperti hujan, embun, salju (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud RI, 2016)

Tabel 7. Kalender Musim

BULAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES	PELUANG	MASALAH
MUSIM													—	Pada saat banjir akses transportasi untuk mengangkut hasil panen sulit karena terbatas alat transportasi
KERAWANAN KEBAKARAN	Banjir	Banjir	Pancaroba	Pancaroba					Pancaroba	Hujan Deras	Banjir	Banjir		Sarana pemadaman kebakaran masih kurang mesin air, selang, sumur bor, (jarak dekat)
KOMODITAS														
Sawit		Tanam	Tanam, Rawat, & Bersihkan Gulma	Tanam, Rawat &, Pupuk	Rawat & Menunas (Bersihkan Pelepah)	Rawat	Rawat	Rawat	Rawat, Pupuk & Tanam	Rawat & Tanam			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Panen 2X ▪ Pemasaran cukup mudah ▪ Pemanfaatan lidi dan kulit pelepah untuk dijadikan tepas (dinding) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Harga yang murah ▪ Jalan yang rusak ▪ Transportasi dari lahan ke tph ▪ Hama babi, tikus , ulat (api, bulu)
Nanas			Tanam	Tanam						Tanam	Tanam		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Panen 3X ▪ Tanpa pemupukan masih alami ▪ Belum diolah dalam bentuk produk lain ▪ pemasaran cukup mudah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Harga tidak stabil ▪ Jalan rusak ▪ Transportasi jauh ▪ Hama babi dan musang

Sumber : Fokus Grup Diskusi Tim Pemetaan dan Masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban 2019

3.4 Keanekaragaman Hayati

Secara umum kondisi keanekaragaman hayati di Kepenghuluan Tanjung Leban dipengaruhi dengan kondisi lanskap saat ini, dimana pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang telah berlangsung menjadi faktor dominan yang menentukan kualitas dan kuantitas keanekaragaman hayati. Pemanfaatan lahan beserta hasil-hasil hutan memperlihatkan adanya hubungan dalam proses degradasi keanekaragaman hayati. Pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat yang frekuensinya semakin tinggi serta pembukaan lahan hutan yang kemudian diikuti dengan upaya budidaya pertanian monokultur pada awalnya merupakan upaya pemenuhan subsistensi masyarakat dengan pemanfaatan untuk konsumsi domestik rumah tangga. Ketika pola produksi pertanian yang monokultur semakin masif dalam menghasilkan komoditas pertanian yang dibutuhkan pasar, upaya perluasan lahan pertanian monokultur semakin mendesak ruang hidup bagi berbagai jenis flora dan fauna di wilayah ini. Hal ini diperparah dengan peristiwa kebakaran yang terus terjadi berulang-ulang.

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus bersama masyarakat berusaha merekam perubahan-perubahan keanekaragaman hayati yang telah berlangsung dalam wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban dengan menuangkannya pada Tabel Bagan Kecenderungan Perubahan Keanekaragaman Hayati. Hanya sedikit flora yang dapat terekam dalam diskusi ini menandakan telah mulai tergerusnya pengetahuan warga akan keanekaragaman hayati yang pernah ada di wilayah kepenghuluan dan memperlihatkan sesungguhnya masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban kini lebih didominasi oleh para pendatang yang bermukim di Kepenghuluan sehingga pengetahuan mengenai flora terbatas. Jenis-jenis flora yang tercatat pada umumnya merujuk pada jenis-jenis pohon kayu yang bermanfaat untuk masyarakat dalam penggunaan kebutuhan bangunan rumah serta mempunyai nilai ekonomi cukup tinggi. Beberapa jenis pohon tersebut bahkan tidak dapat ditemui lagi saat ini di wilayah Kepenghuluan, bahkan Pohon Leban yang menjadi nama wilayah ini karena keberadaannya yang melimpah terancam tidak akan dapat ditemui lagi. Terjadinya kebakaran lahan dan hutan yang berlangsung terus menerus di wilayah ini menjadi faktor penting yang turut mendorong hilangnya jenis-jenis flora yang ada tersebut. Terdapat juga jenis flora yang menurun populasinya karena terjadi perubahan kondisi hidrologi setempat yang diakibatkan kepentingan pembukaan lahan untuk budidaya komoditas pertanian.

Dibandingkan dengan beberapa dekade yang lalu penurunan kuantitas dan kualitas fauna di wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban juga terjadi. Selain karena proses pemanfaatan serta perburuan juga karena hilangnya ruang hidup akibat pembukaan lahan hutan menjadi lahan budidaya pertanian. Fauna yang mengalami hal tersebut diantaranya adalah Harimau, Beruang dan Macan Tutul. Meskipun demikian jenis-jenis fauna air cukup mampu bertahan di tengah perubahan-perubahan hidrologi yang berlangsung. Jika pun terdapat jenis-jenis fauna yang dapat bertahan di tengah situasi dan kondisi yang berlangsung maka cenderung

akan menjadi pengganggu dalam budidaya pertanian yang dikembangkan masyarakat seperti Babi Hutan dan Monyet.

Ragam vegetasi yang terdata dalam Diskusi Kelompok Terfokus merupakan jenis-jenis tanaman budidaya penghasil komoditas pertanian yang dikembangkan di lahan gambut maupun lahan non-gambut oleh masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban. Pada awalnya Karet, Coklat, Kopi dan Kelapa adalah jenis tanaman yang dibudidayakan oleh masyarakat di wilayah Kepenghuluan ini. Perubahan jenis tanaman akhir dekade 1990-an dan awal dekade 2000-an karena tingginya permintaan pasar, harga menguntungkan petani, serta intensitas kerja budidaya tanaman yang ringan dengan hasil melimpah, menjadi faktor pendorong beralihnya jenis tanaman yang dibudidayakan warga ke Kelapa Sawit. Dimulainya budidaya pertanian penghasil komoditas baru yaitu Sawit juga mendorong terjadinya pembukaan lahan baru yang semakin luas oleh masyarakat di wilayah kepenghuluan Tanjung Leban. Berikut ini adalah tabel yang berupaya merekam tentang perubahan keanekaragaman hayati yang telah berlangsung di kepenghuluan Tanjung Leban:

Tabel 7 Bagan Kecenderungan Perubahan Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman Hayati	Periode			Keterangan	Lokasi
 - 1999	1999-2009	2009-2019		
Flora					
Meranti (<i>Shorea sp</i>)	10	5	0	Pemanfaatan, pembukaan lahan, kebakaran	Di semua wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban
Leban (<i>Vitex pubescens vahl</i>)	10	5	1	Pemanfaatan, pembukaan lahan, kebakaran	Di semua wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban
Kompas (<i>koompassia malaccensis</i>)	10	5	0	Pemanfaatan, pembukaan lahan, kebakaran	Di semua wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban
Mahang (<i>Macaranga Sp</i>)	10	8	5	Pemanfaatan, pembukaan lahan, kebakaran	Di semua wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban
Pulai (<i>Alstonia Scholaris</i>)	10	5	0	Pemanfaatan, pembukaan lahan, kebakaran	Di semua wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban
Rotan (<i>Calameae Sp</i>)	10	5	0	Pemanfaatan, pembukaan lahan, kebakaran	Di semua wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban
Nibung (<i>Oncosperma Tigillarum</i>)	10	8	5	Pemanfaatan	Di semua wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban
Nipah (<i>Nypa Fruticans</i>)	10	10	10	Tumbuh alami di sepanjang pinggir sungai	Di semua wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban
Bambu	10	8	4	Pemanfaatan, pembukaan lahan	Di semua wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban
Fauna					
Harimau (<i>Panthera tigris Sumatrae</i>)	8	5	1	Pembukaan lahan	Di semua wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban
Rusa	8	5	2	Perburuan dan pembukaan lahan	Di semua wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban
Babi (<i>Sus Vitatus Sp</i>)	10	10	10	Populasi tinggi	Di semua wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban
Monyet	10	10	10	Populasi tinggi	Di semua wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban

Beruang (<i>Helarctos Malayanus</i>)	10	5	2	Perburuan dan pembukaan lahan	Di semua wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban
Macan tutul (<i>Panthera pardus</i>)	8	5	1	Pembukaan lahan	Di semua wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban
Ayam hutan	10	10	10	Populasi tinggi	Di semua wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban
Macan akar	10	8	5	Pembukaan lahan	Di semua wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban
Musang	10	8	5	Pembukaan lahan	Di semua wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban
Landak	10	8	5	Pembukaan lahan	Di semua wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban
Treanggiling	8	5	2	Pembukaan lahan dan perburuan	Di semua wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban
Kancil	8	5	1	Pembukaan lahan dan perburuan	Di semua wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban
Buaya	10	5	4	Perubahan alur sungai dan badan air	Di semua wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban
Ikan Gabus Tauman	10	10	5	Dimanfaatkan	Di semua wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban
Ikan Sepat	10	10	10	Dimanfaatkan namun populasi tinggi	Di semua wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban
Ikan Patin	10	10	10	Populasi tinggi dan dibudidayakan	Di semua wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban
Ikan Limbat	10	10	8	Dimanfaatkan	Di semua wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban
Ikan Kepar	10	10	10	Populasi tinggi	Di semua wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban
Ikan Puyu-puyu	10	10	10	Populasi tinggi	Di semua wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban
Ikan Nila	10	10	10	Populasi tinggi	Di semua wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban
Ikan Baung (<i>Bagrus Nemurus Valenciennes</i>)	10	10	7	Dimanfaatkan populasi lambat	Di semua wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban
Ikan Tapah	10	10	5	Dimanfaatkan	Di semua wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban
Siluang	10	10	10	Populasi tinggi	Di semua wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban
Burung Kuao	0	0	0	-	Di semua wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban
Burung Bangau putih	8	9	10	-	Di semua wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban
Burung Bangau tongtong	8	6	3	-	Di semua wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban
Burung Murai Batu	10	8	1	-	Di semua wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban
Burung Rangkong (enggang)	6	3	0	-	Di semua wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban
Ruwa-ruwa / Uwa-uwa / Ungkou	3	5	10	-	Di semua wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban
Vegetasi					
Sawit	1	8	10	Budidaya berkembang karena menjadi penghasil utama masyarakat	Di semua wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban
Nanas	1	7	10	Budidaya berkembang	Di semua wilayah

				karena menjadi penghasilan tambahan masyarakat	Kepenghuluan Tanjung Leban
Karet	8	4	2	Perubahan jenis tanaman	Di semua wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban
Kopi	8	4	0	Perubahan jenis tanaman	Di semua wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban
Coklat	7	3	1	Perubahan jenis tanaman	Di semua wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban
Kelapa	10	8	3	Perubahan jenis tanaman	Di semua wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban

Sumber : Diskusi Kelompok Terfokus Tim Pemetaan dan Masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban 2019.

3.5 Hidrologi di Lahan Gambut

Pembentukan pemukiman di Kepenghuluan Tanjung Leban, pada awalnya masyarakat hanya bermukim pada area tanah non-gambut di bagian Timur Laut wilayah Kepenghuluan tepi aliran Sungai Kubu yang sekarang merupakan wilayah Dusun Karya. Hal ini juga dapat ditelusuri dengan adanya makam yang dianggap masyarakat sebagai Tokoh pembentuk awal Kepenghuluan ini. Perkembangan pemukiman diiringi upaya pemanfaatan hasil hutan dan pembukaan lahan untuk budidaya pertanian merupakan awal dari dimulainya pembuatan parit-parit di wilayah ini hingga masuk ke dalam area tanah gambut.

Wilayah gambut di Kepenghuluan Tanjung Leban yang termasuk dalam wilayah Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) Sungai Barumun – Sungai Kubu, telah menjadi sumber penghidupan masyarakat dengan pemanfaatan lahan untuk budidaya pertanian. Pemanfaatan lahan gambut untuk lahan pertanian menyebabkan masyarakat membangun kanal atau parit untuk mengeringkan lahan dan sebagai jalur transportasi terutama untuk mengeluarkan hasil komoditas pertanian dari kebun. Parit Mat Ali merupakan parit awal yang dibangun oleh masyarakat pada awalnya di bagian Timur wilayah kepenghuluan ini, baru kemudian disusul dengan pembangunan parit-parit lainnya di wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban.

Adapun budidaya pertanian yang dilakukan awalnya berupa jenis tanaman Coklat, Kelapa, Karet, dan Kopi yang kemudian mulai berganti dengan Kelapa sawit di awal dekade tahun 2000-an. Sedangkan Parit PU merupakan parit yang dimulai pembangunannya seiring dengan pembukaan lahan untuk budidaya pertanian di bagian Barat wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban dan disusul dengan berbagai jaringan parit yang ada di sekitar Dusun Rantau Benuang, Dusun Suka Damai dan Dusun Mayang Sari. Pembuatan parit-parit tersebut berkaitan dengan pembukaan lahan hutan untuk memulai budidaya komoditas pertanian terutama Kelapa Sawit pada wilayah tersebut. Mudah-mudahan kebakaran berulang-ulang terjadi pada wilayah kepenghuluan Tanjung Leban salah satunya akibat dari keringnya lahan karena

pembuatan parit-parit tersebut terutama jika musim kemarau tiba di wilayah Kepenghuluan ini.

Tabel berikut ini akan memberikan gambaran mengenai hidrologi di lahan gambut yang di dalamnya memuat informasi mengenai kanal/parit, sekat-sekat, sumur bor, embung dan sungai alam yang terdapat dalam wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban.

Tabel 8 Hidrologi di Lahan Gambut

No	Jenis	Letak	Jumlah	Tahun	Pendanaan	Kondisi
	Sekat kanal	Dusun Mayangsari	1	2018	APBN	Berfungsi
	Sekat kanal	Dusun Rantau Benuang	2	2018	APBN	Berfungsi
	Sekat kanal	Dusun Cipta Jaya	7	2018	APBN	Berfungsi
	Sumur bor	Dusun Cipta Jaya	25	2018	APBN	Berfungsi
	Sumur bor	Dusun Mayang Sari	2	2018	APBN	Berfungsi
	Sumur bor	Dusun Rantau Benuang	12	2018	APBN	Berfungsi
	Sumur bor	Dusun Suka Damai	11	2018	APBN	Berfungsi
	Embung	Dusun Cipta Jaya	9	2018	APBN	Berfungsi
	Parit proyek	Dusun Karya	1	2018	APBN	Berfungsi
	Parit Mat Ali	Dusun Sempurna	1	1995	Swadaya	Berfungsi
	Parit Mat Ali	Dusun Cipta Jaya	1	1995	Swadaya	Berfungsi
	Parit PU	Dusun Suka Damai	1	2016	APBD	Berfungsi
	Parit PU	Dusun Rantau Benuang	1	2006	APBD	Berfungsi
	Parit PU	Dusun Mayang Sari	1	2006	APBD	Berfungsi
	Sungai Kubu	Dusun Karya	1	2018	APBN	Berfungsi

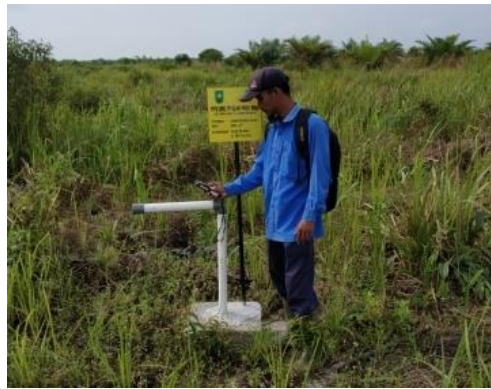
Sumber: Observasi dalam Pemetaan Partisipatif untuk Penyusunan Laporan Profil DPG 2019.

BRG melalui Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Provinsi Riau di tahun 2018, melaksanakan upaya pembasahan lahan gambut melalui pembuatan 10 unit sekat kanal serta 50 unit sumur bor melalui pembentukan kelompok masyarakat untuk pelibatan warga dalam pembangunannya. Upaya ini mendapatkan apresiasi yang cukup positif dari masyarakat di Kepenghuluan Tanjung Leban sebagai upaya awal pembasahan lahan gambut dan menjaga lahan agar tidak mudah terbakar pada saat musim kemarau berlangsung. Meskipun terdapat pendapat dari warga bahwa keberadaan lokasi sarana pembasahan lahan gambut tersebut masih kurang sesuai dan perlu ditambah keberadaannya guna menjaga lahan tetap basah mengingat kerapnya kebakaran yang telah terjadi di wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban. Mengenai keberadaan dan kondisi beberapa sekat kanal di Kepenghuluan Tanjung Leban ini secara visual dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 6 Hidrologi di Lahan Gambut



Sumur bor 01 di Dusun Cipta Jaya



Sumur bor 02 di Dusun Cipta Jaya



Sumur Bor 03 di Dusun cipta Jaya



Sekat Kanal



Sekat Kanal



Sekat Kanal



Sekat Kanal



Sekat Kanal



Sekat Kanal



Parit



Parit

Sumber: Dokumentasi Pribadi.

3.6 Kerentanan Ekosistem Gambut

Dinamika ekosistem gambut di Kepenghuluan Tanjung Leban berlangsung dengan perubahan-perubahan yang cukup cepat sejak akhir dekade 1990-an dan awal dekade 2000-an hingga saat ini. Pembukaan lahan hutan untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian serta peralihan jenis tanaman budidaya pertanian (Coklat, Kelapa, Karet dan Kopi) menjadi lahan budidaya Komoditas Sawit adalah beberapa akar penyebab perubahan kondisi ekosistem gambut di kepenghuluan ini. Pembukaan lahan untuk budidaya tanaman komoditas yang cenderung monokultur diiringi dengan pembuatan parit-parit telah berkontribusi merubah kondisi lahan gambut di Kepenghuluan Tanjung Leban. Dengan demikian lahan

gambut saat ini di Kepenghuluan Tanjung Leban menjadi rentan untuk terjadi kebakaran lahan.

Pada awal pembukaan lahan pada dekade awal tahun 2000-an di Kepenghuluan Tanjung Leban, pembakaran untuk pembukaan lahan masih banyak digunakan untuk memulai penanaman. Namun cara ini mulai ditinggalkan oleh warga karena cukup berisiko mengingat pada lahan pertanian di Kepenghuluan Tanjung Leban pada umumnya tidak dibatasi dengan parit-parit kecil antar lahan warga yang satu dengan yang lain. Menurut penuturan warga, Kebakaran lahan yang terjadi saat ini lebih karena kondisi lahan yang kering terutama pada area semak belukar serta kecerobohan dalam penggunaan api.

Peristiwa kebakaran lahan di Kepenghuluan Tanjung Leban telah terjadi berulang kali dan menurut penuturan warga yang mulai membuka lahan tahun 2001 di Dusun Mayang Sari, peristiwa kebakaran lahan mulai sering terjadi sejak tahun 2003-2004 hingga saat ini. Akibat kebakaran lahan berulang kali di Kepenghuluan ini, kerentanan kebakaran meningkat akibat lahan bekas terbakar berubah menjadi area semak belukar yang tidak segera dikelola lagi oleh warga karena faktor keterbatasan modal.

Jika dilihat dari jumlah titik api (*Hotspot*) yang terpantau di kepenghuluan Tanjung Leban sejak tahun 2014 hingga tahun 2018, jumlah *hotspot* terus meningkat dan semakin banyak jumlahnya. Kebakaran tahun 2018 merupakan peristiwa kebakaran lahan yang cukup besar di Kepenghuluan Tanjung Leban dimana bukan hanya lahan pertanian yang terbakar tetapi juga memakan korban harta benda warga yang terkena kebakaran lahan tersebut. Untuk jumlah *hotspot* yang terpantau satelit penginderaan jarak jauh oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dari tahun 2014 hingga tahun 2018 lebih detil dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9 Hotspot Tahun 2014-2018 di Kepenghuluan Tanjung Leban

No	Tahun	Jumlah Hotspot
1.	2014	7 titik
2.	2015	5 titik
3.	2016	-
4.	2017	58 titik
5.	2018	90 titik
Keterangan : Deteksi Hotspot oleh LAPAN berdasarkan satelit penginderaan jauh Aqua, Terra, dan S-NPP dengan tingkat kepercayaan $\geq 80\%$ - 100%. Data hotspot yang disajikan merupakan data antara tanggal 1 Juni sampai dengan 30 September setiap tahunnya, dimana merupakan waktu yang paling sering terjadi Karhutla.		

Sumber: Diolah dari LAPAN (2019).v



Bab IV

Kependudukan

4.1 Data Umum Penduduk

Terdapat beberapa data mengenai jumlah penduduk di Kepenghuluan Tanjung Leban pada tahun 2018, yang pertama berdasarkan Profil Desa Kepenghuluan Tanjung Leban tahun 2019 jumlah penduduk Kepenghuluan Tanjung Leban berjumlah 3.211 jiwa dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki 1.702 jiwa dan perempuan berjumlah 1.509 jiwa. Jumlah ini sama dengan jumlah penduduk Tanjung Leban menurut data BPS Kabupaten Rokan Hilir sejak tahun 2016 dan tahun 2017 (BPS Kabupaten Rokan Hilir, 2017; 2018). Data mengenai jumlah penduduk Kepenghuluan Tanjung Leban tahun 2018 yang kedua adalah dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri (Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, 2018) yang menyatakan jumlah penduduk Kepenghuluan Tanjung Leban sebanyak 2.795 jiwa dengan jumlah laki-laki 1.468 jiwa dan perempuan berjumlah 1.327 jiwa. Pada dasarnya data kependudukan dari Kepenghuluan serta BPS Kabupaten Rokan Hilir memperlihatkan tidak adanya perubahan jumlah penduduk baik bertambah atau pun berkurang pada rentang tahun tertentu yang mengindikasikan tidak ada upaya untuk memperbaharui data kependudukan. Sedangkan data dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri yang berbasis pada pencatatan jumlah penduduk yang telah terdata di Kartu Keluarga yang telah diterbitkan untuk Keluarga di Kepenghuluan Tanjung Leban. Masalah ini perlu diperbaiki dengan mendorong tertib administrasi kependudukan di Kepenghuluan Tanjung Leban, dalam artian baik pihak Kepenghuluan maupun warga harus sama-sama pro-aktif dalam urusan administrasi kependudukan. Meskipun terjadi perbedaan jumlah dari data yang ada di tahun 2018, tetapi terdapat kecenderungan umum bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibanding dengan jumlah penduduk perempuan pada setiap tahunnya di Kepenghuluan Tanjung Leban.

Tabel 10 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kepenghuluan Tanjung Leban

Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	Laki-laki		Perempuan		Total	
	Tahun	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)	Jumlah (jiwa)
	2018*	1.468	52,85	1.327	47,15	2.795
	2017**	1.702	53,01	1.509	46,99	3.211
	2016**	1.702	53,01	1.509	46,99	3.211
Keterangan:						
* : Data Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri (2018)						
** : Data BPS Kabupaten Rokan Hilir (2018)						
*** : Data BPS Kabupaten Rokan Hilir (2017)						

Sumber: diolah dari BPS Kabupaten Rokan Hilir, 2017; BPS Kabupaten Rokan Hilir, 2018; Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, 2018.

Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kepenghuluan Tanjung Leban tahun 2018 berdasarkan data Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri (2018) adalah sebanyak 722 KK, tetapi tidak menjelaskan berapa jumlah KK perempuan dan laki-laki. Demikian pula dengan Jumlah KK pada data yang bersumber dari BPS Kabupaten Rokan Hilir (2018) dan Kepenghuluan Tanjung Leban (2019) yang menyebutkan terdapat 925 KK tanpa perincian mengenai jumlah KK yang laki-laki maupun perempuan.

Tidak didapatkan data mengenai jumlah penduduk berdasarkan usia di Kepenghuluan Tanjung Leban. Data jumlah penduduk berdasarkan usia di Kepenghuluan yang tersedia adalah data dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri (2018). Dalam data tersebut jumlah dan prosentase penduduk berdasarkan usia di kepenghuluan Tanjung Leban yang berusia antara 15 tahun hingga 64 tahun berjumlah 1.849 jiwa dengan persentase sebesar 66,15% dari seluruh penduduk di Kepenghuluan yang merupakan jumlah terbesar dari seluruh penduduk Tanjung Leban. Besarnya jumlah penduduk pada rentang usia tersebut mengindikasikan bahwa penduduk Kepenghuluan Tanjung Leban yang berada dalam usia produktif antara 16 hingga 65 tahun cukup besar. Penyediaan kesempatan kerja adalah tantangan yang harus dilakukan menghadapi satu dekade ke depan bagi Kepenghuluan Tanjung Leban. Penduduk Kepenghuluan Tanjung Leban berusia 5 hingga 14 tahun yang berjumlah 675 jiwa atau sebesar 24,15% jumlah penduduk saat ini, sekitar satu dekade ke depan akan menggantikan penduduk yang kini berada pada usia kerja produktif 55-64 yang jumlahnya hanya sebesar 135 jiwa atau 4,83% dari jumlah penduduk di tahun 2018. Dengan kata lain akan terjadi penambahan usia kerja produktif sebesar 540 jiwa pada satu dekade ke depan dari jumlah yang sekarang. Lebih lengkap mengenai penduduk berdasarkan usia di Kepenghuluan Tanjung Leban dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 11 Penduduk Berdasarkan Usia Tahun 2018

No	Penduduk Berdasarkan Usia	Jumlah (Jiwa)	Prosentase (%)
1	Usia 0-4 thn	199	7,12
2	Usia 5-9 thn	330	11,81
3	Usia 10-14 thn	345	12,34
4	Usia 15-19 thn	307	10,98
5	Usia 20-24 thn	205	7,33
6	Usia 25-29 thn	210	7,51
7	Usia 30-34 thn	225	8,05
8	Usia 35-39 thn	272	9,73
9	Usia 40-44 thn	208	7,44
10	Usia 45-49 thn	154	5,51
11	Usia 50-54 thn	133	4,76
12	Usia 55-59 thn	75	2,68
13	Usia 60-64 thn	60	2,15
14	Usia 65-69 thn	39	1,40
15	Usia 70-74 thn	18	0,64
16	Usia 75 thn ke atas	15	0,54
Total		2.795	100,00

Sumber: Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, 2018.

Penduduk Kepenghuluan Tanjung Leban dari 671 jiwa yang masuk dalam kategori Tidak/Belum Sekolah, sebanyak 413 jiwa merupakan penduduk yang berusia antara 0 hingga 5 tahun. Warga di Kepenghuluan Tanjung Leban yang telah mengenyam pendidikan dasar 6 tahun sebesar 51,70% dari jumlah seluruh penduduk. Hal ini memperlihatkan perhatian yang cukup baik terhadap program pendidikan dasar enam tahun yang dicanangkan oleh Pemerintah. Tingkat Pendidikan di Kepenghuluan Tanjung Leban pun terlihat cukup beragam dimana telah terdapat 1,14% penduduk Kepenghuluan ini yang mengenyam pendidikan tinggi dengan tingkatan mulai dari D1 hingga S1. Angka tersebut masih sangat kecil tetapi sudah memperlihatkan upaya dari warga Kepenghuluan ini untuk meningkatkan taraf pendidikan yang dijalaninya. Berikut tingkat pendidikan di Kepenghuluan Tanjung Leban pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel ini:

Tabel 12 Tingkat Pendidikan Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1.	Tidak/Belum sekolah	671	24,01
2.	Belum tamat SD	679	24,29
3.	Tamat SD	775	27,73
4.	SLTP	374	13,38
5.	SLTA	264	9,45
6.	D1 dan D2	5	0,18
7.	D3	13	0,47
8.	S1	14	0,50
Total		2.795	100,00

Sumber: Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, 2018.

4.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) merupakan tingkat pertambahan per tahun dalam jangka waktu tertentu yang angkanya dinyatakan sebagai persentase dari penduduk tahun dasar atau akhir. Kegunaan laju pertumbuhan penduduk adalah mengetahui perubahan antar dua periode tertentu. Untuk mengetahui LPP dapat digunakan metode geometrik seperti yang biasa digunakan BPS dengan rumus sebagai berikut:

$$r = \left(\frac{P_t}{P_0} \right)^{1/t} - 1$$

Metode geometri

r : Laju pertumbuhan penduduk

P_t : Jumlah penduduk tahun t

P₀ : Jumlah penduduk tahun awal

t : periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)

Karena tidak adanya data jumlah penduduk setiap tahun yang cukup sah di Kepenghuluan Tanjung Leban, maka dari penelusuran data BPS Kabupaten Rokan Hilir didapatkan data penduduk Kepenghuluan Tanjung Leban yang cukup dapat mewakili gambaran jumlah penduduk di Kepenghuluan Tanjung Leban. Dari penelusuran data BPS Kabupaten Rokan Hilir terdapat perubahan jumlah penduduk dengan rentang waktu setiap tiga tahun di Kepenghuluan Tanjung Leban, sedangkan jumlah penduduk di dalam rentang waktu tiga tahun, semisal antara tahun 2010 hingga tahun 2013 yaitu pada tahun 2011 atau 2012, tidak ditemukan adanya pengurangan atau penambahan jumlah penduduk dari tahun awal rentang waktu. Kondisi demikian berarti tidak ada pembaharuan data jumlah penduduk dalam beberapa tahun dalam data yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Rokan Hilir. Karenanya untuk menghitung LPP di Kepenghuluan Tanjung Leban digunakan data penduduk dengan rentang waktu tiga tahun sejak tahun 2010 hingga tahun 2016.

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode geometrik, didapatkan LPP di Kepenghuluan Tanjung Leban selama enam tahun antara tahun 2010 hingga tahun 2016 adalah sebesar 16%. Untuk LPP per tiga tahun di Kepenghuluan Tanjung Leban yang terbesar adalah dari tahun 2010 hingga tahun 2013 yaitu sebesar 31%. Mengenai hasil perhitungan LPP di Kepenghuluan Tanjung Leban dalam rentang waktu 2010 hingga 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13 Laju Pertumbuhan Penduduk

Tahun	Jumlah (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk	
2016*	3.211	LPP Tahun 2013 – 2016	3%
2013**	2.900	LPP Tahun 2010 – 2013	31%
2010***	1.298	LPP Tahun 2010 – 2016	16%
Keterangan			
* : Data BPS Kabupaten Rokan Hilir (2017) (2018)			
** : Data BPS Kabupaten Rokan Hilir (2014) (2015)			
*** : Data BPS Kabupaten Rokan Hilir (2012) (2014)			

Sumber: diolah dari BPS Kabupaten Rokan Hilir (2012) (2014) (2015) (2017) & (2018).

4.3 Tingkat Kepadatan Penduduk

Angka kepadatan penduduk digunakan untuk mengetahui konsentrasi penduduk di suatu wilayah. Pada umumnya, hal ini disajikan dengan menggunakan penghitungan kepadatan penduduk kasar (*crude population density*) yang memperlihatkan banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepadatan Penduduk} = \frac{\text{Jumlah penduduk (Jiwa)}}{\text{Luas Daerah (Km)}} \quad \text{Km}^2$$

Dengan menggunakan perhitungan rumus tersebut, maka Kepenghuluan Tanjung Leban memiliki kecenderungan perubahan kepadatan jumlah penduduk yang meningkat pada rentang waktu tahun 2010 hingga tahun 2016, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 14 Angka Kepadatan Penduduk Kepenghuluan Tanjung Leban

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah Kepenghuluan (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
2016*	3.211	214,346	15
2013**	2.900	214,346	14
2010***	1.298	214,346	6
Keterangan : Luas Wilayah Kepenghuluan yang digunakan adalah luas wilayah indikatif hasil pemetaan partisipatif dalam penyusunan laporan DPG 2019. * Data dari BPS Kabupaten Rokan Hilir (2017) & (2018) ** Data dari BPS Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Rokan Hilir (2014) & (2015) *** Data BPS Kabupaten Rokan Hilir (2012) & (2014)			

Sumber: diolah dari BPS Kabupaten Rokan Hilir (2012) (2014) (2015) (2017) (2018) & Pemetaan partisipatif penyusunan laporan DPG 2019.

Tingkat kepadatan penduduk desa merupakan perbandingan antara angka kepadatan desa dengan angka kepadatan kecamatan. Suatu desa memiliki *Kepadatan Tinggi* jika angka kepadatan suatu desa lebih besar dari angka kepadatan wilayah kecamatan, untuk *Kepadatan Sedang* jika angka kepadatan suatu desa sama besar dengan angka kepadatan wilayah kecamatan, dan *Kepadatan Rendah* jika angka kepadatan suatu desa lebih kecil dari angka kepadatan wilayah kecamatan.

Tabel 15 Tingkat Kepadatan Penduduk

Tahun	Kepadatan Penduduk Kepenghuluan Tanjung Leban (Jiwa/Km)	Kepadatan Penduduk Kecamatan Kubu (Jiwa/Km)	Tingkat Kepadatan Penduduk Kepenghuluan Tanjung Leban
2016*	15	75	Kepadatan rendah
2013**	14	67	Kepadatan rendah
2010***	6	55	Kepadatan rendah
Keterangan: Luas Wilayah Kepenghuluan yang digunakan adalah luas wilayah indikatif hasil pemetaan partisipatif dalam penyusunan laporan DPG 2019. Untuk luas wilayah dan jumlah penduduk kecamatan didasarkan pada data BPS Kabupaten Rokan Hilir (2012) (2014) (2015) (2016) (2018) * Data dari BPS Kabupaten Rokan Hilir (2017) & (2018) ** Data dari BPS Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Rokan Hilir (2014) & (2015) *** Data BPS Kabupaten Rokan Hilir (2012) & (2014)			

Sumber: diolah dari BPS Kabupaten Rokan Hilir (2012) (2014) (2015) (2017) (2018) & Pemetaan partisipatif penyusunan laporan DPG 2019.



Bab V

Pendidikan dan Kesehatan

5.1 Jumlah Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kesehatan

UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor dan instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Kepenghuluan Tanjung Leban memiliki Tenaga Pendidik yang merupakan tenaga pengajar atau guru yang menyelenggarakan proses belajar mengajar pada lembaga pendidikan formal mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/sederajat, serta pada lembaga pendidikan non formal seperti Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) dan Madrasah Diniyah Takwiliyah Awaliyah (MDTA). Keseluruhan Tenaga Pendidik di Kepenghuluan Tanjung Leban jumlahnya adalah 43 orang tenaga pendidik. Tenaga pengajar terbanyak pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 009 Tanjung Leban yang berjumlah 11 orang dan yang paling sedikit terdapat di Tingkat PAUD dan TK serta pada MDA yang sebanyak dua (2) orang tenaga pendidik. Untuk tenaga pengajar di SD Kampung Baru Dusun Cipta Jaya yang merupakan kelas jauh yang menginduk pada SDN 009 Tanjung Leban, jumlahnya sebanyak 4 orang tenaga pengajar. Mengenai jumlah Tenaga Pendidik di Kepenghuluan Tanjung Leban berdasarkan jenjang pendidikan secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 16 Jumlah Tenaga Pendidik

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Tenaga Pengajar
1.	MDTA Darul Ulum Kubu	4 orang
2.	MDA Miftahul Jannah	2 orang
3.	PAUD Akbar	2 orang
4.	TK Jusmanidar	2 orang
5.	SDN 009 Tanjung Leban	11 orang
6.	SDN 015 Tanjung Leban	10 orang
7.	SD Kampung Baru Dusun Cipta Jaya	4 orang
8.	SMPS Hariri Rantau Benuang	7 orang
Total		42 orang

Sumber: Wawancara dengan Pengurus/Tenaga Pengajar Sekolah di Kepenghuluan Tanjung Leban, 2019.

Tenaga Pendidikan di Kepenghuluan Tanjung Leban pada umumnya memiliki pengetahuan tentang Karhutla berbasis pada pengetahuan yang mereka alami karena seringnya terjadi kebakaran lahan di wilayah Kepenghuluan ini. Meskipun demikian pelatihan yang lebih sistematis kepada para tenaga pengajar di Kepenghuluan Tanjung Leban mengenai Karhutla serta penanganan Karhutla untuk upaya transfer pengetahuan kepada peserta didik belum pernah didapatkan para tenaga pengajar tersebut. Dengan demikian materi mengenai karhutla dan penanganan korban karhutla tidak pernah menjadi sisipan pengajaran dalam materi pelajaran sekolah di Kepenghuluan Tanjung Leban. Mengenai gambut dan upaya restorasi gambut juga para tenaga pengajar di Kepenghuluan Tanjung Leban hanya memiliki pengetahuan berdasarkan kesehariannya yang hidup dan berinteraksi dengan lahan gambut di wilayah domisilinya dan belum pernah mendapatkan pelatihan terutama mengenai restorasi gambut untuk bahan ajar kepada peserta didik yang diampunya. Karenanya materi mengenai gambut dan restorasi gambut juga hampir tidak pernah menjadi salah satu sisipan materi dalam mata pelajaran yang diberikan kepada para siswa di sekolah.

UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Dalam UU Kesehatan tersebut, Tenaga Kesehatan antara lain tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga kesehatan tradisional, serta tenaga kesehatan lainnya. Pada Kepenghuluan Tanjung Leban terdapat Tenaga kesehatan yang menjalankan profesinya atau bertugas di Kepenghuluan tersebut, yaitu Bidan, Kader Posyandu dan Dukun Bayi. secara detail jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 17 Jumlah Tenaga Kesehatan

No	Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga kesehatan
1.	Bidan	2 orang
2.	Kader Posyandu	10 orang
3.	Dukun Bayi	2 orang
Total		14 orang

Sumber: Wawancara dengan Tenaga Kesehatan di Kepenghuluan Tanjung Leban, 2019.

Para bidan yang bertugas di Kepenghuluan Tanjung Leban pada umumnya telah memiliki kemampuan untuk menangani korban karhutla. Meskipun bagi bidan di Polindes keterampilan dalam menangani korban karhutla jarang dipraktikkan, sedangkan untuk bidan yang bertugas di Pustu Rantau Benuang menyatakan bahwa upaya penanganan korban karhutla selalu dilayani dengan pengetahuan dan ketrampilan yang dimilikinya. Bidan yang bertugas di Polindes menyatakan bahwa tidak tersedia peralatan dan perlengkapan medis sehingga penanganan medis untuk korban karhutla belum cukup memadai. Sedangkan di Pustu Rantau Benuang peralatan dan perlengkapan medis untuk menangani korban karhutla cukup memadai dari sisi kelengkapan meskipun secara kuantitas masih terbatas. Meskipun dari sisi kemampuan teknis tenaga kesehatan sudah cukup untuk melakukan penanganan pertama pada korban karhutla, tetapi dari sisi jumlah tenaga kesehatan dan keragaman keterampilan yang dibutuhkan untuk penanganan korban karhutla masih perlu ditingkatkan untukantisipasi jika terjadi peristiwa Karhutla di masa yang akan datang.

5.2 Kondisi Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan

Pada Kepenghuluan Tanjung Leban telah terdapat fasilitas pendidikan formal dan non formal. Fasilitas pendidikan formal yang terdapat di Kepenghuluan ini telah mencakup fasilitas untuk pendidikan usia dini hingga untuk Wajib Belajar 9 Tahun, dimana telah terdapat fasilitas pendidikan berupa satu sekolah SLTP/ sederajat. Terdapat dua fasilitas pendidikan Non Formal berupa MDTA dan MDA yang masing-masing telah berjalan dalam proses belajar mengajarnya. Untuk PAUD Akbar dan MDTA Darul Ulum saat ini masih menggunakan bangunan secara bergantian pada pagi dan siang hari. Pada umumnya masih banyak fasilitas pendidikan di Kepenghuluan Tanjung Leban yang kondisi fisik bangunannya masih memerlukan perbaikan dan peningkatan agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik pada fasilitas pendidikan yang telah ada. Tabel di bawah ini menerangkan lebih detail tentang fasilitas pendidikan yang ada, kondisi dan jumlah siswa pada masing-masing fasilitas pendidikan di Kepenghuluan Tanjung Leban, yaitu sebagai berikut:

Tabel 18 Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Kelas	Usia	Jumlah siswa	Total Siswa	Kondisi
1.	TK Jusmanidar				
	Kelas I = 7 siswa	5 tahun	2 siswa	7 Siswa	Kurang Layak
		6 tahun	5 Siswa		
2.	PAUD Akbar				
	Kelas I = 22 Siswa	5 tahun	3 Siswa	22 Siswa	Kurang Layak Bangunan Permanen Sebagian plafon atap rusak Tidak terdapat ruang pengajar WC tersedia Tidak ada aliran listrik Bangunan menumpang/bergantian dengan MDTA Darul Ulum Kubu
		6 tahun	19 Siswa		
3.	MDTA Darul Ulum Kubu				
	Kelas I = 19 Siswa Kelas II = 17 Siswa Kelas III = 10 Siswa Kelas IV = 4 Siswa	7 tahun	8 Siswa	40 Siswa	Kurang Layak Bangunan menumpang/bergantian dengan PAUD AKBAR
		8 tahun	14 Siswa		
		9 tahun	18 Siswa		
		10 tahun	9 Siswa		
		11 tahun	1 Siswa		
4.	MDA Miftahul Jannah				
	Kelas I = 18 Siswa Kelas II = 15 Siswa	10 tahun	18 Siswa	33 Siswa	Kurang Layak
		11 tahun	8 Siswa		
		12 tahun	7 Siswa		
5.	SDN 009 Tanjung Leban				
	Kelas I = 29 Siswa Kelas II = 28 Siswa Kelas III = 22 Siswa Kelas IV = 27 Siswa Kelas V = 25 Siswa Kelas VI = 32 Siswa	6 tahun	22 Siswa	163 Siswa	Layak Bangunan Permanen (Ruang Kelas & Kantor/Ruang Guru) Tersedia WC Halaman Beton
		7 tahun	26 Siswa		
		8 tahun	7 Siswa		
		9 tahun	10 Siswa		
		10 tahun	35 Siswa		
		11 tahun	16 Siswa		
		12 tahun	34 Siswa		
		13 tahun	9 Siswa		
		14 tahun	4 Siswa		
		15 tahun	1 Siswa		
6.	SDN 015 Tanjung Leban				
	Kelas I = 34 Siswa Kelas II = 56 Siswa Kelas III = 42 Siswa Kelas IV = 24 Siswa Kelas V = 51 Siswa Kelas VI = 46 Siswa	6 tahun	29 Siswa	253 Siswa	Kurang Layak
		7 tahun	57 Siswa		
		8 tahun	45 Siswa		
		9 tahun	28 Siswa		
		10 tahun	47 Siswa		
		11 tahun	57 Siswa		

7. SD Kampung Baru Dusun Cipta Jaya					
Kelas I = 7 Siswa Kelas II = 14 Siswa Kelas III = 10 Siswa Kelas IV = 4 Siswa Kelas V = 6 Siswa Kelas VI = 9 Siswa	6 tahun	4 Siswa	50 Siswa	Kurang Layak	
	7 tahun	12 Siswa			
	8 tahun	9 Siswa			
	9 tahun	9 Siswa			
	10 tahun	5 Siswa			
	11 tahun	3 Siswa			
	12 tahun	6 Siswa			
	13 tahun	1 Siswa			
8. SMPS Hariri Rantau Benuang					
Kelas VII = 22 Siswa Kelas VIII = 26 Siswa Kelas IX = 15 Siswa	12 tahun	13 Siswa	63 Siswa	Layak	
	13 tahun	9 Siswa			
	14 tahun	10 Siswa			
	15 tahun	23 Siswa			
	16 tahun	8 Siswa			

Gambar 7 Fasilitas Pendidikan di Kepenghuluan Tanjung Leban



MDTA Darul Ulum / PAUD Akbar Dusun Sempurna



Sekolah Dasar Lokal Jauh Dusun Cipta Jaya



SD Negeri 009 Tanjung Leban di Dusun karya

Sumber: Dokumentasi Pribadi.

Fasilitas Kesehatan yang terdapat di Kepenghuluan Tanjung Leban masih sangat terbatas yaitu Puskesmas Pembantu (Pustu), Poliklinik Desa (Polindes), dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Baik Pustu dan Polindes saat ini masing-masing hanya memiliki tenaga kesehatan berupa bidan dengan kondisi fisik fasilitas kesehatan yang juga perlu ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi warga Kepenghuluan Tanjung Leban.

Berkaitan dengan Karhutla yang sering terjadi di wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban dan sekitarnya, kesiapan dari masing-masing fasilitas kesehatan yang ada perlu ditingkatkan. Pada Polindes Bunga Matahari tidak tersedia masker dan obat-obatan untuk penanganan Korban karhutla. Sedangkan pada Pustu Bunga Selasih di Dusun Rantau Benuang untuk menangani korban karhutla memang telah tersedia beberapa peralatan dan obat-obatan, seperti masker, obat tetes mata, obat-obatan untuk ISPA, Salep Luka Bakar dan Tabung Oksigen. Meskipun demikian menurut Tenaga Kesehatan yang bertugas di Pustu, jumlah alat dan obat-obatan masih kurang dari mencukupi jika terjadi Karhutla terutama untuk Masker.

Tabel 19 Sarana dan Prasarana Kesehatan

No	Jenis fasilitas kesehatan	Nama fasilitas kesehatan	Tahun berdiri	Kondisi
1	Polindes	Bunga Matahari	-	Kurang Layak
2	Pustu (Dusun Rantau Benuang)	Bunga Selasih	2013	Layak Bangunan masih relatif belum lama dibangun Tersedia ruang perawatan terpisah WC tersedia
3	Posyandu	Bunga Matahari	-	Menumpang pada Polindes Bunga Matahari
4	Posyandu	Bunga Selasih	-	Menumpang pada Pustu Bunga Selasih

Sumber: Wawancara dengan Tenaga Kesehatan di Kepenghuluan Tanjung Leban, 2019.

Gambar 8 Fasilitas Kesehatan di Kepenghuluan Tanjung Leban



Pustu dan Posyandu Bunga Matahari di Dusun Karya

Sumber: Dokumentasi Pribadi.

5.3 Angka Partispasi Pendidikan

Angka Partispasi pendidikan di Kepenghuluan Tanjung Leban tidak dapat dilakukan penghitungan karena tidak tersedianya data mengenai jumlah penduduk dalam rentang usia 7 hingga 12 tahun, usia 13 hingga 15 tahun, serta usia 16 hingga 18 tahun. Selain itu tidak didapatkan data mengenai jumlah anak usia 13 hingga 15 tahun di Kepenghuluan tanjung Leban yang bersekolah SLTP dan jumlah anak berusia 16 hingga 18 tahun di Kepenghuluan ini yang bersekolah SLTA. Data yang tersedia hanya data jumlah anak berdasarkan usia yang bersekolah pada fasilitas pendidikan SD dan SLTP yang berada di wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban, sebagai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 20 Jumlah Anak Sekolah di fasilitas pendidikan Kepenghuluan Tanjung Leban

No	Keterangan	Jumlah
1.	Anak usia 7 s/d 12 tahun bersekolah SD	406 orang
2.	Anak usia 13 s/d 15 tahun bersekolah SLTP	42 orang

Sumber: Wawancara dengan Pengurus/Tenaga Pengajar Sekolah di KepenghuluanTanjung Leban, 2019.

5.4 Jumlah Korban Bencana Kebakaran dan Asap Tahun 2015

Pada saat terjadi Karhutla di tahun 2015 merupakan kejadian bencana yang luar biasa bagi warga, meskipun demikian tidak didapatkan data mengenai jumlah korban baik yang sakit maupun meninggal dari kelompok Rentan maupun Non-rentan di tahun ini. Menurut tenaga kesehatan yang bertugas di kepenghuluan ini, dirinya turut mengungsi dari wilayah kepenghuluan ini pada saat karhutla tahun 2015 karena sudah tidak lagi bisa bertahan dari kebakaran dan asap yang sangat tebal. Karhutla yang cukup besar kembali terjadi pada tahun 2018, dimana pada wilayah kepenghuluan Tanjung Leban terutama di Dusun Rantau Benuang terdapat setidaknya 10 orang sakit dari kelompok non-rentan yang sempat ditangani oleh Tenaga Kesehatan di Kepenghuluan ini.

Tabel 21 Korban Karhutla Tahun 2018

No	Korban	Sakit	Meninggal
1	Kelompok rentan	-	-
2	balita	-	-
3	Ibu hamil	-	-
4	Manula diatas 60 th	-	-
5	Bukan kelompok rentan	10 orang	-

Sumber: Wawancara dengan Tenaga Kesehatan Pustu Rantau Benuang 2019.

Dari 10 korban pada kelompok non-rentan tersebut, dua (2) orang menderita ISPA, dua (2) orang menderita Luka Bakar, dan sisanya sebanyak enam (6) orang mengalami gangguan kesehatan akibat karhutla. Rentang usia dari korban kelompok non-rentan ini antara 28 hingga 45 tahun yang berarti berada dalam usia produktif tenaga kerja, dengan jenis kelamin empat (4) orang perempuan dan enam (6) orang laki-laki.



Bab VI

Kesejarahan dan Kebudayaan Masyarakat

6.1 Sejarah Desa

Kepenghuluan Tanjung Leban merupakan wilayah pemukiman lama di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Nama Kepenghuluan Tanjung Leban diberikan karena di wilayah ini terdapat banyak pohon Leban. Wilayah Kecamatan Kubu di masa Lalu merupakan wilayah Kerajaan Kubu yang didirikan pada tahun 1084 H (1667 M), Tanjung Leban sudah dikenal sebagai satu wilayah tersendiri di dalam Kerajaan Kubu. Kerajaan Kubu pada saat itu didiami oleh empat suku, yaitu Suku Rawa, Suku Hamba Raja, Suku Haru dan Suku Bebas.

Menurut penuturan warga, Tanjung Leban dipimpin oleh Datuk Indra Bangsawan ketika Kerajaan Kubu sudah menjadi Negeri Kubu³ sebagai Provinsi dalam Kerajaan Siak dan berada dibawah pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Struktur pemerintahan Negeri Kubu saat itu dipimpin Kepala Negeri merangkap Hakim Polisi yang memimpin empat suku, dan masing-masing Kepala Suku merangkap sebagai Hakim Suku dan Kepala Suku membawahi Hinduk-hinduk⁴ pada suku masing-masing. Dalam Bab Al-Qawaid⁵ pada Bab Ketujuh Pasal 11 disebutkan nama Kepala-kepala Suku dalam Negeri Kubu yang salah satunya adalah, Indra Bungsu Sebagai Kepala Suku Bebas⁶.

³ Penyebutan wilayah Kubu secara administratif dalam sistem pemerintahan Kerajaan Siak. Dalam Bab Al-Qawaid yang merupakan Kitab Undang-undang Kerajaan Siak disebutkan Negeri Kubu dipimpin oleh Kepala Negeri yang juga merangkap sebagai Hakim Polisi yaitu Datuk Jaya Perkasa.

⁴ Hinduk merupakan wilayah setingkat desa atau kepenghuluan

⁵ Bab Al-Qawaid atau Babul Qawaid yang berarti pintu segala pegangan adalah kitab undang-undang Kesultanan Siak Indrapura setebal 90 halaman terdiri atas 22 bab 154 pasal, yang menguraikan hukum untuk orang Melayu dan bangsa lain yang berhubungan dengan orang Melayu, memaparkan kehidupan dan adat istiadat Kesultanan Siak, serta hukuman yang diberikan melalui proses pengadilan kesultanan ataupun pengadilan Hindia Belanda. Konstitusi tertulis Kesultanan Siak ini ditulis dalam bahasa Arab Melayu dan dicetak di Siak pada tahun 1901 pada masa pemerintahan Sultan Assyaiddis Syarif Hasim Abdul Jalil Syarifuddin (1889 – 1908) atau dikenal dengan nama Sultan Syarif Hasyim. (Junus, 2016)

⁶ Kepala suku yang lainnya adalah Jaya Perkasa sebagai Kepala Suku Rawa, Indra Setia adalah Kepala Suku Hamba Raja, Paduka Samaraja sebagai Kepala Suku Haru.

Pada Bab Ketujuh Pasal 12 ditentukan nama Hinduk-hinduk serta Suku-suku yang dibawahinya dimana Suku Bebas terdapat dua Hinduk yaitu Hinduk Bebas Setia Muda yang dipegang oleh Panglima Muda Setia Raja dan Hinduk Bugis Laki-laki yang belum ditentukan siapa pemegang jabatannya dalam kitab Bab Al-Qawa'id tersebut. Dalam manuskrip bertajuk "Hukum Adat Istiadat Negeri"⁷ di Negeri Kubu pada tahun 1893 dibentuk Dewan Datuk Empat Kerajaan Kubu, yang salah satu anggotanya adalah Datuk Indra Bangsawan dari Suku Bebas⁸. (Dollah, 2017)

Melihat apa yang tertulis dalam Hukum Adat Istiadat Negeri (1929), Bab Al-Qawaid (1901) dan kisah yang beredar di warga Tanjung Leban maka wilayah Tanjung Leban merupakan wilayah Suku Bebas yang dipimpin oleh Datuk Indra Bangsawan atau nama lainnya dalam kitab Bab Al-Qawaid yaitu Indra Bungsu. Hal ini juga berdasarkan kisah yang menjadi pengetahuan warga bahwa Tanjung Leban adalah hadiah Kerajaan Siak kepada Datuk Indra Bangsawan. Suku Bebas menurut cerita yang berkembang dalam masyarakat Tanjung Leban dan Kubu pada umumnya merupakan suku yang paling akhir hadir dalam wilayah Kubu yang datang menetap dan berbaur dengan masyarakat di wilayah ini sehingga kemudian menyerap kebudayaan Melayu dalam kehidupan kesehariannya. Dengan kehadiran Suku Bebas paling akhir maka jumlah Hinduk yang mengindikasikan penguasaan wilayah pun hanya sedikit.

Di tahun 1916, Negeri Kubu berubah menjadi *Onderdistrict* Kubu dipimpin oleh seorang *Onderdistricthoofd.*, di bawah *District* Bagan Siapi-api dikepalai seorang *Districthoofd.*⁹ Perubahan ini turut merubah struktur kepemimpinan wilayah dimana Kesatuan hukum terkecil adalah kampung-kampung yang dikepalai oleh Penghulu-penghulu. (Masyukri & Kutoyo, 1983) Dari perubahan, ini Kepala Suku di *Onderdistrict* Kubu kemudian hanya menjadi Penghulu untuk wilayah kampung dari masing-masing Suku. Menurut penuturan warga, Datuk Indra Bangsawan memimpin wilayah Tanjung Leban hingga datang masa pendudukan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, Datuk Indra Bangsawan menyerahkan kepemimpinan kepada Keponakannya, yaitu Datuk Khitam. Datuk Khitam kemudian memimpin wilayah ini hingga memasuki masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Karena terjadi lagi perubahan sistem pemerintahan, maka wilayah Tanjung Leban oleh Datuk Khitam diserahkan kepada Kepenghuluan Sungai Kubu yang dipimpin oleh Penghulu Atan Gejeh yang menjabat Penghulu Sungai Kubu hingga tahun 1965.

⁷ Manuskrip bertulis huruf Jawi yang disusun oleh Kepala Suku Hambaraja bernama Abdurrahman bergelar Datuk Indra Setia pada tahun 1929

⁸ oleh Datuk Jaya Perkasa dari Suku Rawa, Datuk Indra Setia dari Suku Hambaraja, Datuk Paduka Samaraja dari Suku Haru, dan Datuk Indra Bangsawan dari Suku Bebas

⁹ Akibat tekanan Pemerintah Hindia Belanda kepada Kesultanan Siak terjadi perubahan struktur Pemerintahan Kesultanan Siak yang tadinya terdiri dari 10 propinsi hanya menjadi empat (4) distrik. (Masyukri & Kutoyo, 1983)

Sejak tahun 1965 Kepenghuluan Sungai Kubu dipimpin oleh Penghulu Mukhtar yang kemudian dilanjutkan oleh Penghulu Ramli Syam. Pada masa Penghulu Ramli Syam, Kecamatan Kubu yang dipimpin oleh Camat Bahrum Syah memekarkan Tanjung Leban menjadi sebuah Kepenghuluan. Ketika Kepenghuluan Tanjung Leban terbentuk di sekitar Tahun 1980, yang menjabat Penghulu pertama adalah Bapak Mastur Atan.

6.2 Etnis, Bahasa, Agama

Etnis yang mendiami Kepenghuluan Tanjung Leban pada awalnya adalah etnis Melayu Riau, yaitu Melayu Kubu yang terutama berasal dari Suku Bebas seperti yang sudah dijelaskan pada bagian Sub Bab 6.1 mengenai Sejarah Desa. Baru kemudian terdapat berbagai suku yang datang dan bermukim di wilayah ini terutama ketika pada dekade awal tahun 1990-an dimana mulai banyak berdatangan orang untuk bermukim dan membuka lahan untuk budidaya pertanian di wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban. Suku-suku yang datang dan mulai menetap di wilayah ini umumnya adalah Jawa, Batak dan Mandailing. Untuk suku Jawa pada umumnya yang datang bermukim di wilayah ini awalnya adalah Suku Jawa yang telah lahir dan/atau menetap dari wilayah Pulau Sumatera lainnya terutama dari wilayah Sumatera Utara serta Aceh. Itulah sebabnya proses pembauran suku-suku di Kepenghuluan Tanjung Leban tidak terlalu bermasalah karena masing-masing suku sudah terbiasa dengan adat dan budaya melayu pada umumnya. Tidak terdapat data yang pasti mengenai jumlah etnis dan suku yang saat ini menjadi warga di Kepenghuluan Tanjung Leban.

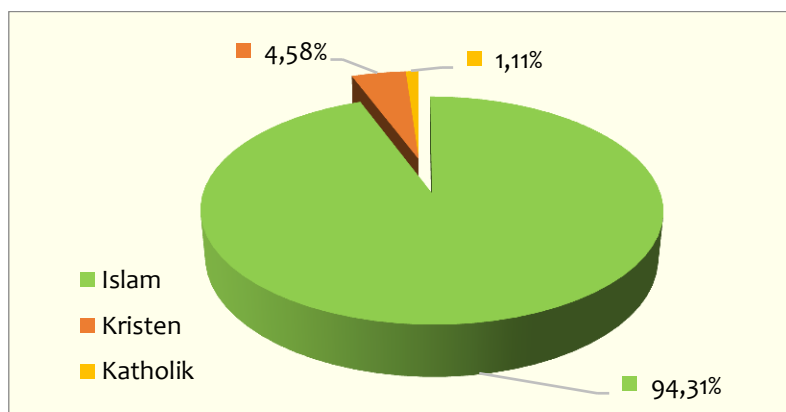
Adapun bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari adalah Bahasa Indonesia, bahasa Melayu dan bahasa Jawa. Kosakata dalam bahasa Jawa juga kerap digunakan ketika menuturkan bahasa Melayu, hal ini menandakan adanya penyerapan budaya Jawa ke dalam budaya Melayu setempat. Warga pun pada umumnya mengerti dan bisa berbicara dalam bahasa Melayu dan bahasa Jawa.

Mengenai Agama dan Kepercayaan yang dianut oleh warga Kepenghuluan Tanjung Leban masih cukup dominan penganut agama Islam. Keberadaan agama Islam di Kepenghuluan ini dapat dilihat dengan adanya sarana ibadah serta sarana pendidikan Islam. Kegiatan-kegiatan agama Islam pun terlihat cukup ramai dengan adanya berbagai kelompok pengajian di wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban. Terdapat pula warga yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan di Kepenghuluan Tanjung Leban hal ini juga terlihat dengan adanya sarana ibadah dari penganut kedua agama tersebut di Kepenghuluan Tanjung Leban terutama pada Dusun Rantau Benuang. Lebih detail mengenai jumlah warga dan agama yang dianutnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut ini:

Tabel 22 Penganut Agama & Kepercayaan

No	Agama dan Kepercayaan	Jumlah (jiwa)
1.	Islam	2.636
2.	Kristen	128
3.	Katholik	31
Total		2.795

Sumber: Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, 2018.

Gambar 9 Penganut Agama & Kepercayaan

Sumber: Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, 2018.

6.3 Legenda

Dalam masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban berkembang beberapa legenda atau cerita rakyat. Legenda yang pertama adalah tentang tokoh bernama Kayu Anjang atau dikenal dengan nama lainnya Datuk Indra Bangsawan yang mendapatkan Tanjung Leban sebagai hadiah dari Kerajaan Siak. Datuk Indra Bangsawan dikenal sebagai orang yang memiliki postur tubuh besar dan sangat kuat serta memiliki kesaktian dapat menyembuhkan orang yang sakit.

Legenda lainnya yang berkembang dalam masyarakat tentang Datuk Hutan dan Datuk Air yang merupakan penjaga wilayah ini. Datuk Sungai/Laut berwujud Buaya yang menjaga sungai dan laut, serta Datuk Hutan yang berwujud Harimau menjaga wilayah daratan hutan dan kampung. Menurut cerita Datuk Harimau akan muncul di wilayah perkampungan jika ada seseorang yang membuat kesalahan. Selain itu terdapat semacam tabu atau pantangan bagi warga untuk tidak pergi ke hutan pada hari Jumat karena jika melanggar akan bertemu Datuk (Harimau).

Legenda mengenai Harimau dan Buaya ini sebenarnya juga berkembang di kalangan masyarakat Melayu Kubu pada umumnya. Legenda ini bermula pada awal pembukaan lahan sebelum berdiri Kerajaan Kubu dimana Datuk Kancil, pengikut rombongan Tuanku Raja Hitam dari Suku Rawa yang tiba di wilayah ini dan mendirikan Kerajaan Kubu, mendapat tugas untuk memimpin ritual *Totaw Menotaw* atau di wilayah lain di Riau dikenal dengan *Menatau Tanah*, yaitu upacara ritual untuk mulai membuka tanah. Setelah ritual yang menggunakan seekor kambing dan daun juang-juang (*Cordyline Fruticosa* L. A. Cheval) ini terjadi beberapa keanehan. Sepanjang tepi sungai tumbuh kayu yang berbaris rapat seperti pagar dan daun juang-juang yang digunakan menjadi sebatang pohon besar. Di tempat ritual terlihat jejak dari dua ekor binatang berbeda, arah ke darat terlihat jejak harimau dan arah ke sungai terlihat jejak buaya. Ketika Datuk Kancil melihat jejak ini, beliau termenung dan berujar “Orang Kubu tidak pernah dikalahkan oleh manusia, kecuali oleh Harimau dan Buaya”. (Dollah, 2017) Dari kisah ini lah Harimau dianggap sebagai Datuk Hutan dan Buaya sebagai Datuk Sungai/Laut dalam masyarakat Melayu Kubu bermula.

6.4 Kesenian Tradisional

Kesenian tradisional yang asli lahir dari masyarakat kepenghuluan Tanjung Leban tidak dapat ditemukan. Meskipun demikian terdapat kesenian-kesenian tradisional yang berasal terutama dari budaya Suku Melayu yang mendapat pengaruh dari budaya arab dalam penyebaran agama Islam. Kesenian tradisional tersebut adalah nasyid rebana, marhaban, serta suluk (berzikir dari malam hingga subuh), biasanya kesenian ini dimainkan pada saat ada hajatan atau peringatan hari-hari besar keagamaan. Terdapat pula kesenian-kesenian yang ditampilkan pada rangkaian acara prosesi pernikahan adat Melayu yaitu tari piring yang biasanya dimainkan oleh anak-anak pada saat malam berinai, serta Silat Melayu yang dimainkan pada saat kedua mempelai di pelaminan dalam acara pernikahan. Selain kesenian yang berasal dari adat Melayu, ada juga kesenian tradisional Jawa yang sering dipertunjukkan ketika ada acara-acara yang diselenggarakan oleh suku Jawa di Kepenghuluan Tanjung Leban. Kesenian tradisional tersebut adalah kuda lumping atau kuda kepang.

6.5 Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Dalam masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban sebagai masyarakat yang bergantung kehidupannya kepada pertanian. Kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam hampir tidak dapat ditemukan. Hal ini karena introduksi jenis tanaman komoditas Kelapa Sawit yang menyebabkan warga lebih mengembangkan pengetahuannya berdasarkan pengalamannya dalam membudidayakan komoditas tersebut dengan menyesuaikan pada kondisi tanah dan alam yang ada di wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban. Dalam melakukan penanaman misalnya warga mengungkapkan bahwa ketika menanam bibit maka dibuat lubang yang lebih lebar dan dalam dan pada saat menanam tidak semua tanah ditimbun kembali dalam lubang. Selain itu, lubang disiram dolomit serta diberikan pupuk kandang yang telah dibakar terlebih dahulu.

Demikian juga hampir tidak ditemukan adanya ritual tertentu untuk melakukan pengolahan tanah yang kini dilakukan oleh masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban. Meskipun demikian masih terdapat kepercayaan terhadap tabu atau pantangan untuk warga pergi ke hutan atau kebun pada hari jumat. Hal demikian dipercaya masyarakat dapat menyebabkan orang yang melakukannya bertemu dengan Datuk (Harimau) yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dari orang tersebut. Kepercayaan ini sesungguhnya upaya untuk mengistirahatkan alam dari berbagai aktifitas masyarakat serta mengajak orang untuk lebih baik pergi melaksanakan ibadah di hari Jumat.



Bab VII

Pemerintahan dan Kepemimpinan

7.1 Pembentukan Pemerintahan

Sebagaimana tertulis dalam Hukum Adat Istiadat Negeri (1929), Bab Al-Qawaid (1901) dan kisah yang beredar di warga Tanjung Leban, maka wilayah Tanjung Leban merupakan wilayah Suku Bebas yang dipimpin oleh Kepala Suku sekaligus Hakim Suku yaitu Datuk Indra Bangsawan atau nama lainnya dalam kitab Bab Al-Qawaid yaitu Indra Bungsu. Berdasarkan cerita yang ada dalam masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban, Wilayah ini adalah hadiah Kerajaan Siak kepada Datuk Indra Bangsawan.

Di tahun 1916, akibat tekanan Pemerintah Hindia Belanda kepada Kesultanan Siak terjadi perubahan struktur Pemerintahan Kesultanan Siak yang tadinya terdiri dari 10 propinsi hanya menjadi empat (4) distrik. Pada saat itu Negeri Kubu berubah menjadi *Onderdistrict* Kubu, di bawah District Bagan Siapi-api. Perubahan ini turut merubah struktur kepemimpinan wilayah dimana setiap distrik dikepalai *Districthoofd* dan *Onderdistrict* dipimpin oleh *Onderdistricthoofd*. Kesatuan hukum terkecil adalah kampung-kampung yang dikepalai oleh Penghulu-penghulu. (Masyukri & Kutoyo, 1983) Dari perubahan, ini Kepala Suku di *Onderdistrict* Kubu kemudian hanya menjadi Penghulu untuk wilayah kampung dari masing-masing Suku.

Menurut penuturan warga, Datuk Indra Bangsawan memimpin wilayah ini hingga datang masa pendudukan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, Datuk Indra Bangsawan menyerahkan kepemimpinan kepada Keponakannya, yaitu Datuk Khitam. Datuk Khitam kemudian memimpin wilayah ini hingga memasuki masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Karena terjadi lagi perubahan sistem pemerintahan, maka wilayah Tanjung Leban oleh Datuk Khitam diserahkan kepada Kepenghuluan Sungai Kubu yang dipimpin oleh Penghulu Atan Gejeh yang menjabat Penghulu Sungai Kubu hingga tahun 1965. Sejak tahun 1965 Kepenghuluan Sungai Kubu dipimpin oleh Penghulu Mukhtar yang kemudian dilanjutkan oleh Penghulu Ramli Isyam.

Pada masa Penghulu Ramli Isyam, Kecamatan Kubu yang dipimpin oleh Camat Bahrum Syah memekarkan kembali Tanjung Leban menjadi sebuah Kepenghuluan yang terpisah dari Kepenghuluan Sungai Kubu. Pemekaran wilayah kepenghuluan ini terjadi karena Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Dalam masa persiapan pembentukan Kepenghuluan Tanjung Leban ini, Penghulu Sungai Kubu Ramli Isyam ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas Penghulu Tanjung Leban.

Ketika Kepenghuluan Tanjung Leban terbentuk di sekitar Tahun 1982, kemudian terpilih Bapak Mastur Atan sebagai Penghulu pertama Tanjung Leban. Bapak Mastur Atan memimpin Kepenghuluan cukup lama hingga awal dekade tahun 2000-an. Untuk melakukan pergantian kepemimpinan Penghulu di Tahun 2003 diselenggarakan pemilihan Penghulu di Tanjung Leban. Dari hasil pemilihan penghulu oleh masyarakat ini, terpilih Bapak Syafii Jaiz sebagai Penghulu Tanjung Leban selama dua periode kepemimpinan hingga habis masa jabatannya pada tahun 2017. Untuk mengisi kekosongan Penghulu selama proses pemilihan penghulu belum dilakukan maka ditunjuk Ibu Minarmi sebagai Pejabat Sementara (PJS) Penghulu Tanjung Leban dari tahun 2017 hingga tahun 2018. Kepemimpinan PJS ini dibatasi oleh Peraturan perundang-undangan hanya dalam waktu satu tahun, dan proses pemilihan penghulu yang dilakukan pada tahun 2018 belum berhasil memilih Penghulu terpilih yang akan memimpin pemerintahan Kepenghuluan ini. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Cq. Kecamatan Kubu menugaskan Bapak Hayatul Gamal sebagai PJS Penghulu Tanjung Leban sejak tahun 2018. Berikut merupakan informasi tentang sejarah pemerintahan Kepenghuluan yang berisi periode dan pemimpin wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban yang pernah dan sedang menjabat dibawa dalam tabel:

Tabel 23 Sejarah Pemerintahan Kepenghuluan

Tahun	Nama Pemimpin	Keterangan
.... - 1942	Datuk Indra Bangsawan	Kepala Suku dan hakim Suku Bebas serta Penghulu Tanjung Leban
1942 -*	Datuk Khitam	Penghulu Tanjung Leban
.... - 1965*	Atan Gejeh	Penghulu Sungai Kubu
1965 - 1975	Mukhtar	Penghulu Sungai Kubu
1975 - 1980	Ramli Isam	Penghulu Sungai Kubu merangkap PLT Penghulu Tanjung Leban (1 tahun)
1982 - 2004	Mastura Atan	Penghulu Tanjung Leban
2004 - 2017	Syafi'i Jaiz	Penghulu Tanjung Leban
2017 - 2018	Minarni, AM.Keb	Pejabat Sementara (PJS) Penghulu Tanjung Leban
2018 -**	Hayatul Gamal S.Pd	PJS Penghulu Tanjung Leban & Pelaksana Harian (PLH) Penghulu Tanjung Leban
Keterangan * : Tidak didapat secara pasti kapan tahun awal atau akhir kepemimpinan Penghulu ** : masih menjabat dan karena PLH masih belum bisa ditentukan sampai kapan berakhirnya masa jabatan		

Sumber : Profil Desa Tanjung Leban (2017), FGD II Penyusunan Laporan Profil DPG 2019, & Wawancara Warga Kepenghuluan Tanjung Leban.

7.2 Struktur Pemerintahan Desa 2018

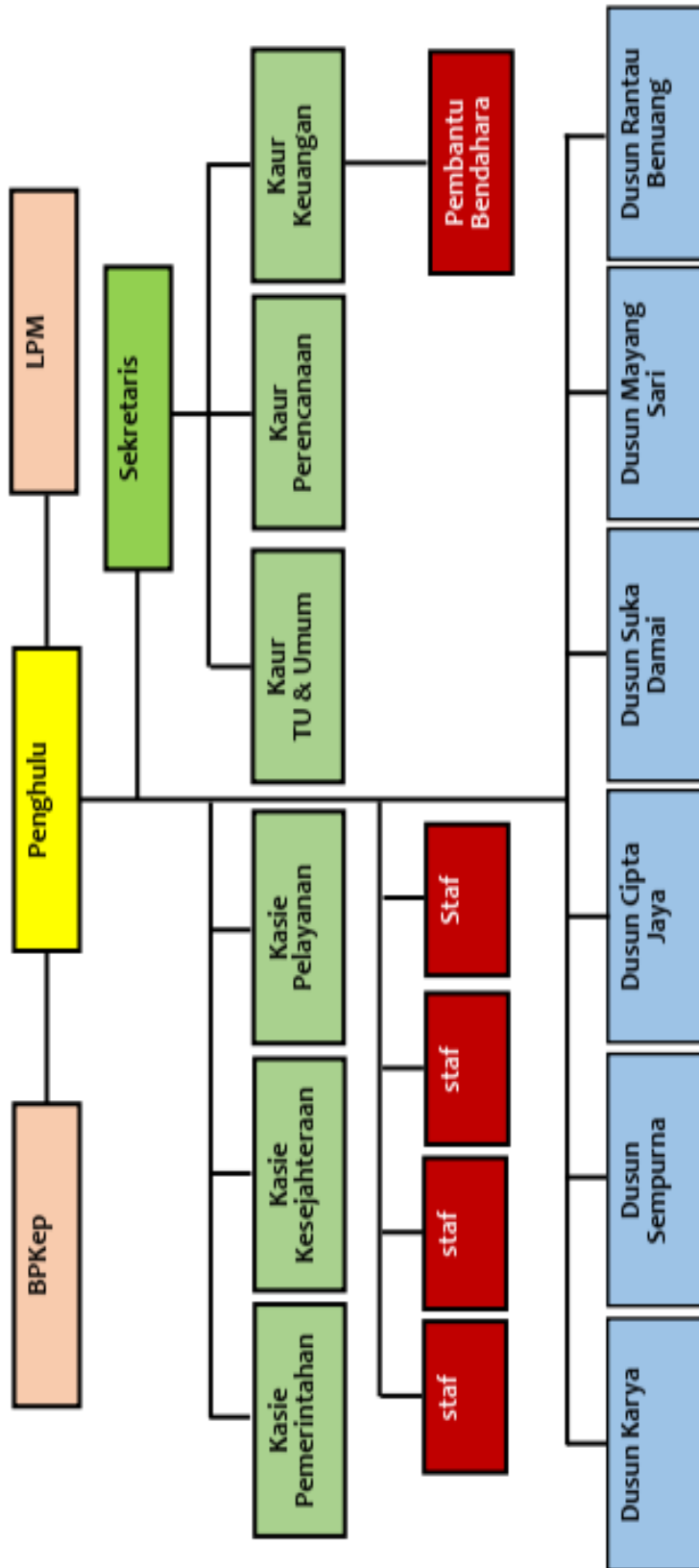
Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 2015 Kabupaten Rokan Hilir tentang Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Kepenghuluan dan Perubahan Status Kepenghuluan Menjadi Kelurahan menyatakan bahwa Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masih berdasarkan pada Perda No. 8 Tahun 2015 Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintahan Kepenghuluan merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Kepenghuluan adalah Penghulu dibantu Perangkat Kepenghuluan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kepenghuluan. Penghulu adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kepenghuluan yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Penghulu. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kepenghuluan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Adapun Perangkat Kepenghuluan adalah Aparatur Pemerintah Kepenghuluan yang membantu Penghulu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri atas Sekretariat Kepenghuluan, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis. Staf adalah perangkat Kepenghuluan yang bertugas membantu perangkat Kepenghuluan yang menduduki jabatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksana Kewilayahan atau disebut juga Dusun adalah bagian wilayah dalam Kepenghuluan yang merupakan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan.

Adapun struktur Pemerintahan Kepenghuluhan Tanjung Leban di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Gambar 10 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa



Sumber: Permendagri No. 84 Tahun 2015.

Tabel 24 Perangkat Kepenghuluan Tanjung Leban

No	Nama	Perkerjaan / Jabatan
1	Hayatul Gamal,S.Pd	Plh Penghulu
2	Wandri	Sekdes
3	Sri Wahyuni,S.Sos	Kasi Pemerintahan
4	Mayang Sari,S.Kom	Kasi Kesejahteraan
5	Kuswati	Kasi Keamanan
6	Dewika Istiqomah,Amd,Gz	Kasi Perencanaan
7	Adri	Kasi Pelayanan
8	Safrizal	Bendahara Desa
9	Purwanto	Pembantu Bendahara
10	Zainuddin	Teknisi
11	Guslan	Teknisi
12	Kasrni	Teknisi
13	Lilis	Teknisi

Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Rokan Hilir, 2018.

Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) para perangkat desa di Kepenghuluan Tanjung Leban telah diatur mengikuti Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Tupoksi perangkat Kepenghuluan Tanjung Leban adalah sebagai berikut:

Tabel 25 Tupoksi Perangkat Kepenghuluan Tanjung Leban

No	Tugas dan Fungsi
1	Penghulu/Kepala Desa
	<ul style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya
2	Sekretaris Kepenghuluan / Desa
	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
3	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
	Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
4	Kepala Urusan Keuangan
	Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
5	Kepala Urusan Perencanaan
	Mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
6	Kepala Seksi Pemerintahan
	Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
7	Kepala Seksi Kesejahteraan
	Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
8	Kepala Seksi Pelayanan

	Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
9	Kepala Kewilayahan / Kepala Dusun
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. ▪ Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. ▪ Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. ▪ Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sumber: Permendagri No. 84 Tahun 2015.

7.3 Kepemimpinan Tradisional

Tidak terdapat lagi kepemimpinan yang berakar pada adat dan tradisi pada masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban. Kepemimpinan yang ada saat ini terbentuk dari relasi-relasi religi, budaya, sosial, ekonomi dan politik yang sedang berlangsung dalam masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban. Saat ini kepemimpinan berpusat pada tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh dalam bidang religi, budaya, sosial, ekonomi dan politik di tengah masyarakat kepenghuluan. Tokoh-tokoh tersebut yang kini oleh masyarakat diberikan peran untuk menata kehidupan masyarakat pada bidang-bidang yang dikuasai oleh tokoh-tokoh tersebut melalui saran dan masukannya dalam kegiatan-kegiatan masyarakat di Kepenghuluan Tanjung Leban.

7.4 Aktor Berpengaruh

Untuk mendapatkan gambaran mengenai aktor berpengaruh di Kepenghuluan Tanjung Leban digunakan pendekatan ekonomi politik dengan menggunakan empat pertanyaan yang dirumuskan oleh Bernstein (2010) untuk melihat ekonomi politik masyarakat pedesaan. Empat pertanyaan tersebut adalah siapa menguasai apa; siapa melakukan apa; siapa mendapatkan apa; apa yang dilakukan dengan apa yang didupakannya. Jawaban empat pertanyaan tersebut menghasilkan aktor-aktor yang kemudian diidentifikasi sebagai aktor/tokoh dalam bidang apa dalam kehidupan masyarakat di kepenghuluan Tanjung Leban.

Aktor berpengaruh adalah seseorang yang memiliki pengaruh besar yang dapat mengajak orang banyak untuk terlibat dalam bidang-bidang tertentu di dalam masyarakat serta berperan besar pada bidang-bidang kehidupan masyarakat. peran orang-orang yang memiliki pengaruh cukup kuat di masyarakat tentu tidak terlepas dalam proses pengambilan kebijakan baik yang menyangkut kepentingan desa maupun urusan kemasyarakatan lainnya di bidang religi, politik, ekonomi sosial dan budaya.

Di Kepenghuluan Tanjung Leban, kehidupan keagamaan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat. Hal ini terlihat dengan adanya tokoh yang muncul dari masyarakat karena penguasaannya terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan disertai juga dengan keaktifan perannya dalam berbagai kegiatan sosial. Sehingga selain dianggap sebagai tokoh agama tokoh ini juga menjadi tokoh sosial dalam masyarakat kepenghuluan Tanjung Leban.

Tokoh lainnya yang juga dianggap penting adalah Tokoh yang mempunyai pengetahuan budaya yang bersandar pada religi dalam pengaturan waktu-waktu yang tepat untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Karena pengetahuan yang dimilikinya warga kerap meminta saran dan masukan untuk menyelesaikan masalah-masalah di tingkat keluarga. Karenanya tokoh ini oleh masyarakat dipandang sebagai tokoh budaya dan sosial.

Tokoh lainnya yang juga penting di dalam masyarakat Tanjung Leban adalah tokoh yang cukup menguasai perekonomian di desa terutama dalam hal pemasaran komoditas hasil pertanian warga. Tokoh ini dengan kemampuan finansialnya yang cukup baik kerap membantu berbagai kegiatan yang ada dalam masyarakat, mulai dari perbaikan fasilitas sosial dan fasilitas umum terutama untuk tempat ibadah, pendidikan keagamaan, dan perbaikan infrastruktur, serta mendukung keberlangsungan operasional pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat di Kepenghuluan Tanjung Leban. Keterlibatannya dalam berbagai kegiatan tersebut menyebabkan warga menjadikannya sebagai tempat untuk mengadu berbagai masalah yang ada dalam masyarakat serta mencari solusi bagi masalah-masalah yang ada di Kepenghuluan ini. Masyarakat melihat tokoh ini sebagai tokoh ekonomi sekaligus tokoh sosial dalam masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban.

Terdapat pula tokoh yang cukup lama memimpin secara formal dan non formal di Kepenghuluan Tanjung Leban, tokoh ini meskipun saat ini sudah tidak menduduki kepemimpinan formal pada lembaga pemerintahan di Kepenghuluan Tanjung Leban tetapi masih memiliki pengaruh yang cukup besar dalam masyarakat. Pengaruh ini tak lepas dari semasa kepemimpinannya pada lembaga formal pemerintahan kepenghuluan sehingga terdapat banyak warga yang menaruh kepercayaan pada apa yang dilakukan oleh tokoh ini. Kemampuan lainnya dari tokoh ini adalah kemampuannya membangun jaringan politik yang cukup baik di berbagai tingkat mulai dari Desa hingga Provinsi. Aktor ini oleh warga dipandang sebagai aktor politik.

Tabel 26 Analisa Aktor Di Kepenghuluan Tanjung Leban

Keterangan	Tokoh A	Tokoh B	Tokoh C	Tokoh D
Menguasai apa	Menguasai perhitungan hari baik	Mernguasai perekonomian	Menguasai sosial kemasyarakatan	Menguasai politik
Melakukan apa	Diminta untuk membantu menentukan waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di masyarakat	Selalu membantu masalah sosial baik itu berupa pembiayaan perbaikan jalan, pembiayaan MDTA, perbaikan fasilitas rumah ibadah dan lain-lain	Sebagai ketua organisasi sosial seperti perwiritan, serikat tolong menolong, dan aktif pada setiap kegiatan sosial di masyarakat	Sebagai mantan Penghulu yang kini aktif di partai politik
Mendapatkan apa	Disegani dan mendapatkan pengakuan tokoh masyarakat	Sebagai orang dermawan yang disegani dan mendapatkan pengakuan masyarakat serta menjadi pusat pengaduan terhadap berbagai kegiatan sosial di masyarakat	Dianggap sebagai tokoh karena memiliki kepribadian yang jujur dan dipercaya selalu dibutuhkan dan diminta pendapatnya	Disegani karena memiliki orang-orang yang loyal
melakukan apa dengan yang didapatnya	Terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial dan membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah keluarga di masyarakat	Terlibat berbagai kegiatan sosial seperti memperbaiki jalan dan membantu operasional MDTA dan fasilitas MDTA juga berbagai kegiatan keagamaan dan umum lainnya	Terlibat hampir dalam setiap kegiatan sosial dan agama	Terlibat dalam kegiatan politik baik tingkat desa, kabupaten dan provinsi
Klasifikasi aktor	Aktor budaya dan sosial	Aktor ekonomi dan sosial	Aktor sosial dan agama	Aktor politik

Sumber: Observasi dan Wawancara.

7.5 Mekanisme Penyelesaian Sengketa/Konflik Penguasaan Lahan

Jika dilihat dari permulaan penguasaan lahan di Kepenghuluan Tanjung Leban di masa lalu pada tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, berawal dari pembukaan lahan dalam kondisi masih berupa hutan. Pembukaan lahan dilakukan bersama-sama dipimpin *Kepala Pancang* sebagai pemimpin kelompok pembukaan lahan yang ditunjuk Penghulu dan membagi lahan dengan menetapkan batas pada lahan yang dikelola anggota kelompok *Pancang* tersebut. Tetapi *Kepala Pancang* sebagai orang yang mempunyai pengetahuan tentang batas-batas tanah anggota kelompok *Pancang*nya sangat jarang dilibatkan jika terjadi sengketa tanah antar warga.

Di Kepenghuluan Tanjung Leban jarang terjadi sengketa/konflik penguasaan lahan antar warga Kepenghuluan atau jika pun ada tidak membesar hingga berperkara di pengadilan. Bila ada sengketa mengenai batas tanah antar warga dilakukan musyawarah antara para pihak yang bersengketa. Jika kata sepakat tidak dapat diambil oleh para pihak dalam musyawarah, biasanya ketua RT, Ketua RW dan Kepala Dusun dilibatkan oleh para pihak yang bersengketa untuk menengahi perselisihan tersebut dalam musyawarah lanjutan.

Kepenghuluan dilibatkan musyawarah antar pihak bersengketa jika ternyata tidak ada titik temu musyawarah di tingkat RT/RW atau Dusun, biasanya musyawarah tingkat Kepenghuluan mampu mendamaikan sengketa klaim atas tanah antar para pihak.

7.6 Mekanisme/Forum Pengambilan Keputusan Desa

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) telah memberikan kerangka acuan bagi masyarakat di desa dapat terlibat aktif pada proses menyampaikan segala pendapat dan kepentingannya dalam bentuk yang lebih partisipatif. Dalam Pasal 54 UU Desa telah ditetapkan keberadaan lembaga Musyawarah Desa dan setiap keputusan yang diambil di tingkatan desa diawali dengan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa, dan Unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kualitas Musyawarah Desa di Kepenghuluan Tanjung Leban masih belum dirasakan sebagai bentuk partisipatif yang lebih substantif, dimana proses-proses perencanaan pembangunan masih berlangsung sekedar untuk menyelesaikan kewajiban penyusunan program pembangunan dan aspirasi yang ada dari berbagai elemen masyarakat di kepenghuluan ini belum sepenuhnya dapat terartikulasi dalam proses musyawarah yang telah berlangsung selama ini. Diharapkan di masa mendatang ada perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan musyawarah desa sehingga partisipasi masyarakat menjadi lebih bernilai substantif dalam pelaksanaan pembangunan Kepenghuluan.

Komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Kepenghuluan untuk saling bekerjasama membangun Kepenghuluan pada dasarnya menentukan sejauh mana pembangunan di tingkat Kepenghuluan berhasil dalam pelaksanaannya. Jaminan akan keberlangsungan pembangunan Kepenghuluan dimulai dari keberhasilan pembangunan yang dalam perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi dilakukan secara partisipatif. Ketika seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai maka permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul. Percepatan pembangunan skala Kepenghuluan menuju kemandirian Kepenghuluan akan terbantu dengan proses yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. diharapkan kegiatan pembangunan seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional dengan akurasi kegiatan yang dengan mudah dapat diakses masyarakat Kepenghuluan.



Bab VIII

Kelembagaan Sosial

8.1 Organisasi Sosial Formal

Pembentukan organisasi sosial formal serta pembentukan pengurus kelembagaannya pada umumnya dilakukan melalui proses Musyawarah. Pembentukan kelembagaan ada yang didasarkan pada kesepakatan kelompok atau memang sudah menjadi ketetapan Peraturan Perundang-undangan dengan Surat Keputusan pembentukan lembaga dan pengurus kelembagaan yang disahkan oleh instansi tertentu. Keberadaan Organisasi sosial formal yang memiliki peran dan manfaat terhadap masyarakat kepenghuluan Tanjung Leban diidentifikasi oleh warga Kepenghuluan Tanjung Leban berjumlah 19 Lembaga/Organisasi.

Sebagian besar organisasi sosial di Kepenghuluan Tanjung Leban berjalan cukup aktif dan rutin melaksanakan kegiatan-kegiatan. Dari hasil wawancara terdapat beberapa organisasi sosial formal yang oleh warga sering disebutkan, yaitu Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Masyarakat Peduli Api (MPA), serta POLMAS (Pemolisian Masyarakat). Lembaga organisasi sosial formal yang diidentifikasi berkontribusi dalam kehidupan masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban adalah sebagai berikut:

Tabel 27 Organisasi Sosial Formal di Kepenghuluan Tanjung Leban

No	Organisasi	Nama Ketua	Tujuan Pembentukan
	Kepenghuluan	Hayatul Gamal	Lembaga Pemerintahan Kepenghuluan
	Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep)	Edi Sucipto	Menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kepenghuluan
	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Husni Tamrin	Memberdayakan masyarakat Kepenghuluan
	Kepala Dusun	-	Membantu pelaksanaan pemerintahan kepenghuluan di tingkat dusun
	RT/RW	-	Membantu pelaksanaan pemerintahan kepenghuluan di tingkat RT/RW

Kelompok Tani	-	Mengembangkan kegiatan pertanian masyarakat
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	-	Pemberdayaan perempuan dan keluarga
Posyandu	-	Meningkatkan Kesehatan anak dan keluarga
Poskesdes	-	Memberikan pelayanan kesehatan di desa
Polmas (Pemolisian Masyarakat)	Eko	Kemitraan masyarakat dengan Polri untuk memberikan perlindungan keamanan dan ketertiban pada masyarakat desa
MPA (Masyarakat Peduli Api)	-	Memantau keadaan lahan dari kebakaran Memberikan informasi mengenai peristiwa karhutla kepada aparat terkait
Karang Taruna	-	Memberdayakan pemuda melalui kegiatan-kegiatan di dalam masyarakat
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Edward	Meningkatkan ekonomi desa melalui pengembangan usaha
DPRD Kabupaten Rokan Hilir	-	Menyalurkan aspirasi pembangunan dari masyarakat desa kepada pemerintahan di tingkat kabupaten
PAUD / TK	-	Menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada anak usia dini
TPA / MDA	-	Menyelenggarakan pelayanan pendidikan untuk anak belajar agama Islam khususnya membaca Al-Quran
SD	-	Menyelenggarakan pelayanan pendidikan tingkat dasar
SMP	-	Menyelenggarakan pelayanan pendidikan tingkat menengah
SMA	-	Menyelenggarakan pelayanan pendidikan tingkat atas

Sumber: FGD I Penyusunan Laporan Profil DPG 2019 Kepenghuluan Tanjung Leban & Wawancara Warga Kepenghuluan Tanjung Leban 2019.

8.2 Organisasi Sosial Nonformal

Organisasi Sosial Non-formal merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang terlibat dalam sebuah aktivitas yang memiliki tujuan tanpa terikat dengan kepengurusan secara legal. Dalam organisasi sosial non formal sarana membentuk dan memilih kepengurusan adalah melalui musyawarah yang dilanjutkan dengan melengkapi dengan berbagai syarat yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan tertentu yang diarahkan mencapai tujuan pembentukan organisasi.

Wirid Yasin merupakan organisasi sosial non formal yang cukup banyak diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat di Tanjung Leban, dimana hampir pada setiap Dusun atau RW memiliki kelembagaan kegiatan Wirid Yasin masing-masing. Wirid Yasin juga memiliki kelembagaan dan kegiatan yang terpisah antara perempuan dan laki-laki. Organisasi sosial non formal yang juga populer di kalangan masyarakat adalah Serikat Tolong Menolong (STM). STM biasanya bertujuan untuk meningkatkan kepedulian sosial di antara anggotanya serta memberikan pertolongan ketika terjadi musibah yang dialami oleh anggota STM.

Beberapa STM telah dibentuk oleh masyarakat secara swadaya di beberapa dusun pada Kepenghuluan Tanjung Leban. Selain dua organisasi sosial non formal di atas terdapat juga organisasi sosial non formal di Kepenghuluan Tanjung Leban yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 28 Organisasi Sosial Non Formal di Kepenghuluan Tanjung Leban

No.	Organisasi	Ketua	Tujuan Pembentukan
1.	Pengajian / Wirid	Sukirno (Dusun Karya) Yatimin (Dusun Mayangsari) Jumadi (Dusun Suka Damai) Sukardi (Dusun Rantau Benuang) Suliaman (Rantau Benuang) Ramlan (Dusun Sempurna) Murni Endang	Mengajar tentang agama Mendengarkan ceramah keagamaan
2.	STM (Serikat Tolong Menolong)	Sukardi (Dusun Rantau Benuang) Sari Alam Saragih (Dusun Suka Damai) Suriono (Rantau Benuang) Ramlan (Dusun Sempurna)	meningkatkan kepedulian sosial serta memberikan pertolongan ketika terjadi musibah kepada anggota
3.	APKASINDO (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia)	-	Memberdayakan petani kelapa sawit agar menjadi kekuatan ekonomi kerakyatan pedesaan yang sejahtera adil dan makmur.
4.	Pamsimas	-	Penyediaan air untuk masyarakat
5.	Koperasi	-	Membantu masyarakat untuk peminjaman modal usaha

Sumber: FGD I Penyusunan Laporan Profil DPG 2019 Kepenghuluan Tanjung Leban & Wawancara Warga Kepenghuluan Tanjung Leban 2019.

8.3 Jejaring Sosial Desa

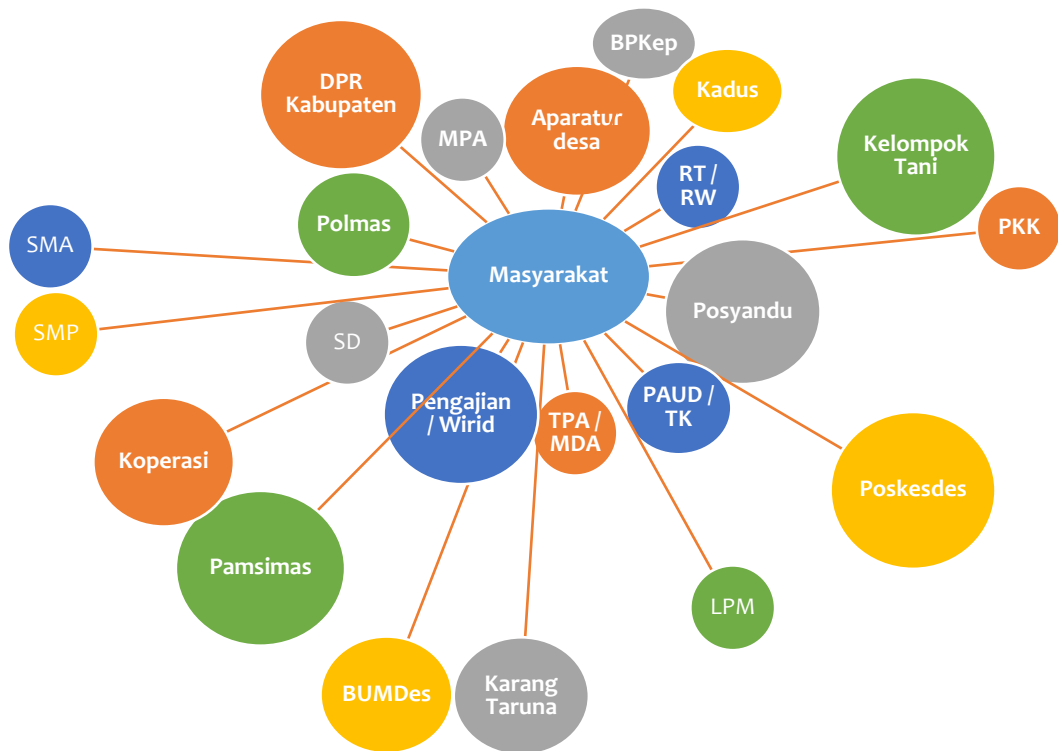
Jejaring sosial (*social network*) adalah berbagai kumpulan individu atau kelompok yang terikat oleh kepentingan dan atau tujuan yang sama. Jejaring sosial (*social network*) di pedesaan menjadi salah satu modal sosial (*social capital*) yang menjadi penopang keberadaan masyarakat pedesaan. Jejaring sosial desa bisa terbentuk atas dasar berbagai kepentingan, mulai dari ekonomi, politik, budaya, agama/kepercayaan maupun pemberdayaan masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dengan membentuk dan memanfaatkan jejaring sosial di pedesaan adalah untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat desa. Informasi mengenai hubungan antara institusi formal dan non formal dengan masyarakat di Kepenghuluan Tanjung Leban yang berlangsung saat ini termuat pada tabel dan diagram berikut:

Tabel 29 Analisis Hubungan Kelembagaan di Kepenghuluan Tanjung Leban

No	Organisasi	Peran dan manfaat	Kedekatan dengan masyarakat	
			Penilaian	Alasan
1	Aparatur desa	Lembaga untuk penyaluran kegiatan pemerintah ke desa	Sangat dekat	Kalau ada kegiatan masyarakat selalu dilibatkan
2	BPKep	Mendampingi dan menyelesaikan masalah didesa	Dekat	Setiap ada masalah BPKep tanggap menyelesaikan masalah di desa
3	Kepala Dusun	Mengkoordinir masyarakat RT/RW di lingkungannya	Dekat	Lebih sering jumpa dan membutuhkan masyarakat
4	RT/RW	Membantu dalam persoalan administrasi di lingkungannya	Sangat dekat	Orang pertama dijumpai ketika ada masalah
5	Kelompok Tani	Kelompok bersama dalam pertanian	Jauh	Masyarakat belum merasakan manfaatnya
6	PKK	Pemberdayaan untuk keluarga	Sangat jauh	Tidak pernah ada kegiatan
7	Posyandu	Kesehatan anak dan keluarga	Sangat dekat	Rutin dilaksanakan setiap bulan
8	Poskesdes	Pelayanan kesehatan desa	Sangat jauh	Tidak pernah ada, masyarakat langsung ke puskesmas
9	Paud / TK	Tempat pendidikan anak usia dini	Sangat dekat	Rutin dan fasilitas lengkap
10	LPM	Menampung aspirasi dalam hal pembangunan	Jauh	Tidak pernah ada didesa
11	TPA / MDA	Tempat mendidik anak untuk belajar baca quran	Sangat dekat	Aktif, rutin, fasilitas lengkap
12	Karang Taruna	Tempat organisasi untuk kegiatan pemuda	Sangat jauh	Tidak ada kegiatan pemuda
13	BUMDes	Membantu dalam ekonomi pedesaan	Sangat jauh	Tidak ada kegiatan
14	Pengajian / Wirid	Mengajar tentang agama mendengar ceramah	Sangat dekat	Aktif dimasyarakat
15	Pamsimas	Penyediaan air untuk masyarakat	Jauh	Baru mulai diaktifkan dalam proses
16	Koperasi	Membantu masyarakat untuk peminjaman modal usaha	Sangat jauh	Tutup pailit
17	SD	Pelayanan pendidikan tingkat dasar	Sangat dekat	Fasilitas ada
18	SMP	Pelayanan pendidikan tingkat menengah	Sangat jauh	Tidak ada fasilitas
19	SMA	Pelayanan pendidikan tingkat atas	Sangat jauh	Tidak ada fasilitas
20	Polmas	Ditunjuk untuk melindungi masyarakat desa	Dekat	Tempat pengaduan kriminal masyarakat kdrt pencurian dll
21	DPR Kab	Penyampai aspirasi masyarakat desa untuk tingkat kabupaten	Dekat	Berperan dan sering sosialisasi di desa
22	MPA	Memantau keadaan lahan dari kebakaran Memberi informasi kepada aparat terkait	Sangat dekat	Saling bekerjasama antara masyarakat dengan MPA untuk menjaga lahan dari kebakaran

Sumber: FGD I Penyusunan Laporan Profil DPG 2019 Kepenghuluan Tanjung Leban.

Gambar 11 Diagram Venn Analisis Kelembagaan



Sumber: FGD I Penyusunan Laporan Profil DPG 2019 Kepenghuluan Tanjung Leban.



Bab IX

Perekonomian Desa

9.1 Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan (APBKep) Tanjung Leban dalam penyusunannya telah berpedoman pada beberapa produk hukum berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati, serta Peraturan Kepenghuluan. Produk hukum yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBKep Tanjung Leban terutama bersumber pada UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) pada Bab VIII Keuangan Desa dan Aset Desa. Pada UUD Desa pasal 71 ayat (1) disebutkan bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Masih dalam UU Desa pasal 71, pada ayat (2) dinyatakan bahwa Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pendapatan Kepenghuluan Tanjung Leban tidak ada yang berasal dari Pendapatan Asli Kepenghuluan, seluruh pendapatan kepenghuluan Tanjung Leban untuk pendanaan APBKep bersumber dari Pendapatan Transfer. Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik dari Provinsi Riau maupun Kabupaten Rokan Hilir. Pendapatan Transfer yang diperoleh Kepenghuluan Tanjung Leban berbentuk Dana Kepenghuluan (DK, atau Dana Desa (DD)), Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK, atau Alokasi Dana Desa (ADD)), serta Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi. ADK pada tahun 2018 ini berasal dari ADK tahun 2018 sebesar Rp. 523.570.353,-, ADK Tahun 2017 Kurang Bayar (Terhutang) berjumlah Rp. 299.389.342,- serta senilai Rp. 23.287.937,- adalah ADK Tahun 2016 Kurang Bayar (Terhutang).

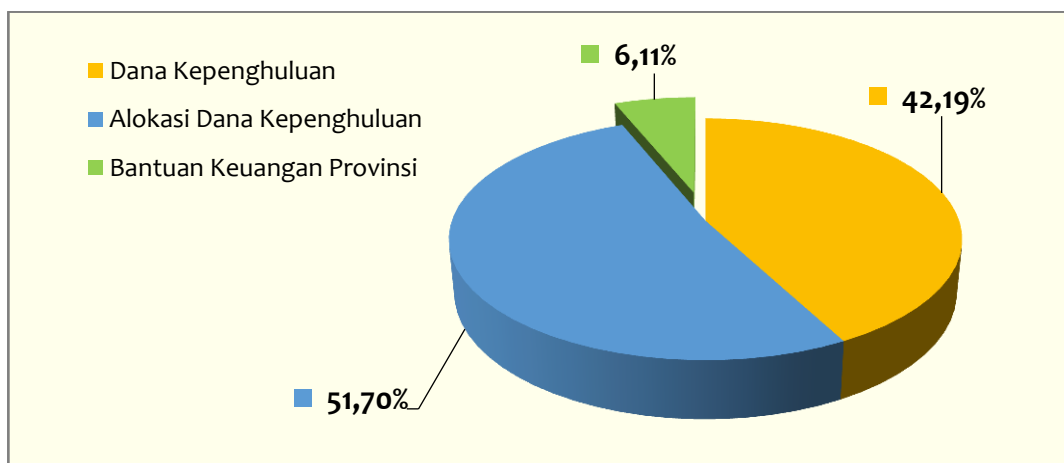
ADK merupakan pendapatan terbesar Kepenghuluan Tanjung Leban di Tahun 2018, sedangkan di tahun yang sama pendapatan terkecil berasal dari Banku Provinsi. Dapat dikatakan tidak adanya pendapatan asli Kepenghuluan memperlihatkan upaya penggalan potensi pendapatan asli kepenghuluan belum berjalan saat ini. Seluruh pendapatan yang diterima Kepenghuluan Tanjung Leban kemudian dirumuskan penggunaannya untuk menjalankan program pembangunan yang telah direncanakan pelaksanaannya pada tahun anggaran 2018. Masing-masing pendapatan beserta besaran yang diterima Kepenghuluan Tanjung Leban tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut:

Tabel 30 Sumber Pendapatan Kepenghuluan Tanjung Leban tahun 2018

No	Pendapatan	Jumlah (Rp.)
I.	Pendapatan Transfer	
1.	Dana Kepenghuluan (DK, atau Dana Desa (DD))	690.571.000,00
2.	Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK, atau Alokasi Dana Desa (ADD))	846.247.632,00
3.	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000,00
Total		1.636.818.632,00

Sumber: APBKep Perubahan Kepenghuluan Tanjung Leban 2018.

Gambar 12 Diagram Pendapatan Kepenghuluan Tanjung Leban



Sumber: APBKep Perubahan Kepenghuluan Tanjung Leban 2018.

Belanja Kepenghuluan Tanjung Leban terbagi dalam empat pos besar penganggaran yang terbagi dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan merupakan bidang yang memiliki kebutuhan anggaran terbesar dengan alokasi anggaran kegiatan paling besar untuk mata kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai sebesar 51,78% dari alokasi anggaran pada bidang ini.

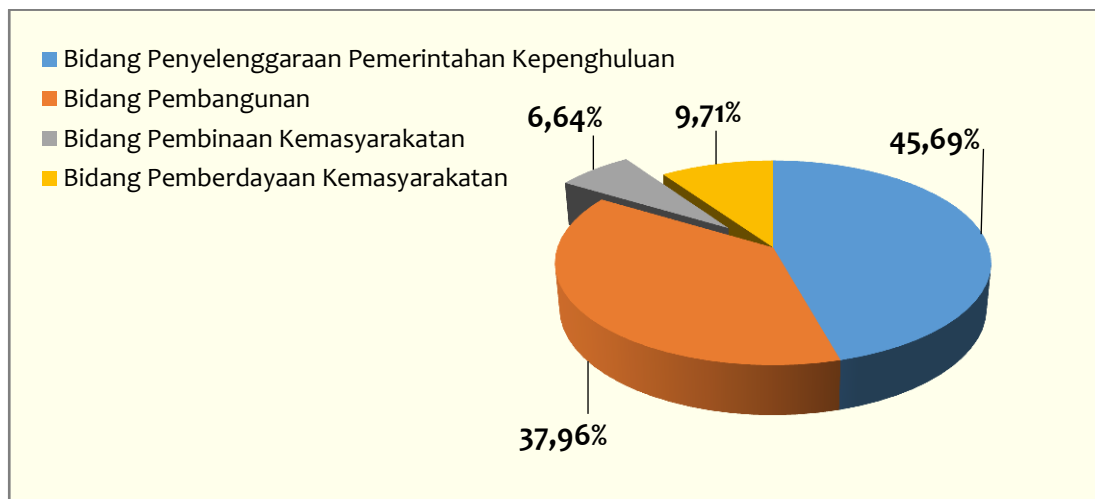
Anggaran yang dibutuhkan dalam kegiatan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan tersebut jumlahnya lebih dari dua kali lipat kebutuhan anggaran untuk Bidang pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Alokasi anggaran belanja ini mencerminkan besarnya pembiayaan kerja rutin pelayanan publik Kepenghuluan dan pembangunan fisik berupa infrastruktur fasilitas sosial serta umum, dan masih kecilnya prioritas pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan. Lebih detil mengenai besaran Belanja tiap Bidang dalam APBKep Tanjung Leban tahun 2018 dapat dilihat berikut Ini:

Tabel 31 Belanja Kepenghuluan Tanjung Leban 2018

No	Belanja	Jumlah (Rp.)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan	817.710.000,00
2.	Bidang Pembangunan	648.500.000,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	134.400.000,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	165.900.000,00
Total		1.766.510.000,00

Sumber: APBKep Perubahan Kepenghuluan Tanjung Leban 2018.

Gambar 13 Diagram Belanja Kepenghuluan Tanjung Leban tahun 2018



Sumber: APBKep Perubahan Kepenghuluan Tanjung Leban 2018.

Jika dilihat dalam APBKep Kepenghuluan Tanjung Leban, antara besarnya Pendapatan dan Belanja mengalami ketidakseimbangan jumlah sehingga mengalami defisit sebesar Rp. 71.691.368,-. Merujuk pada Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam melihat APBKep, kita akan menemukan dua istilah yang berbunyi sama tetapi berbeda makna, yaitu Selisih Perhitungan Anggaran (SiLPA, dengan huruf I kecil) Tahun Sebelumnya dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA, dengan huruf I besar) Tahun Berkenaan, yang kerap kali dua istilah ini digunakan kurang tepat. SiLPA (dengan huruf i kecil) adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran. Misalnya realisasi penerimaan daerah tahun anggaran 2017 adalah Rp 100 Miliar sedangkan realisasi pengeluaran daerah adalah Rp 90 Miliar, maka SiLPA-nya adalah Rp 10 Miliar.

Sedangkan SILPA (dengan huruf I besar/capital) adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja, angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.

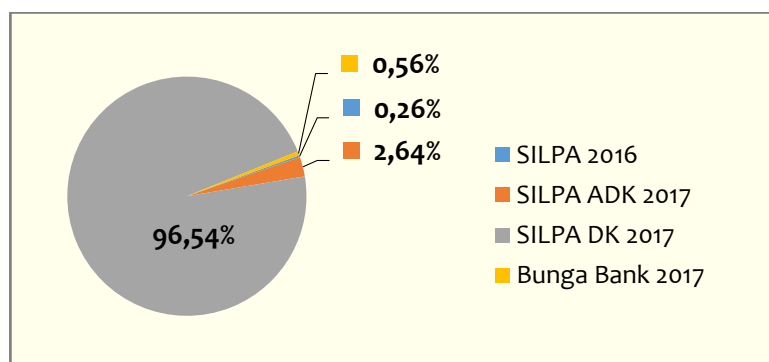
Karena Kepenghuluan Tanjung Leban dalam belanja mengalami defisit, maka perlu mengupayakan SILPA agar menjadi nol atau surplus, dengan mengusahakan sumber-sumber penerimaan pembiayaan lain seperti utang dan lainnya atau mengurangi belanja serta pembiayaan lain. Upaya ini dilakukan dengan menggunakan SiLPA tahun sebelumnya yang besarnya sama dengan jumlah kebutuhan biaya untuk menutup defisit dalam belanja. SiLPA tidak dapat dimasukkan dalam Pendapatan Desa tetapi dimasukkan dalam Penerimaan Pembiayaan. Kurang tepatnya penggunaan istilah ini acapkali terjadi dalam penyusunan anggaran, sebagaimana dalam APBKep Perubahan Kepenghuluan Tanjung Leban dimana SiLPA tertulis sebagai SILPA. Bertambahnya jumlah SiLPA dari tahun ke tahun mengindikasikan realisasi pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan pendapatan yang didapat sehingga terjadi surplus yang memperlihatkan kurang mampunya Kepenghuluan merencanakan penyerapan keuangan dalam pembangunan. Selain mengenai SiLPA, hal lainnya adalah kurang tepatnya bunga bank dimasukkan dalam penerimaan pembiayaan yang seharusnya merupakan pendapatan lainnya bagi Kepenghuluan dalam APBKep. Lebih jelasnya mengenai Penerimaan Pembiayaan APBKep Perubahan Kepenghuluan Tanjung Leban Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 32 Penerimaan Pembiayaan Kepenghuluan Tanjung Leban 2018

No	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah (Rp.)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	
a.	SILPA 2016	312.063
b.	SILPA ADK 2017	3.185.000
c.	SILPA DK 2017	116.373.400
2	Bunga Bank 2017	670.112
Total		120.540.575

Sumber: APBKep Perubahan Kepenghuluan Tanjung Leban 2018.

Gambar 14 Diagram Penerimaan Pembiayaan Kepenghuluan Tanjung Leban Tahun 2018



Sumber: APBKep Perubahan Tanjung Leban 2018.

9.2 Aset Desa

Aset Desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset desa berupa benda bergerak dan juga benda tidak bergerak yang dimiliki oleh desa dan inventaris desa. Adapun macam-macam aset desa dan inventaris desa pada Kepenghuluan Tanjung Leban dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 33 Aset Desa

No	Nama, Jenis, & Merk/Type Barang	Thn	Asal usul cara Perolehan	Jumlah Barang	Kondisi
	Aset Bergerak				
I.	Peralatan Dan Mesin				
A	Komputer, Printer, & Electronic Devices				
1	Laptop Toshiba	2015	ADD	1 Bh	
2	Notebook ASUS/ X200M KX638D	2015	Dana Prov	7 Bh	
3	Printer Brother/ MFC-J200	2015	ADD	1 Bh	
4	Printer Canon/ PIXMA MP287	2015	Dana Prov	3 Bh	Kurang Baik
5	Flashdisk SANDISK / Cruzer Switch 8 GB	2015	Dana Prov	7 Bh	
6	Camera Digital NIKON/ IXUS 145	2015	ADD	1 Bh	
B	Televisi				
1	Televisi LG	2015	ADD	1 Bh	Hilang
2	Digital TV Tanaka/Sakura	2015	ADD	1 Bh	Baik
C	AC & Kipas Angin				
1	Kipas Angin Gantung MIYAKO/ KAW-1662 Wall	2015	Dana Prov	3 Bh	Kurang Baik
2	Kipas Angin Berdiri COSMOS/ 16 - SDA	2015	Dana Prov	3 Bh	
3	AC CHANGHONG/ CPC-05E 1/2 PK Portable	2015	Dana Prov	1 Bh	Baik
D	Sound System				
1	- Amplifier BMB/ DA - 1600	2015	Dana Prov	1 Bh	Baik
2	- Speaker Pasif BMB CS-450 V New	2015	Dana Prov	1 psg	Baik
3	- Mic Homic HM-306	2015	Dana Prov	2 psg	Baik
4	-Tiang Speaker	2015	Dana Prov	2 psg	Baik
5	- Kabel Speaker	2015	Dana Prov	1 bh	Baik
E	Lemari				
1	Lemari 2 Pintu VIP	2015	Dana Prov	2 Bh	Baik
2	Filling kabinet 3 Rak VIP	2015	Dana Prov	2 Bh	Baik
3	Lemari arsip 4 Rak Stell Land		Bantuan Pemda	2 Bh	Baik
4	Lemari arsip Kaca		Bantuan Pemda	2 Bh	Baik
F	Meja				
1	Meja Tulis RICHIWA/ Hitam-Biasa	2015	Dana Prov	6 Bh	Baik
2	Meja Tulis Caserini/ Hitam	2015	Dana Prov	1 Bh	Baik
3	Meja Tulis Richiwa/ Brown	2015	Dana Prov	2 Bh	Kurang Baik
4	Meja Tulis Modera Furniture		Bantuan Pemda	2 Bh	Baik

G	Kursi				
1	Kursi Plastik Napoly-209	2015	Dana Prov	112 Bh	Baik
2	Sofa Sudut 888	2015	Dana Prov	1 Bh	Kurang Baik
3	Kursi Manager BROTHER	2015	Dana Prov	6 Bh	Kurang Baik
4	Kursi Direktur Chairman	2015	Dana Prov	2 bh	Baik
5	Kursi Manager		Bantuan Pemda	2 Bh	Rusak
6	Kursi Sudut FUTURE/Warna Brown Gelap	-	Bantuan Pemda	1 Bh	Kurang Baik
H	Alat Rumah Tangga				
1	Dispenser	2015	Dana Prov	1 Bh	Baik
2	Kompas Gas Hock/KGP11EV		ADD	1 Bh	Baik
3	Gorden Jendela Coklat Kombinasi Kuning	-		1 Set	
I	Mesin				
1	Pompa air Sanyo P-WHI37C	2015	Dana Prov	1 Bh	
2	Mesin Potong Rumput TG 328	2016	ADD	1 Bh	
3	Alat Semprot/sprayer Putri Solo/ 425	2016	ADD	2 Bh	
J	Kendaraan Bermotor				
1	Sepeda Motor Shogun Axelo		Bantuan Pemda	1 Bh	

Sumber: Dokumen Inventaris Kepenghuluan Tanjung Leban.

9.3 Tingkat Pendapatan Warga

Berbagai macam mata pencaharian mengisi kegiatan keseharian dalam kehidupan masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban. Berdasarkan mata pencaharian warga Kepenghuluan Tanjung Leban dapat dilihat bahwa mata pencaharian yang dijalani berada di sektor formal dan sektor non formal. Terdapat pula warga yang belum/tidak bekerja yang di dalamnya termasuk 279 jiwa yang berstatus pelajar dan mahasiswa serta 258 jiwa yang masih berusia 0-5 tahun. Mengenai mata pencaharian dan jumlah penduduk yang terlibat masuk dalam mata pencaharian tertentu ada pada tabel berikut ini:

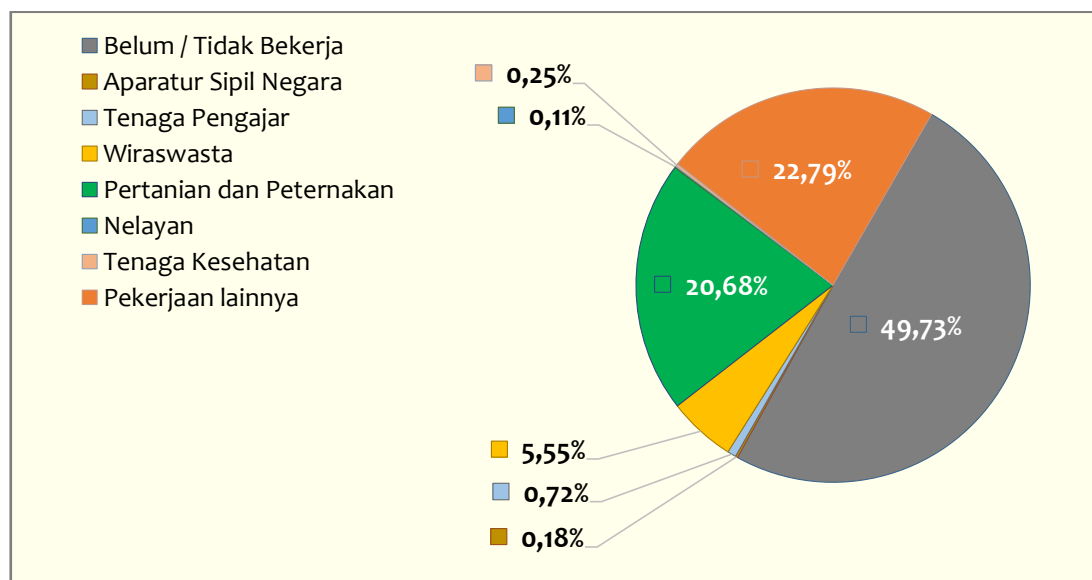
Tabel 34 Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)
1	Belum/Tidak Bekerja	1.390
2	Aparatur Sipil Negara	5
3	Tenaga Pengajar	20
4	Wiraswasta	155
5	Pertanian dan Peternakan	578
6	Nelayan	3
7	Tenaga Kesehatan	7
8	Pekerjaan lainnya	637
Total		2.795

Sumber: Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, 2018.

Mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan keseharian warga Kepenghuluan Tanjung Leban masih terlihat bergantung pada kegiatan pengolahan tanah dan kekeayaan alam yang terlihat dengan besarnya jumlah penduduk yang bermata pencaharian Pertanian dan Peternakan serta Nelayan. Serta sangat dimungkinkan bahwa warga yang berada dalam mata pencaharian pekerjaan lainnya serta merupakan warga yang terlibat dalam kegiatan pengolahan tanah dan kekayaan alam dengan menjual tenaganya sebagai buruh tani/kebun pada sektor pertanian. Hal ini bisa saja terjadi karena aktifitas budidaya tanaman komoditas Kelapa Sawit yang diusahakan intensif pada lahan pertanaiian di Kepenghuluan Tanjung Leban membutuhkan tenaga kerja dalam perawatan dan pemanenan yang dilakukan secara berkala.

Warga di Kepenghuluan Tanjung Leban juga tampak sudah ada yang terserap sebagai tenaga kerja dalam beberapa mata pencaharian di sektor formal yang membutuhkan ketrampilan dan keahlian khusus dengan menjadi Tenaga Pengajar dan Tenaga Kesehatan. Masih pada sektor formal, ditemukan pula adanya warga Kepenghuluan Tanjung Leban yang bekerja pada instansi/lembaga pemerintahan. Keseluruhan persentase warga Kepenghuluan Tanjung Leban yang terserap dalam sektor formal baru sebesar 1,14% dari keseluruhan jumlah penduduk. Jumlah ini masih kecil jika dibandingkan dengan penduduk yang terserap dalam berbagai mata pencaharian di sektor non formal, tetapi hal ini menunjukkan telah adanya warga dengan tingkat pendidikan formal yang cukup baik sehingga dapat memasuki mata pencaharian di sektor formal. Mata pencaharian yang juga dijalani oleh warga Kepenghuluan Tanjung Leban adalah Wiraswasta, yang menunjukan adanya kegiatan ekonomi perdagangan, usaha produksi dan jasa yang tumbuh di Kepenghuluan ini dan umumnya masih terhubung dengan sektor pertanian. Kegiatan perdagangan yang tumbuh adalah jual beli komoditas hasil pertanian serta perdagangan untuk pemenuhan konsumsi harian warga. Sedangkan usaha produksi yang menonjol adalah pembuatan batu bata dan budidaya sarang burung walet, serta pada sektor jasa ada beberapa bengkel yang melayani perawatan dan perbaikan alat transportasi warga di Kepenghuluan ini. Mengenai Persentase pada masing-masing mata pencaharian di Kepenghuluan Tanjung Leban terdapat pada gambar dibawah ini:

Gambar 15 Diagram Mata Pencaharian Masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban

Sumber: Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, 2018.

Dari mata pencaharian yang ada di Kepenghuluan Tanjung Leban dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian merupakan tumpuan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat di Kepenghuluan ini. Dalam hal ini sektor pertanian tidak hanya terbatas pada upaya produksi komoditas tetapi juga dengan adanya kegiatan perdagangan komoditas yang dilakukan warga di Kepenghuluan Tanjung Leban.

Wawancara terhadap sejumlah rumah tangga di Kepenghuluan Tanjung Leban memperlihatkan bahwa petani adalah mayoritas mata pencaharian pokok kepala rumah tangga dengan tanaman komoditas utama Kelapa Sawit. Di dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup dalam rumah tangga terdapat pula mata pencaharian yang dilakukan oleh anggota rumah tangga, yaitu kepala rumah tangga, istri dan anak. Anggota rumah tangga perempuan yang terlibat dalam mata pencaharian tambahan biasanya adalah istri. Demikian pula dengan anggota rumah tangga dewasa yang belum memisahkan diri dari rumah tangga turut membantu dengan mata pencaharian yang dilakukannya sehingga dimasukkan dalam mata pencaharian tambahan. Rata-rata pendapatan per bulan rumah tangga di Kepenghuluan Tanjung Leban menunjukkan adanya rentang pendapatan yang cukup jauh antar rumah tangga di kepenghuluan ini dimana rata-rata pendapatan rumah tangga berkisar dari Rp. 800.000,- hingga Rp. 46.000.000,-. Rentang pendapatan rata-rata rumah tangga yang cukup jauh ini memperlihatkan adanya kesenjangan (disparitas) pendapatan di antara rumah tangga yang cukup besar di Kepenghuluan ini. Kesenjangan ini timbul terutama karena adanya perbedaan besaran lahan yang diusahakan oleh masing-masing rumah tangga, mata pencaharian utama yang dijalani, serta mata pencaharian tambahan yang dilakukan oleh anggota rumah tangga dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup rumah tangga.

Tabel 35 Tingkat Pendapatan Warga Berdasarkan Rumah Tangga

No	Nama Kepala Keluarga	Mata Pencaharian Pokok	Mata Pencaharian Tambahan	Rata-rata Pendapatan (Rp.)
1.	Rumah Tangga A	Petani	Kedai Harian	2.202.000,-
2.	Rumah Tangga B	Petani	Kedai Soto	1.175.000,-
3.	Rumah Tangga C	Petani	Guru	2.000.000,-
4.	Rumah Tangga D	Petani	Depot	7.000.000,-
5.	Rumah Tangga E	Petani	-	3.000.000,-
6.	Rumah Tangga F	Petani	Kedai Harian	1.500.000,-
7.	Rumah Tangga G	Petani	Kedai Harian	2.600.000,-
8.	Rumah Tangga H	Petani	Buruh Sawit	3.000.000,-
9.	Rumah Tangga I	Wirausaha	Pengepul Sawit	7.000.000,-
10.	Rumah Tangga J	Petani	-	6.000.000,-
11.	Rumah Tangga K	Petani	Kedai Harian	3.500.000,-
12.	Rumah Tangga L	Petani	Peternak	1.200.000,-
13.	Rumah Tangga M	Petani		2.000.000,-
14.	Rumah Tangga O	Wirausaha	Depot, Batu Bata, Walet	46.000.000,-
15.	Rumah Tangga P	Petani	Buruh Tani	3.000.000,-
16.	Rumah Tangga Q	Petani	Kedai Harian	3.100.000,-
17.	Rumah Tangga R	Petani	-	3.000.000,-
18.	Rumah Tangga S	Petani	-	3.000.000,-
19.	Rumah Tangga T	Petani	Grosir Barang Harian	6.200.000,-
20.	Rumah Tangga U	Petani	Buruh	800.000,-
21.	Rumah Tangga V	Jual Es	Petani	2.300.000,-
22.	Rumah Tangga W	Petani	Agen Sawit	5.000.000,-
23.	Rumah Tangga X	Wirausaha	Petani	1.600.000,-
24.	Rumah Tangga Y	Buruh	Petani	1.700.000,-

Sumber: Wawancara terhadap 24 rumah tangga di Kepenghuluan Tanjung Leban 2019.

Diskusi Kelompok Terfokus dalam penyusunan Laporan Profil DPG tahun 2019 di Kepenghuluan Tanjung Leban menghasilkan Bagan Mata Pencaharian yang memperlihatkan adanya keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam mata pencaharian berserta kegiatan didalamnya yang berlangsung di Kepenghuluan ini. Pada sektor pertanian warga menyatakan adanya petani sawit dan petani nanas yang keduanya terdapat keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam kerja-kerjanya. Untuk Petani Sawit, terdapat beberapa kegiatan kerja yang umumnya dilakukan dalam budidaya Kelapa Sawit. Kegiatan-kegiatan ini pada umumnya lebih banyak dilakukan oleh laki-laki, meskipun pada kegiatan *memiring* (membersihkan dari rumput dan semak area di bawah pohon kelapa sawit dengan bentuk lingkaran) perempuan lebih banyak yang melakukannya karena dianggap lebih rapi dalam mengerjakan ini. Adapun dalam mata pencaharian sebagai petani Nanas baik laki-laki dan perempuan sama-sama terlibat pada aktifitas penanaman, perawatan, serta pemanenan. Dalam mata pencaharian di sektor non pertanian terdapat kegiatan usaha produksi, perdagangan, serta pekerja.

Untuk usaha produksi berupa usaha batu bata dan peternakan sapi pada umumnya laki-laki lebih banyak terlibat melakukan kegiatan-kegiatan dalam mata pencaharian tersebut. Sedangkan pada usaha produksi dan perdagangan berupa depot air baik laki-laki dan perempuan memiliki porsi yang seimbang dalam melakukan aktifitas didalamnya. Pada mata pencaharian sebagai pekerja di sektor formal di Kepenghuluhan ini lebih banyak dijalani oleh perempuan dari pada laki-laki. Sedangkan yang bermata pencaharian pekerja di sektor non formal sebagai buruh bangunan hanya dilakukan oleh Laki-laki. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis mata pencaharian, keterlibatan laki-laki maupun perempuan serta bahan baku, pemasaran dan masalahnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 36 Bagan Mata Pencaharian

Jenis Mata Pencaharian	Tenaga Kerja		Bahan Baku	Pemasaran	Masalah
	LK	PR			
Sektor Pertanian					
Petani Sawit	80%	20%	-	Sangat Mudah	Harga Jual Murah Harga sarana produksi pertanian mahal
Mendodos	95%	5%	Dodos, eggrek	-	-
Mengangkong	70%	30%	Angkong, ganco	-	-
Meracun	95%	5%	Sprayer	-	-
Memiring	40%	60%	Parang, cangkul	-	-
Menunas	95%	5%	Dodos, eggrek	-	-
Memupuk	50%	50%	Pupuk, ember, angkong	-	-
Menebas	95%	5%	Parang, mesin rumput	-	-
Petani Nanas	50%	50%	Bibit, tajuk	-	Harga murah, Transportasi sulit
Sektor non pertanian					
Batu Bata	70%	30%	Tanah, mesin cetak, angkong, cangkul, plastik, kayu, pasir	Sangat mudah	Cuaca tidak menentu menghambat pencetakan dan pengeringan
Depot Air	50%	50%	Mesin depot, galon, air	Sangat mudah	Transportasi
Ternak Sapi	80%	20%	Bibit sapi	Sangat mudah	- Harga bibit mahal - Keamanan
Buruh Bangunan	100%	0%	-	-	Upah kerja tidak menentu
Pegawai Negeri	30%	70%	-	-	-
Guru Honorer	20%	80%	-	-	Honor kecil sering terlambat

Sumber: FGD II Tim Pemetaan dan Masyarakat dalam Penyusunan Profil DPG Kepenghuluhan Tanjung Leban 2019.

Peran perempuan baik dewasa maupun anak-anak dalam kegiatan keseharian untuk kegiatan domestik di dalam rumah tangga lebih besar jika dibandingkan dengan Laki-laki baik dewasa dan anak-anak di Kepenghuluan Tanjung Leban. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan pertanian baik dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga sebagai buruh kebun lebih banyak dilakukan oleh laki-laki meskipun perempuan juga terlibat dan kadang terlibat dalam aktivitas tersebut. Dari aktivitas keseharian laki-laki dan perempuan baik dewasa dan anak-anak dapat disimpulkan bahwa Perempuan terutama yang dewasa lebih banyak melakukan kerja-kerja domestik rumah tangga dan dengan keterlibatannya dalam kerja-kerja di luar rumah tangga menyebabkan perannya cukup besar dalam masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban. Lebih jelas mengenai aktivitas keseharian laki-laki dan perempuan di Kepenghuluan Tanjung Leban dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 37 Matrik Profil Aktifitas Dalam Analisis Gender

No	Kegiatan	Aktifitas Di Dalam Keluarga						Aktifitas Di Luar Keluarga					
		Laki-Laki			Perempuan			Laki-Laki			Perempuan		
		UM	KD	TP	UM	KD	TP	UM	KD	TP	UM	KD	TP
	Mencangkul	D			D			D	A			D	
	Belanja				D	A			D A		D A		
	Mengendarai motor	D A			D A			D A			D A		
	Mengendarai mobil	D					D		D			D	
	Memegang uang kebutuhan sehari-hari di rumah		D		D				D		D		
	Wirid	D A			D A			D A			D A		
	Mengasuh anak		D		D				D		D		
	Beternak	D			D				D		D		
	Menanam sawit	D				D		D			D		
	Bersih-bersih rumah		D		D				D		D		
	Memasak		D		D				D A			D	
	Memanen sawit	D	A			D		D	A		D		
	Perawatan kebun	D	A				D	D A					D
Keterangan: UM: Umumnya, KD: Kadang-kadang, TP: Tidak Pernah, D: Dewasa, A: Anak-anak													

Sumber: FGD I Tim Pemetaan dan Masyarakat dalam Penyusunan Profil DPG Kepenghuluan Tanjung Leban 2019.

Pembagian akses dan kontrol terhadap sumberdaya antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya merupakan hasil dari konstruksi sosial, budaya dan politik yang berlangsung dalam suatu masyarakat. Persamaan dan perbedaan akses dan kontrol terhadap sumberdaya antara laki-laki dan perempuan dapat ditemukan juga berlangsung dalam masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban.

Akses dan Kontrol Perempuan dalam hal sumber daya fisik terutama berkaitan dengan pengaturan keuangan rumah tangga yang sangat strategis karena terkait dengan pengaturan pengeluaran dan pemasukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Sedangkan dalam sumber daya non fisik, pengaturan-pengaturan mengenai pendidikan dan kesehatan dalam rumah tangga diselenggarakan secara setara antara laki-laki dan perempuan. Meskipun dalam hal politik perempuan dianggap tidak memiliki pengetahuan yang lebih baik dari laki-laki, tetapi Perempuan lebih berperan aktif. dalam kegiatan-kegiatan kelompok yang ada dalam masyarakat Mengenai akses dan kontrol dalam analisis gender di Kepenghuluan Tanjung Leban terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 38 Matrik Profil Akses dan Kontrol dalam Analisis Gender:

Jenis Sumber Daya	Akses		Kontrol		Keterangan
	PR	LK	PR	LK	
Sumber Daya Fisik					
Lahan Pertanian	20%	80%	30%	70%	Laki-laki lebih memahami lapangan tentang pertanian sawit
Tenaga Kerja	20%	80%	20%	80%	Pekerjaan banyak di perkebunan butuh tenaga yang kuat
Uang	90%	10%	80%	20%	Lebih bisa mengatur keuangan rumah tangga
Tabungan	70%	30%	70%	30%	Lebih tahu tentang pemasukan dan pengeluaran rumah tangga dan anak lebih sering minta uang ke ibu
Sumber daya non fisik					
Pendidikan	50%	50%	50%	50%	Masalah pendidikan butuh perhatian dari dua pihak orang tua
Kesehatan	50%	50%	60%	40%	Karena ibu lebih sering di rumah dan lebih tahu kondisi keluarga
Politik	10%	90%	15%	85%	Pengetahuan politik laki-laki lebih kuat
Kelompok masyarakat	70%	30%	60%	40%	Ibu-ibu lebih aktif untuk mengikuti kegiatan kelompok

Sumber: FGD I Tim Pemetaan dan Masyarakat dalam Penyusunan Profil DPG Kepenghuluan Tanjung Leban 2019.

9.4 Industri dan Pengolahan di Desa

Komoditas utama dari yang dihasilkan petani dalam budidaya pertanian di Kepenghuluan ini adalah Kelapa Sawit. Komoditas ini telah membentuk aktifitas ekonomi perdagangan dimana terdapat pedagang pengumpul Kelapa Sawit atau biasa disebut masyarakat sebagai *Tauke* yang menjadi bagian rantai pasok dalam industri Kelapa Sawit. *Tauke* membeli hasil produksi pertanian petani berupa Tandan Buah Sawit (TBS) dan Buah Sawit lepas dari petani untuk kemudian dipasarkan ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk diolah lebih lanjut. Dalam penentuan harga beli buah sawit yang berdasarkan berat TBS per Kilogram kepada petani, para pedagang pengumpul biasanya mengikuti patokan harga dari PKS.

Penjualan Kelapa sawit oleh petani kepada *Tauke* biasanya dilakukan di tempat pengumpulan sawit yang dimiliki *Tauke* yang biasa disebut *Ram Sawit*. Perbedaan harga kelapa sawit dari *Tauke* yang satu ke *Tauke* yang lain lebih disebabkan karena posisi *Ram* dan faktor transportasi untuk mengirim sawit ke PKS. Terdapat pula cara penentuan harga dengan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk *melangsir* atau mengeluarkan hasil panen sawit dari kebun ke *Ram Sawit*. Pada umumnya masing-masing petani memiliki langganan *Tauke* tempat petani menjual hasil panennya, hubungan ini terjadi terutama karena faktor kepercayaan dalam penghitungan berat dari hasil panen serta, meskipun terdapat pula ikatan-ikatan ekonomi dan sosial lainnya yang turut mempengaruhi hubungan antara petani dan *Tauke*. Selain menghasilkan TBS, bagian tulang daun kelapa sawit juga dapat dimanfaatkan menjadi lidi sawit yang mempunyai tekstur agak keras, elastis pada bagian ujungnya dan berwarna cokelat muda. Selain pedagang pengumpul yang membeli TBS, telah terdapat pula pedagang pengumpul lidi sawit yang membeli lidi sawit yang dihasilkan oleh warga dengan harga beli berdasarkan berat dari lidi yang diual warga. Terdapat pula pedagang pengumpul barang bekas yang menerima barang-barang bekas dan membelinya berdasarkan material bahan barang bekas yang dijual warga. Mengenai pedagang pengumpul desa di Kepenghuluan Tanjung Leban dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 39 Pedagang Pengumpul Desa

No	Pengumpul	Komoditas		Harga Beli
1.	Pedagang Pengumpul A	Sawit	Rp.	1000,-/Kg
2.	Pedagang Pengumpul B	Sawit	Rp.	1000,-/Kg
3.	Pedagang Pengumpul C	Sawit	Rp.	1000,-/Kg
4.	Pedagang Pengumpul D	Sawit	Rp.	1000,-/Kg
5.	Pedagang Pengumpul E	Sawit	Rp.	1000,-/Kg
6.	Pedagang Pengumpul F	Sawit	Rp.	800,-/Kg
7.	Pedagang Pengumpul G	Sawit	Rp.	1000,-/Kg
8.	Pedagang Pengumpul H	Sawit	Rp.	800,-/Kg
9.	Pedagang Pengumpul I	Sawit	Rp.	800,-/Kg
10.	Pedagang Pengumpul J	Sawit	Rp.	800,-/Kg
11.	Pedagang Pengumpul K	Sawit	Rp.	800,-/Kg
12.	Pedagang Pengumpul L	Sawit	Rp.	800,-/Kg
13.	Pedagang Pengumpul M	Sawit	Rp.	800,-/Kg
14.	Pedagang Pengumpul N	Sawit	Rp.	800,-/Kg
15.	Pedagang Pengumpul O	Sawit	Rp.	800,-/Kg
16.	Pedagang Pengumpul P	Lidi Sawit	Rp.	200,-/Kg
17.	Pedagang Pengumpul Q	Barang Bekas	Besi	Rp. 3000,-/Kg
			Tembaga	Rp. 15.000,-/Kg
			Plastik	Rp. 1.500,-/Kg
			Kardus	Rp. 3.000,-/Kg
18.	Pedagang Pengumpul R	Barang Bekas	Besi	Rp. 3000,-/Kg

			Tembaga	Rp.	15.000,-/Kg
			Plastik	Rp.	1.500,-/Kg
			Kardus	Rp.	3.000,-/Kg
			Besi	Rp.	
19.	Pedagang Pengumpul S	Barang Bekas	Damar	Rp.	
			Kardus	Rp.	
			Piring	Rp.	

Sumber: Wawancara dengan Pedagang Pengumpul Desa di Kepenghuluan Tanjung Leban 2019.

Gambar 16 Tempat Pedagang Pengumpul Sawit



Ram Sawit A di Dusun Sempurna



Ram Sawit B di Dusun Sempurna

Sumber: Dokumentasi Pribadi.

Masih minim dijumpainya usaha produksi atau pabrik pengolahan di Kepenghuluan yang mengolah hasil produksi dari tanah dan kekayaan alam di wilayah kepenghuluan menjadi produk bahan setengah jadi atau bahan jadi menandakan belum berkembangnya usaha produksi dan pengolahan di Kepenghuluan Tanjung Leban. Pembuatan batu bata adalah salah satu usaha produksi yang terdapat di Kepenghuluan ini. Meskipun terbilang masih sedikit tetapi dapat menyerap tenaga kerja paling banyak saat ini jika dibandingkan dengan usaha produksi lainnya yang ada di Kepenghuluan ini. Untuk pembuatan atap nipah sebagai usaha rumah tangga saat ini dilakukan dengan menerima pesanan pembuatan atap dari bahan daun nipah yang bahan bakunya dari wilayah kepenghuluan ini dan sekitarnya. Di Kepenghuluan Tanjung Leban dapat ditemukan juga adanya usaha pertukangan atau Molding yang merupakan workshop untuk produksi pintu, jendela, dan kusen dengan bahan dasar kayu.

Kondisi air yang kurang layak untuk dikonsumsi di wilayah Kepenghuluan ini menyebabkan adanya kebutuhan penyediaan air minum yang dapat dikonsumsi warga. Dari kondisi tersebut kemudian muncul usaha produksi pengolahan air berupa depot air di Kepenghuluan ini dengan harga yang lebih terjangkau jika dibandingkan dengan membeli air minum kemasan dari pabrik. Saat ini telah terdapat tiga depot air yang menyediakan air yang layak dikonsumsi untuk warga, masing-masing depot air mempunyai harga jual yang berbeda-beda meskipun rentangnya tidak terlalu jauh. Perbedaan harga ini pada umumnya terjadi lebih karena posisi depot air tersebut berada, semakin ke dalam wilayah Kepenghuluan maka harga yang ditawarkan akan lebih mahal.

Usaha produksi lainnya yang saat ini mulai berkembang di Kepenghuluan Tanjung Leban adalah budidaya sarang burung walet yang menghasilkan sarang burung walet untuk dikonsumsi sebagai bahan makanan. Usaha produksi ini cukup menggiatkan dan menguntungkan meskipun modal awal yang dibutuhkan untuk membangun Rumah Sarang Burung Walet cukup besar. Pemasaran Sarang Burung Walet masih terbatas pada pedagang pengumpul di salah satu wilayah kepenghuluan di Kecamatan Kubu yang menerima Sarang Burung Walet didasarkan pada kualitas dengan harga berkisar 12 juta hingga 14 juta rupiah per kilogram. Tentang usaha-usaha produksi dan pengolahan yang telah ada di kepenghuluan Tanjung Leban dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 40 Usaha Produksi & Pengolahan

No	Usaha Produksi / Pengolahan	Nama Usaha Produksi	Produk yang diolah/ dihasilkan	Tenaga Kerja yang terlibat		Lingkup & Harga Pemasaran
				L	P	
1.	Batu Bata	Produksi Batu Bata	Tanah Liat menjadi batu bata	19	-	Pemasaran di desa dan luar desa Batu bata kecil Rp. 630,-/bata Batu bata besar Rp. 830,-/bata
2.	Atap Nipah	Produksi atap Nipah	Daun Nipah diolah menjadi atap	1	1	Rp. 1000,-/lembar
3.	Molding	Produksi Molding	Pintu, Jendela, dan Kusen Kayu	1	-	Pintu: Rp. 450.000,- Jendela : Rp. 200.000,- Kusen: Rp. 150.000,-
4.	Depot Air Minum	Depot Air Minum 1	Air Minum	2	2	Rp. 5.000,-/Galon
5.	Depot Air Minum	Depot Air Minum 1	Air Minum	4	-	Rp. 5.000,-/Galon
6.	Depot Air Minum	Depot Air Minum 1	Air Minum	1	-	Rp. 6.000,-/Galon
7.	Sarang Burung Walet	Budidaya Sarang Burung Walet	Sarang Burung Walet	1	-	Rp. 14.000.000,- s/d Rp. 15.000.000,- /kg
8.	Sarang Burung Walet	Budidaya Sarang Burung Walet	Sarang Burung Walet	1	-	Rp. 14.000.000,- s/d Rp. 15.000.000,- /kg
9.	Sarang Burung Walet	Budidaya Sarang Burung Walet	Sarang Burung Walet	1	-	Belum Berproduksi
10.	Sarang Burung Walet	Budidaya Sarang Burung Walet	Sarang Burung Walet	1	-	Rp. 14.000.000,- s/d Rp. 15.000.000,- /kg
11.	Sarang Burung Walet	Budidaya Sarang Burung Walet	Sarang Burung Walet	1	-	Belum Berproduksi
12.	Sarang Burung Walet	Budidaya Sarang Burung Walet	Sarang Burung Walet	1	-	Rp. 14.000.000,- s/d Rp. 15.000.000,- /kg

Sumber: Wawancara Pemilik Usaha Produksi & Pengolahan Di Kepenghuluan Tanjung Leban 2019.

Gambar 17 Usaha Produksi / Pengolahan di Kepenghuluan Tanjung Leban



Sarang Burung Walet 1 di Dusun Cipta Jaya



Sarang Burung Walet 2 di Dusun Cipta Jaya



Sarang Burung Walet 3 di Dusun Cipta Jaya



Sarang Burung Walet 4 di Dusun Sempurna



Sarang Burung Walet 5 Dusun Cipta Jaya



Sarang Burung Walet 6 Dusun Sempurna



Sarang Burung Walet 7 Dusun sempurna



Depot Air Di Dusun Sempurna



Tempat Pembuatan Batu Bata 1 di Dusun Sempurna



Tempat Pembuatan Batu Bata 2 di Dusun Sempurna

Sumber: Dokumentasi Pribadi.

9.5 Potensi dan Masalah dalam Pengelolaan Lahan Gambut

Dalam pengelolaan lahan khususnya lahan gambut di Kepenghuluan Tanjung Leban warga melihat semua pemanfaatan lahan yang ada dalam wilayah ini memiliki potensi serta masalah yang harus diselesaikan. Pemanfaatan lahan yang ada di Kepenghuluan Tanjung Leban saat ini adalah berupa pemukiman, kebun sawit, kebun nanas dan semak belukar. Seluruh pemanfaatan ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut di masa yang akan datang. Potensi di kawasan pemukiman menurut warga adalah belum dioptimalkannya lahan pekarangan yang cukup luas untuk budidaya jenis-jenis tanaman pertanian serta perikanan yang produktif dan dapat memberikan pendapatan tambahan pendapatan bagi warga. Sedangkan masalah pada pemukiman adalah tingkat keasaman air yang tinggi yang menyebabkan sulit untuk dikonsumsi serta untuk kegiatan produktif seperti budidaya ikan. Selain itu banjir merupakan kejadian tahunan ketika musim penghujan berada pada puncaknya.

Untuk Sawit, potensi yang ada saat ini adalah cukup mudahnya dalam pemasaran TBS yang dihasilkan oleh warga, sedangkan lidi dan kulit pelepah sudah dimanfaatkan tetapi hanya merupakan sampingan. Hal ini dikarenakan di Kepenghuluan Tanjung Leban belum ada pengolahan produksi lebih lanjut dari bahan baku yang dihasilkan oleh warga dari Kelapa sawit, baik dari TBS, Lidi maupun pelepah yang dihasilkan. Potensi lainnya adalah sarana produksi pertanian yang masih konvensional sehingga dapat lebih lanjut dikembangkan di masa depan. Mahalnya sarana produksi pertanian merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh petani pada umumnya. Adapun masalah murahnya harga sawit juga terkait dengan kondisi jalan dan terbatasnya transportasi untuk pengangkutan yang menyebabkan biaya untuk pengangkutan sawit petani meningkat. Serangan hama juga menjadi masalah yang perlu diatasi agar produksi tidak mendapatkan gangguan dalam prosesnya.

Pada pengembangan komoditas Nanas, warga melihat bahwa cara produksi pertanian yang masih konvensional justru memberikan keuntungan dengan menekan biaya pengeluaran untuk sarana produksi pertanian. Banyak bagian-bagian dari produksi komoditas Nanas yang masih bisa dikembangkan menjadi produk lanjut baik dari batang dan buah. Salah satu yang dianggap potensi adalah dengan mengembangkan pupuk organik dari bagian selain buah nanas yang oleh warga telah dicoba aplikasinya pada tanaman Kelapa Sawit dan memberikan hasil yang cukup baik. Pemasaran yang cukup mudah bagi komoditas Nanas ini belum didukung dengan harga yang stabil pada komoditas ini. faktor infrastruktur jalan dan alat transportasi juga menjadi kendala yang menyebabkan sulitnya untuk memasarkan Komoditas pertanian ini. Komoditas ini juga menghadapi masalah serangan hama terutama dari babi hutan.

Saat ini Semak belukar merupakan tutupan lahan terbesar di kepenghuluan Tanjung Leban. Kondisi semak belukar yang ada di kepenghuluan ini perlu diatur agar dapat dikelola oleh warga dengan budidaya pertanian yang produktif sehingga tidak menimbulkan kerentanan kebakaran serta menjadi tempat hama bersarang. Mengenai potensi dan masalah dalam pengelolaan lahan gambut di Kepenghuluan tanjung Leban dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 41 Potensi dan Masalah dalam Pengelolaan Lahan Gambut

Potensi	Masalah
Pemukiman	
Belum maksimal untuk budidaya di lahan pekarangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PH air tinggi ▪ Banjir
Sawit	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemasaran cukup mudah ▪ Pemanfaatan lidi dan kulit pelepah untuk dijadikan tepas (dinding) ▪ Belum ada pengolahan produk lanjut ▪ Sarana produk pertanian masih konvensional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebakaran ▪ Harga murah ▪ Jalan rusak ▪ Transportasi ▪ Hama: babi tikus, ulat, ▪ Sarana produksi pertanian mahal
Nanas	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanpa pemupukan masih alami ▪ Batang belum dimanfaatkan. ▪ Belum diolah dalam bentuk produk lain, terutama produk makanan. ▪ Bagian selain buah, telah diolah menjadi pupuk organik yang berhasil diaplikasikan pada tanaman kelapa sawit ▪ pemasaran cukup mudah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebakaran ▪ Harga tidak stabil ▪ Jalan rusak ▪ Transport jauh ▪ Hama: babi & musang
Semak Belukar	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum ada yang dimanfaatkan ▪ Tanah belum diolah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebakaran ▪ Menjadi tempat hama

Sumber: diolah dari hasil FGD I Penyusunan Laporan Profil DPG Kepenghuluan Tanjung Leban 2019



Bab X

Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah dan Sumber Daya Alam

10.1 Pemanfaatan Tanah dan Sumber Daya Alam

Pada awalnya aktivitas kehidupan masyarakat Tanjung Leban lebih terpusat pada kawasan tanah non gambut di bagian Timur Laut dimana pemukiman mulai berkembang pada tepian Sungai Kubu. Pemukiman ini kemudian berkembang seiring juga dengan aktifitas pemanfaatan hasil hutan dan budidaya pertanian ke arah Barat Daya mengikuti sungai alam serta yang paling utama mengikuti perkembangan parit-parit yang mulai dibuat dalam wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban. Aktifitas awal budidaya pertanian masyarakat di Kepenghuluan Tanjung Leban adalah terutama membudidayakan Karet, Kopi, Coklat dan Kelapa pada lahan hutan yang dialihkan menjadi lahan budidaya pertanian. Hingga awal dekade tahun 1990-an jenis-jenis komoditas tersebut menjadi andalan untuk pemenuhan kebutuhan kehidupan masyarakat.

Pemanfaatan lahan pertanian untuk budidaya tanaman penghasil komoditas mulai mengalami perubahan jenis tanaman di awal dan pertengahan dekade 1990-an, dimana Kelapa Sawit mulai ditanam menggantikan jenis-jenis tanaman yang telah lebih dahulu dibudidayakan masyarakat. Pilihan beralih ke Kelapa Sawit lebih didorong pertimbangan ekonomis dimana harga di pasaran saat itu cukup bagus karena tingginya kebutuhan dan permintaan terhadap komoditas ini. Akibat dari perubahan jenis tanaman komoditas ini lanskap lahan pertanian yang diusahakan warga cenderung menjadi lahan pertanian monokultur dimana sawit menjadi tanaman utama.

Perkembangan harga sawit yang cukup baik juga mendorong warga di Kepenghuluan ini maupun masyarakat dari luar Kepenghuluan yang mencoba memperbaiki kehidupannya membuka hutan untuk lahan budidaya Kelapa Sawit. Pembukaan lahan hutan menjadi lahan budidaya komoditas Kelapa Sawit ini berlangsung masif di awal dekade tahun 2000-an, dimana masyarakat dari luar Kepenghuluan bahkan luar Provinsi berdatangan untuk bermukim dan mulai mengembangkan aktivitas pertaniannya.

Penggunaan metode bakar untuk membuka lahan juga kerap dipraktikkan dalam pembukaan lahan tanpa kehati-hatian yang berakibat meluasnya kebakaran lahan. Menurut penuturan warga yang juga membuka lahan di awal dekade tahun 2000-an, mulai sekitar tahun 2003-2004 kebakaran lahan dan hutan adalah peristiwa langganan hampir tiap tahunnya di wilayah Kepenghuluan ini.

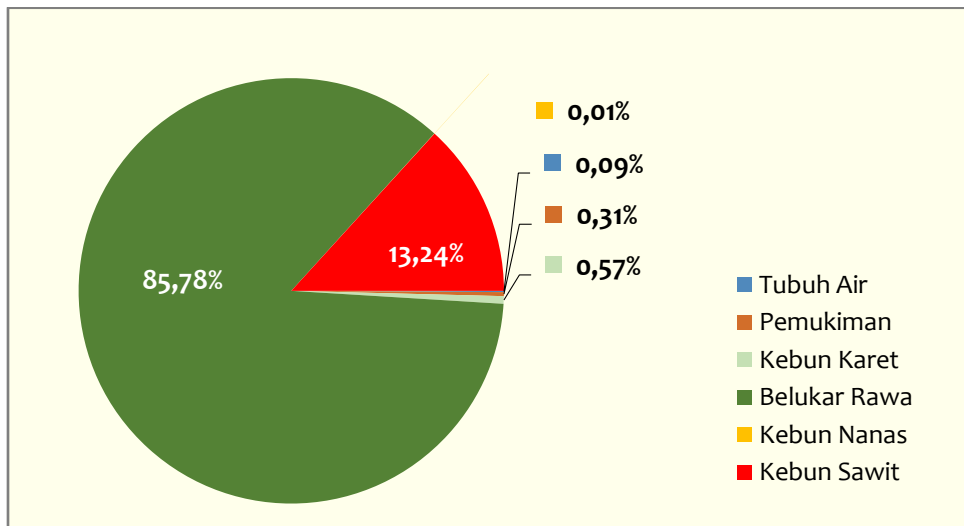
Kebakaran ini semakin kerap berulang karena lahan yang dibuka tidak segera dikelola dengan melakukan penanaman sehingga penutupan lahannya dipenuhi kembali oleh semak belukar yang pada saat terjadi kebakaran lahan akan semakin rentan menghadapi ancaman kebakaran lahan. Peristiwa kebakaran lahan yang berulang-ulang ini telah merubah sebagian besar lanskap Kepenghuluan Tanjung Leban terutama di wilayah tanah gambut menjadi didominasi dengan tutupan lahan berupa semak belukar. Hal ini terlihat dari besarnya luasan lahan berupa belukar rawa pada saat deliniasi citra satelit resolusi tinggi dilakukan bersama warga dalam pemetaan partisipatif untuk penyusunan laporan profil DPG tahun 2019 di Kepenghuluan Tanjung Leban. Dengan area belukar rawa yang sangat luas, saat ini warga hanya memanfaatkan untuk lahan pemukiman dan budidaya pertanian seluas 14,21% dari seluruh luas wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban. Pemanfaatan lahan yang saat ini dilakukan oleh warga kepenghuluan Tanjung Leban adalah untuk budidaya pertanian terutama berupa kebun Kelapa Sawit, kebun Nanas, Kebun Karet, serta untuk kawasan pemukiman tempat warga tinggal dan mengembangkan berbagai aktifitas sosialnya. Mengenai pemanfaatan lahan yang ada di Kepenghuluan Tanjung Leban lebih detil dapat dilihat pada tabel, diagram dan peta yang dihasilkan dalam pemetaan partisipatif sebagai berikut:

Tabel 42 Pemanfaatan Lahan di Kepenghuluan Tanjung Leban

No	Pemanfaatan Lahan	Luas (Ha)
1.	Pemukiman	65,39
2.	Kebun Karet	123,07
3.	Kebun Nanas	3,14
4.	Kebun Sawit	2.837,52
5.	Belukar Rawa	18.385,72
6.	Tubuh Air	19,76
Total		21.434,60

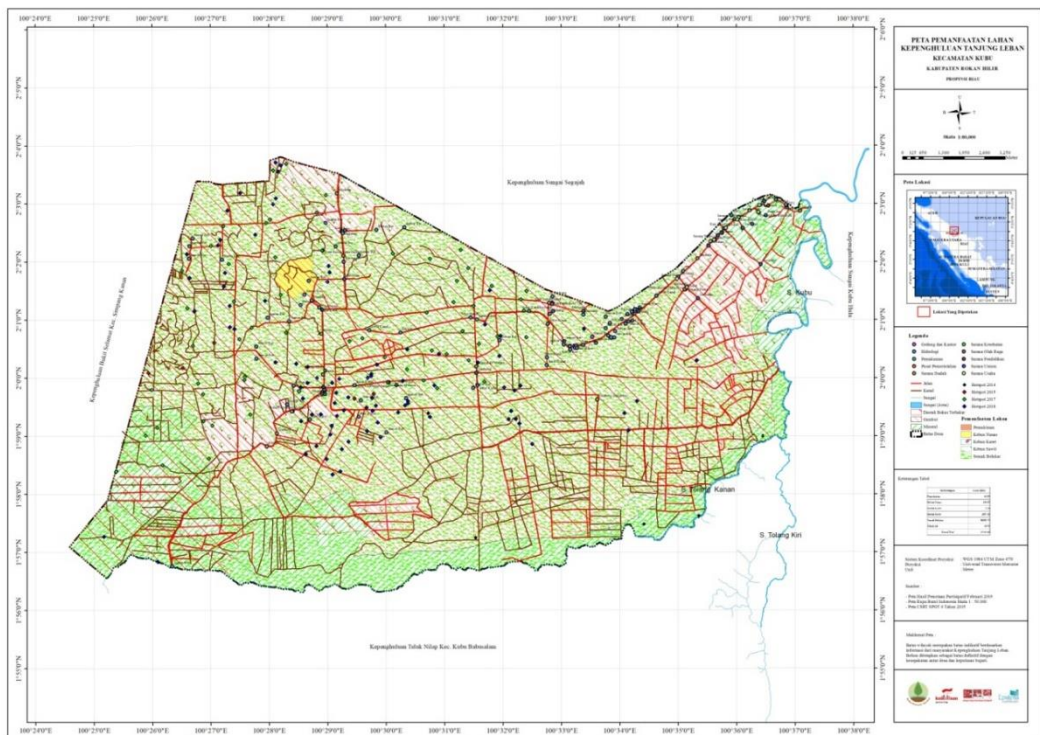
Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DPG 2019.

Gambar 18 Diagram pemanfaatan lahan



Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DPG 2019.

Gambar 19 Peta Pemanfaatan Lahan



Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DPG 2019.

Mengenai pola pemanfaatan, potensi, masalah, penerima manfaat dan status penguasaan dalam penggunaan lahan di Kepenghuluan Tanjung Leban oleh masyarakat dapat dilihat pada tabel pola penggunaan lahan dan tabel transek desa dibawah ini:

Tabel 43 Pola Penguasaan Ruang

JENIS PEMANFAATAN LAHAN	PEMANFAATAN	POTENSI BELUM DIMANFAATKAN	MASALAH	KELOMPOK PEMANFAATAN	STATUS KEPEMILIKAN
Pemukiman (sebagian berlahan gambut Cipta Damai, berlahan gambut Rantau Benuang, Suka Damai, Mayangsari,)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tempat tinggal ▪ Perkarangan ▪ Tanaman hias dan buah-buahan ▪ Budidaya ikan 	Belum maksimal untuk budidaya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Air Ph tinggi ▪ Banjir 	Sebagai tempat tinggal	Individu / perorangan
Kebun sawit (sebagian berlahan gambut Rantau Benuang, Suka Damai, Mayangsari, Cipta Damai)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TBS ▪ Lidi ▪ Pelepah / gedek ▪ Humbut 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum ada pengolahan lanjut ▪ Sarana produk pertanian masih konvensional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Harga murah ▪ Jalan rusak ▪ Transportasi ▪ Hama: babi, tikus, ulat ▪ Sarana produksi pertanian mahal 	Ekonomi - Sumber penghasilan utama	Individu / perorangan
Nanas (sebagian berlahan gambut Rantau Benuang, Suka Damai, Mayangsari, Cipta Damai)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Buah ▪ Daun untuk pupuk organik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Batang ▪ Belum diolah dalam bentuk produk lain 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Harga tidak stabil ▪ Jalan rusak ▪ Transport jauh ▪ Hama, babi, musang 	Ekonomi - Sumber penghasilan	Individu / perorangan
Semak belukar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum ada 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum ada ▪ Tanah belum diolah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjadi tempat hama 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum ada 	Individu / perorangan (termasuk pemodal)
Kebun Karet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Getah ▪ Kayu untuk kayu bakar ▪ Kayu Dijual ke luar desa untuk mebel 	Biji untuk mainan anak-anak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kadar air tinggi ▪ Harga murah ▪ Akses transportasi sulit 	Ekonomi – Sumber Penghasilan	Individu / perorangan

Sumber : Fokus Grup Diskusi Tim Pemetaan dan Masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban 2019.

Tabel 44 Transek Desa

DUSUN KARYA	DUSUN SEMPURNA	DUSUN CIPTA JAYA	DUSUN SUKA DAMAI	DUSUN RANTAU BENUANG	DUSUN MAYANG SARI
MASALAH					
Jalan tidak layak Pemakaman tidak terawat MDTA Kurang layak Posyandu tidak Layak Bidan tidak di tempat	Jalan tidak layak MDTA dibiayai swadaya masyarakat Sawit masih dipasarkan secara pribadi	Jalan tidak layak Rawan pencurian sawit	Jalan buruk Rawan kebakaran Tidak ada fasilitas pendidikan dan kesehatan	Jalan buruk Rawan kebakaran	Jalan Buruk Konflik batas desa Sarana ibadah musala tidak layak
PENGUNAAN LAHAN					
SD, Nipah, Sawit, Pemukiman, Masjid, Posyandu	Pengolahan batu bata, Sawit, Warung, Walet, Masjid, Jembatan, Pemukiman, Bengkel, Ram Sawit, TK, MDTA	Sawit, Walet, Musala, Pemukiman, Masjid, Kantor, Karet, Pemukiman	Sawit, Bengkel, Warung, Gorong-gorong, Nanas, Musala, Masjid	Sawit, pemukiman, gereja, nanas, SMP, masjid, Pustu, SD, Gorong-gorong, Warung, Bengkel	Sawit, Balai Desa, Musala, Gereja, Pemukiman, Nanas, Warung
STATUS LAHAN					
Pribadi /Perorangan, SKT, Waris, Wakaf, Hibah, SKGR	Pribadi /Perorangan, SKT, Waris, Wakaf, Hibah, SKGR	Pribadi /Perorangan, SKT, Waris, Wakaf, Hibah, SKGR	Pribadi /Perorangan, SKT, Waris, Wakaf, Hibah, SKGR	Pribadi /Perorangan, SKT, Waris, Wakaf, Hibah, SKGR	Pribadi /Perorangan, SKT, Waris, Wakaf, Hibah, SKGR
POTENSI					
Perkebunan	Pertanian, perkebunan	Pertanian, perkebunan	Perkebunan	perkebunan	perkebunan
JENIS TANAMAN					
Sawit, Nipah, Kelapa	Sawit, Mangga	Sawit, Karet, Nenas	Sawit, Nenas, Kelapa	Sawit, Nenas	Sawit, Nenas
KESUBURAN TANAH					
Subur	Subur	Subur	Subur	Subur	Subur

Sumber: Hasil Observasi dalam Pemetaan Partisipatif.

Sumber: Dokumentasi Pribadi.

10.2 Penguasaan Tanah dan Sumber Daya Alam

Pada wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban yang memiliki luas sebesar 21.434,60 Ha, penguasaan tanah dan kekayaan alam pada dasarnya terbagi dalam dua penguasaan besar legal formal, yakni oleh negara dan masyarakat. Penguasaan tanah oleh negara pada dasarnya meliputi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 dengan luas 19.808,17 Ha atau 92,41% dari keseluruhan luas wilayah kepenghuluan ini. Penguasaan besar tanah yang kedua di wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban yang seluas ±1.623,43 Ha adalah merupakan Kawasan Area Penggunaan Lain (APL). Terdapat dua lokasi yang berbeda yang menjadi kawasan APL di Kepenghuluan Tanjung Leban, yang pertama di sebelah ujung Timur Kepenghuluan ini seluas ±971,44 Ha, serta di bagian ujung Tenggara Kepenghuluan Tanjung Leban seluas ±654,99 Ha. Pada umumnya kawasan APL ini merupakan lahan dengan jenis tanah mineral meskipun pada beberapa bagian merupakan lahan gambut berkedalaman dangkal.

Kondisi Kawasan HPT saat ini dominan dengan penutupan lahan berupa semak belukar yang didalamnya termasuk lahan bekas terbakar. Terdapat pula pemukiman warga serta lahan budidaya pertanian masyarakat terutama berupa kebun sawit, kebun nanas dan kebun karet. Semua penguasaan lahan oleh masyarakat ini tidak didasarkan pada alas hak tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan agraria dan hutan yang berlaku saat ini. Penguasaan lahan ini sebagian telah memegang keterangan pendaftaran tanah dari Kepenghuluan terutama dalam bentuk Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan di masa lalu oleh Pemerintahan Kepenghuluan. Selain SKT terdapat pula lahan warga yang penguasaannya didasarkan pada keterangan pendaftaran tanah berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang dikeluarkan oleh Kepenghuluan dengan dikuatkan oleh Kecamatan. SKGR ini memperlihatkan sesungguhnya terjadi transaksi jual beli dalam penguasaan tanah di masyarakat. Dalam kawasan HPT, penguasaan tanah selain oleh masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban juga ditemukan adanya penguasaan tanah oleh masyarakat dari luar desa. Berdasarkan hasil Deliniasi Citra Satelit Resolusi Tinggi bersama warga dalam pemetaan partisipatif terdapat tanah seluas kurang lebih 805,60 Ha yang dikuasai oleh Masyarakat dari luar Kepenghuluan Tanjung Leban. Kawasan HPT ini pada umumnya merupakan lahan gambut, di mana tanah mineral pada kawasan HPT ini hanya berada pada sepanjang aliran Sungai Kubu dan Sungai Tolang Kanan dengan radius antara 500 meter hingga lebih dari 3 kilometer.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dalam Kawasan APL dapat dibebankan beberapa jenis hak-hak atas tanah. Berdasarkan pada UUPA, di atas tanah tersebut dapat diberikan hak atas tanah kepada orang dan atau badan hukum dengan berbagai bentuk hak, dari yang tertinggi dan penuh yaitu Hak Milik (HM) untuk perorangan serta diberikan untuk penggunaan tanah oleh Badan Hukum seperti perusahaan dan juga lembaga/instansi pemerintah dengan bentuk hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Pakai (HP). Pemilikan dan penggunaan tanah oleh masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban hanya sebagian kecil yang sudah bersertipikat hak milik terutama untuk tanah-tanah yang digunakan sebagai pemukiman. Adapun sebagian besar tanah dalam kawasan APL ini belum bersertipikat hak atas tanah baik untuk lahan pemukiman maupun lahan pertanian. Pada Kawasan APL seperti juga dalam kawasan HPT, penguasaan tanah juga ada yang berdasarkan SKT dan SKGR. Pemilikan dan penggunaan tanah pada kawasan APL pada umumnya cara yang ditempuh adalah melalui proses transaksi, pewarisan, hibah serta wakaf.

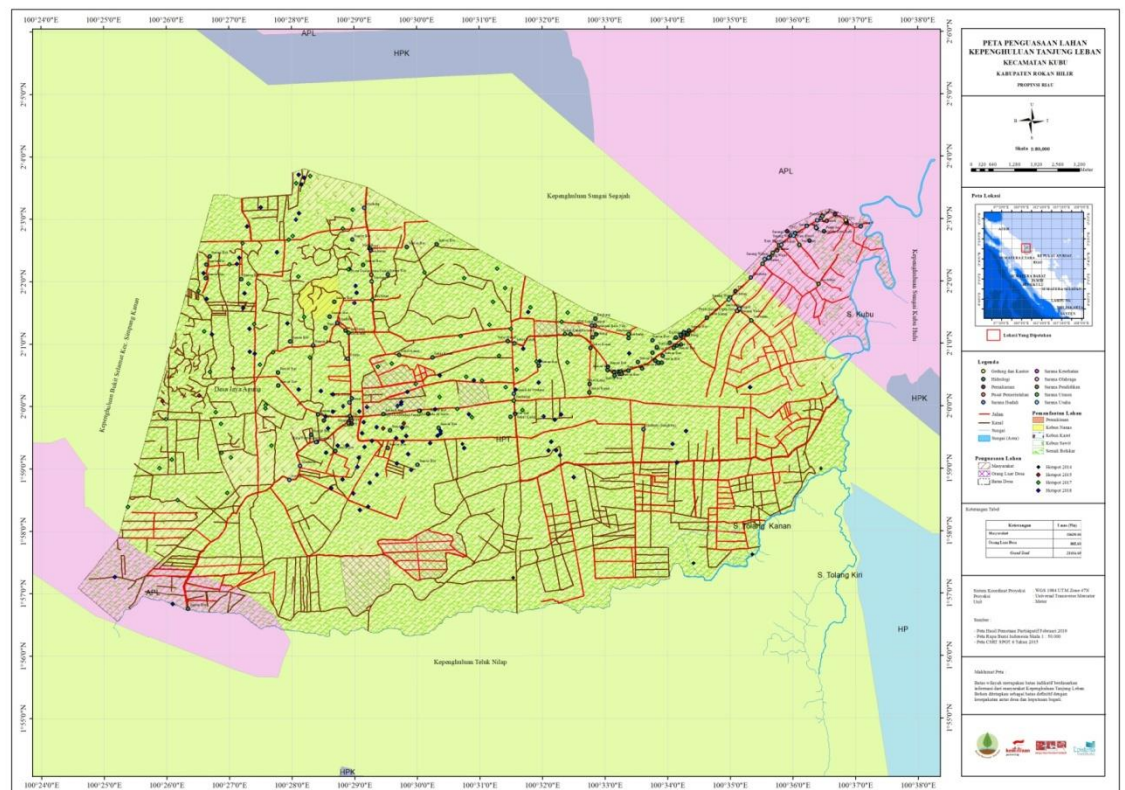
Terdapat masalah dalam penguasaan tanah di Kepenghuluan Tanjung Leban yang bermula dari ketiadaan penetapan batas wilayah antar kepenghuluan serta antar kecamatan secara legal formil oleh instansi yang berwenang yang menyebabkan terjadinya saling klaim tapal batas antar Kepenghuluan terutama dengan kepenghuluan Teluk Nilap yang ada di sebelah timur dan selatan, serta dengan Kepenghuluan Sungai Segajah di sebelah Utara. Akibat dari hal itu terdapat tanah-tanah baik pemukiman dan pertanian yang saling bersebelahan tetapi mendasarkan pada SKT dan SKGR yang dikeluarkan oleh Kepenghuluan yang berbeda bahkan terdapat pula yang berada ditengah-tengah lahan-lahan lainnya dengan SKT dan atau SKGR yang dikeluarkan oleh Kepenghuluan yang berbeda.

Pada beberapa waktu yang lalu, masyarakat dengan dibantu perangkat pemerintahan Kepenghuluan sempat mengajukan upaya sertifikasi tanah-tanah terutama untuk lahan pemukiman di Kepenghuluan ini melalui apa yang oleh mereka disebut sebagai PRONA, dengan mengajukan kepada pihak Kantor Pertanahan Rokan Hilir. Pengajuan ini sebenarnya adalah program di Kementerian ATR/BPN yang lebih dikenal sebagai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Upaya ini diajukan oleh warga di Kepenghuluan Tanjung Leban tanpa melihat status kawasan hutan yang ada di wilayah Kepenghuluan ini. Akibatnya pihak Kantor Pertanahan Rokan Hilir hanya memproses pengajuan yang setelah dicek posisinya di lapangan berada dalam Kawasan APL. Pihak kantor Pertanahan tidak mau memproses pengajuan Sertipikat tanah Hak milik diatas tanah-tanah yang berada dalam Kawasan HPT. Namun demikian pihak Kantor Pertanahan tidak memberikan alasan mengapa pengajuan tersebut tidak dapat diproses. Akibat dari hal ini timbul konflik horizontal antara para perangkat pemerintahan Kepenghuluan dengan Warga yang tanahnya tidak dapat diajukan untuk mendapatkan Sertipikat Tanah Hak Milik.

Sebagian warga yang tanah pemukimannya tidak dapat diproses sertifikasi tanahnya menilai para perangkat Pemerintahan Kepenghuluan yang membantu proses pengajuan kepada Kantor Pertanahan tidak serius bekerja dan seperti menganaktirikan warga tertentu. Sedangkan para perangkat Kepenghuluan yang tidak mengetahui bahwa pada Kawasan HPT tidak dapat diajukan Sertipikat Hak atas tanah menyangkal tuduhan dari sebagian warga tersebut. Hal ini sesungguhnya memperlihatkan bahwa dalam masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban belum ada pengetahuan yang cukup baik mengenai hukum pertanahan dan sumberdaya alam yang berlaku.

Belum dipahaminya bahwa wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban terbagi dalam dua penguasaan besar secara legal formal menyebabkan warga juga tidak mengetahui implikasi hukum dari penetapan Kawasan HPT di wilayah Kepenghuluan ini terhadap lahan yang selama ini mereka manfaatkan untuk mengembangkan aktifitas kehidupannya. Secara faktual penguasaan tanah di Wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban hanya terbagi dalam dua penguasaan besar. Yaitu penguasaan tanah oleh warga Kepenghuluan Tanjung Leban dan penguasaan tanah oleh masyarakat dari luar Kepenghuluan Tanjung Leban. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai penguasaan tanah yang berlangsung saat ini di wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban dapat dilihat pada peta berikut ini:

Gambar 21 Peta Penguasaan Lahan



Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DPG 2019.

10.3 Penguasaan Lahan Gambut atau Parit/Handil

Keberadaan Lahan gambut di Kepenghuluan Tanjung Leban terutama berada pada Kawasan HPT yang kondisi faktualnya telah dimanfaatkan sebagai lahan budidaya pertanian dan pemukiman, serta sebagian besar telah menjadi area semak belukar karena terbakar dan tidak lagi dikelola kembali pasca terjadi kebakaran yang berulang-ulang di wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban. Pembukaan lahan gambut pada awalnya bermula dari pembuatan Parit Mat Ali di bagian timur dari wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban baru disusul dengan berbagai parit lainnya yang dibangun masyarakat dengan mulai membudidayakan tanaman coklat, kelapa, karet dan kopi. Ketika pembuatan parit ini semakin masuk ke tengah kawasan bertanah gambut pada dekade tahun 1990-an, pergantian jenis tanaman yang pada awalnya dibudidayakan masyarakat mulai marak dengan menanam kelapa sawit. Pada bagian barat wilayah Kepenghuluan ini mulai dibuka pada awal dekade tahun 2000-an dimana pembukaan lahan ini dilakukan sejak awal untuk budidaya kelapa sawit baik oleh warga yang sudah bertahun-tahun mendiami Kepenghuluan ini maupun oleh warga yang datang ke wilayah kepenghuluan ini untuk memperbaiki kehidupannya dan kemudian menjadi penduduk di wilayah kepenghuluan ini. Di sisi lain terdapat pembukaan lahan-lahan yang cukup luas yang kemudian lahan ini dikuasai oleh individu-individu yang tidak berdomisili di Kepenghuluan Tanjung Leban.

Menurut penuturan warga di masa lalu pada masa-masa pembukaan lahan dilakukan, pembukaan lahan dilakukan berkelompok dengan ketua yang ditunjuk oleh pihak Kepenghuluan. Kelompok ini biasa disebut sebagai kelompok *Pancang* dan Ketuanya disebut sebagai Ketua *Pancang*. Tugas ketua *Pancang* ini adalah membagi dan menetapkan lokasi dan luas tanah yang dibuka oleh oleh masing-masing anggota Kelompok *Pancang*.

Baru kemudian setelah lahan dibuka masing-masing warga yang telah mengelola lahan mengurus SKT untuk lahan yang telah dibuka. Penguasaan lahan gambut pada kawasan HPT di Kepenghuluan Tanjung Leban pada umumnya hanya mendasarkan pada SKT yang diurus oleh warga ke pihak Kepenghuluan. Tidak semua warga mengurus SKT atau SKGR atas tanah yang dikuasainya karena biaya pengurusan ke pihak Kepenghuluan dirasa cukup mahal oleh sebagian warga.

Pada masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban pembuatan parit-parit kecil antar lahan sebagai pembatas tanah yang satu dengan yang lain sangatlah jarang dibuat pada awalnya. Parit-parit yang ada lebih banyak merupakan parit-parit utama yang kemudian dapat digunakan pula sebagai jalur transportasi untuk mengeluarkan hasil kebun. Di sisi lain parit-parit utama juga terlihat mendapatkan dukungan dari pihak pemerintah daerah dimana proses peningkatan pembangunannya melalui program-program pembangunan yang dibiayai pemerintah daerah.

Saat ini pembuatan parit antar lahan kebun dianggap penting oleh warga karena untuk mencegah menjalarnya api pada saat kebakaran hutan terjadi. Saat ini untuk pembukaan lahan baru dengan tehnik yang dikenal dengan tehnik stacking yang menggunakan alat berat pun sekaligus juga dengan pembuatan parit-parit di sekeliling lahan yang dibuka. Meskipun demikian tidak semua warga mampu untuk membuka lahan dengan tehnik tersebut karena terbentur dengan modal yang harus dikeluarkan dalam pengerjaannya.

10.4 Peralihan Hak Atas Tanah (termasuk Lahan Gambut)

Dua model utama yang berlangsung dalam proses peralihan hak atas tanah di Kepenghuluan Tanjung Leban saat ini adalah dengan cara transaksi dan pemberian. Beberapa pola transaksi yang berupa jual beli, barter atau pertukaran, serta tukar tambah tidak semuanya dapat ditemukan dalam proses peralihan hak atas tanah di wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban. Pola transaksi yang paling umum dan paling sering ditemukan adalah jual beli, dimana warga melakukan penjualan tanah kepada warga yang lain dan biasanya dilakukan dengan alasan ada kebutuhan finansial yang cukup mendesak untuk diselesaikan. Hampir tidak diketemukan transaksi dengan cara barter yaitu menukarkan tanah dengan benda lain atau bisa juga dengan tanah yang lain. Tukar tambah dimana tanah ditukarkan dengan benda lain setelah terlebih dahulu ditaksir nilai masing-masing obyek untuk kemudian jika terjadi selisih nilai obyek salah satu pihak akan menutupi selisih nilai benda tersebut, Pola ini juga tidak ditemukan dalam masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban.

Untuk model pemberian terdapat beberapa pola seperti pewarisan, hibah, dan wakaf. Pada Kepenghuluan Tanjung Leban, ketiga pola ini dapat ditemukan masih berlangsung. Pewarisan dan hibah atas tanah biasanya dilakukan kepada orang yang masih mempunyai hubungan kekerabatan. Dalam hal pewarisan umumnya digunakan hukum waris yang berlaku dalam agama Islam sebagaimana mayoritas masyarakat Tanjung Leban merupakan umat muslim. Sedangkan pemberian untuk kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya yang sejalan dengan ajaran Islam biasanya melalui Wakaf dan merupakan tanah perorangan yang dipisahkan dari tanah pribadinya untuk kepentingan waqaf tersebut.

10.5 Sengketa Tanah di Lahan Gambut dan Non-Gambut

Batas administratif antar wilayah kepenghuluan dan antar wilayah kecamatan yang belum ada penetapannya, serta kurang tertatanya administrasi terutama administrasi kependudukan pada kepenghuluan-kepenghuluan di Kecamatan Kubu dan Kecamatan sekitarnya di Kabupaten Rokan Hilir, menjadi beberapa penyebab terjadinya sengketa pertanahan di wilayah Kepenghuluan ini. Ketiadaan batas-batas administratif yang jelas antar wilayah kepenghuluan dan antar wilayah kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir menyebabkan adanya klaim masyarakat antar kepenghuluan terutama pada lahan-lahan hasil pembukaan. Klaim batas antar kepenghuluan di luar kecamatan ini terjadi karena ketika pemekaran kecamatan Kubu Babussalam dari Kecamatan Kubu diterbitkan Perda tentang pemekaran kecamatan yang tidak segera diikuti dengan penerbitan peraturan bupati yang di dalamnya terlampir peta yang memuat batas-batas antar kecamatan.

Salah satu kekhawatiran warga dalam sengketa ini adalah hilangnya penguasaan tanah yang telah dikelolanya jika tanah tersebut ternyata berada dalam wilayah administratif Kepenghuluan lain. Terdapat beberapa alasan mengapa warga merasa khawatir akan hal tersebut, yaitu *Pertama*, warga kurang memahami bahwa hak atas tanah tidak hilang jika seseorang tinggal di luar kepenghuluan yang berbeda meskipun berbeda Kecamatan apalagi larangan penguasaan tanah *absentee* tidak diterapkan; *Kedua*, warga terutama pendatang merasakan adanya perlindungan di masing-masing kepenghuluan dengan pemberian status sebagai penduduk Kepenghuluan tersebut; *Ketiga*, terutama warga yang telah mengurus keterangan tanah di masing-masing kepenghuluan akan mendapatkan kerugian biaya pengurusan bila tanahnya ternyata tidak dalam Kepenghuluan tempat mengurus keterangan tanah. Dengan situasi seperti itu, warga kemudian membela masing-masing kepenghuluan yang telah memberikan pengakuan status kependudukan serta keterangan mengenai tanah yang dikelolanya.

Situasi ini beberapa kali juga menjadi penghambat pembangunan fasilitas umum bagi warga, terdapat sebuah musala yang hendak dibangun oleh Kepenghuluan Tanjung Leban terhenti akibat adanya klaim dari kepenghuluan lainnya bahwa tanah tempat akan didirikannya musala tersebut telah masuk dalam wilayah kepenghuluan lain. Sesungguhnya masih perlu ditelaah lebih cermat dan dalam lagi mengenai sengketa batas antar kepenghuluan ini beserta sengketa lahan yang menyertainya, karena didalamnya juga menyertakan klaim-klaim ‘adat’ atas tanah di wilayah Kecamatan Kubu dan sekitarnya serta adanya status kawasan hutan pada wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban dan sekitarnya yang menyebabkan rumitnya masalah batas wilayah dan tanah di Kepenghuluan ini.

Menurut penuturan masyarakat, di Kepenghuluan Tanjung Leban jarang terjadi sengketa/konflik penguasaan lahan antar warga Kepenghuluan atau jika pun ada kasusnya tidak membesar hingga berperkara di pengadilan. Bila ada sengketa mengenai batas tanah antar warga dilakukan musyawarah antara para pihak yang bersengketa. Jika kata sepakat tidak dapat diambil oleh para pihak dalam musyawarah, biasanya ketua RT, Ketua RW dan Kepala Dusun dilibatkan oleh para pihak yang bersengketa untuk menengahi perselisihan tersebut dalam musyawarah lanjutan. Kepenghuluan biasanya akan dilibatkan dalam musyawarah antar pihak yang bersengketa jika ternyata para pihak tidak menemukan titik temu pada musyawarah di tingkat RT/RW ataupun Dusun, biasanya musyawarah di tingkat Kepenghuluan ini cukup mampu mendamaikan sengketa antar para pihak yang melakukan klaim atas tanah.



Bab XI

Proyek Pembangunan Desa

11.1 Program Pembangunan Desa

Kebijakan program pembangunan Kepenghuluan Tanjung Leban didasarkan pada berbagai permasalahan, sehingga diharapkan program pembangunan berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan Kepenghuluan secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level Kepenghuluan. Program pembangunan skala Kepenghuluan merupakan program pembangunan yang mampu dilaksanakan oleh Kepenghuluan diukur dari ketersediaan anggaran Kepenghuluan, kewenangan Kepenghuluan dan secara teknis di lapangan Kepenghuluan mempunyai sumber daya.

Pada prinsipnya program dan kegiatan pembangunan di Kepenghuluan Tanjung Leban terbagi dalam lima bidang utama, yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan, Bidang Pembangunan Kepenghuluan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak Kepenghuluan. Bidang-bidang itu kemudian disusun sebagai program dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan serta dirumuskan untuk kemudian diputuskan program beserta kegiatan apa saja yang menjadi prioritas dan hendak dilaksanakan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Kepenghuluan Tanjung Leban setiap tahunnya.

Kegiatan rutin penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kepenghuluan serta pelayanan kepada masyarakat Kepenghuluan merupakan kerja-kerja yang dilakukan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan dalam program pembangunan Kepenghuluan Tanjung Leban. Pembiayaan kegiatan dalam bidang ini pada tahun 2018 diambil dari Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) dan Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi.

Tabel 45 Program dan Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan

No	Program Dan Kegiatan	Sumber Anggaran
I.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan	ADK & BANKEU
1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai	
2	Operasional Perkantoran	
3	Operasional BPKep	
4	Operasional RT/RW	
5	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penghulu	
6	Kegiatan Musrenbang Kepenghuluan	
7	Kegiatan Pemilihan Penghulu	
8	Kegiatan Penyaluran RASTRA bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	

Sumber: APBKep Perubahan Kepenghuluan Tanjung Leban 2018.

Kegiatan-kegiatan pada Bidang Pembangunan yang anggarannya bersumber dari DK & SILPA merupakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum di wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban. Kegiatan pembangunan fasilitas umum merupakan porsi terbesar dalam penganggaran belanja dalam bidang ini yang seluruh kegiatannya dialokasikan sebesar 58,77% dari alokasi anggaran untuk Bidang Pembangunan.

Tabel 46 Program dan Kegiatan Bidang Pembangunan

No	Program Dan Kegiatan	Sumber Anggaran
II.	Bidang Pembangunan	DK & SILPA
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial	
2	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Masyarakat	
3	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Informasi dan Komunikasi Masyarakat	
4	Pembangunan Drainase	
5	Pembangunan Semenisasi Jalan	
6	Pemeliharaan Jalan (Perbaikan Jalan)	
7	Pembangunan Box Culvert	
8	Pembangunan Gorong-gorong	

Sumber: APBKep Perubahan Kepenghuluan Tanjung Leban 2018.

Pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang sumber anggarannya dialokasikan dari ADK dan Bankeu dapat terlihat adanya dukungan yang cukup besar terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di Kepenghuluan ini. Alokasi anggaran untuk seluruh kegiatan-kegiatan pembinaan keagamaan tersebut besarnya 84,48% dari seluruh alokasi anggaran belanja di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan. Selain upaya meningkatkan ketertiban dan kelembagaan pemberdayaan masyarakat, terdapat pula perhatian terhadap anak dan remaja dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada bidang ini.

Tabel 47 Program dan kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

No	Program Dan Kegiatan	Sumber Anggaran
III.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	ADK, BANKEU
1	Kegiatan Peningkatan Keamanan dan Ketertiban (Ronda Malam)	
2	Kegiatan MTQ Kepenghuluan	
3	Kegiatan Peningkatan Keshalehan Sosial	
4	Kegiatan Pembinaan LPMKep	
5	Kegiatan Pembinaan Masyarakat Masjid (Imam)	
6	Kegiatan Pembinaan Masyarakat Masjid (Gharim)	
7	Kegiatan Pembinaan Anak Mengaji	
8	Kegiatan Hari Besar Nasional	
9	Kegiatan Pembinaan Masyarakat Terhadap Kenakalan Remaja	

Sumber: APBKep Perubahan Kepenghuluan Tanjung Leban 2018.

Sebagian Pendapatan Transfer berupa ADK dan DK dialokasikan untuk menjalankan program Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan yang merupakan bidang dengan jumlah kegiatan terbanyak dibanding dengan kegiatan-kegiatan pada program lainnya di Kepenghuluan Tanjung Leban. Alokasi anggaran belanja terbesar pada bidang ini ada pada kegiatan Pemberdayaan PAUD sebesar 14,10 % dari total anggaran bidang ini dan yang terkecil sebesar 1,21% ada pada kegiatan Pemberdayaan Kelompok Dasawisma. Jika diperhatikan kegiatan-kegiatan dalam bidang ini masih lebih banyak berisikan sosialisasi dan pembinaan perangkat kepenghuluan yang sebenarnya adalah kerja rutin dari Kepenghuluan. Adanya peristiwa kebakaran lahan yang berulang-ulang juga menjadi perhatian dalam bidang ini dengan adanya Kegiatan Masyarakat Peduli Api

Tabel 48 Program danKegiatan Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan

No	Program Dan Kegiatan	Sumber Anggaran
IV.	Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	ADK & DK
1	Kegiatan Pemberdayaan PKK Kepenghuluan	
2	Kegiatan Pemberdayaan Kepemudaan/Karang Taruna	
3	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu	
4	Kegiatan Pemberdayaan PAUD	
5	Kegiatan BBGRM Kepenghuluan	
6	Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Dasawisma	
7	Kegiatan Sosialisasi Penyusunan RPJM	
8	Kegiatan Pembentukan BUMKep	
9	Kegiatan Sosialisasi Pengembangan BUMKep	
10	Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Dana Kepenghuluan	
11	Kegiatan Sosialisasi Pendataan Potensi Serta Aset Kepenghuluan	
12	Kegiatan Sosialisasi POSTEKDES	
13	Kegiatan Sosialisais Peningkatan Pendapatan Asli Kepenghuluan	
14	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kepenghuluan	
15	Kegiatan Masyarakat Peduli Api (MPA) Karlahut	
16	Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Penghulu	

Sumber: APBKep Perubahan Kepenghuluan Tanjung Leban 2018.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Kepenghuluan pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Kepenghuluan saling bekerjasama membangun Kepenghuluan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Kepenghuluan. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai. Diharapkan proses yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Kepenghuluan menuju kemandirian Kepenghuluan. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dengan mudah dapat diakses masyarakat Kepenghuluan, maka diharapkan kegiatan pembangunan seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

11.2 Program Kerjasama dengan Pihak Lain

Program kerjasama dalam pembangunan di Kepenghuluan Tanjung Leban dengan pihak dari luar desa sangat jarang dilaksanakan. Hal ini mengindikasikan kurang adanya jaringan untuk kerjasama antara masyarakat di kepenghuluan Tanjung Leban dengan berbagai pihak yang dapat memberikan dukungan untuk proses pemajuan masyarakat di Kepenghuluan. Adapun program-program pembangunan dari luar kepenghuluan yang lebih banyak berlangsung adalah program-program pembangunan dari pihak pemerintahan di atas Kepenghuluan terutama dari pihak kecamatan dan Kabupaten. Bentuk-bentuk program pembangunan yang masuk tersebut lebih banyak berwujud pembangunan fasilitas umum dalam bentuk infrastruktur fisik jalan dan jembatan.

Pada Tahun 2018, Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Riau sebagai pelaksana tugas pembantuan pemerintah daerah dalam restorasi gambut menjalankan kerja-kerja BRG melalui Program Pembasahan Gambut dan Program Revitalisasi Sosial Ekonomi di Kepenghuluan Tanjung Leban. Pada Program Pembasahan Gambut dengan melalui pembentukan kelompok masyarakat dilaksanakan pembangunan sumur bor dengan jumlah 50 unit dan pembangunan sekat kanal sebanyak 10 unit di wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban. Sedangkan Program Revitalisasi Sosial Ekonomi pelaksanaannya berupa pemberian bantuan ternak sapi kepada kelompok masyarakat yang dibentuk dalam Program Revitalisasi Sosial Ekonomi di Kepenghuluan Tanjung Leban.



Bab XII

Persepsi terhadap Restorasi Gambut

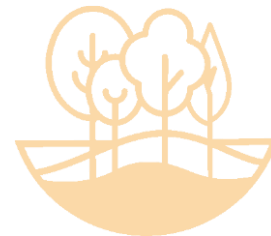
Restorasi gambut di Kepenghuluan Tanjung Leban awalnya dipandang warga sebagai upaya pembangunan sarana fisik berupa penyekatan parit dan pembuatan sumur yang bertujuan untuk menjaga lahan gambut tetap basah sehingga tidak mudah terjadi kebakaran lahan. Hal ini memperlihatkan bahwa di awal program DPG, warga sudah memahami pembasahan (*rewetting*) merupakan hal yang penting dalam upaya memulihkan lahan gambut. Masih diperlukan upaya agar warga meningkat pemahamannya tentang penanaman kembali lahan gambut (*revegetating*) dan revitalisasi ekonomi masyarakat (*revitalizing*) dalam upaya Restorasi Gambut. Warga di Kepenghuluan Tanjung Leban pada umumnya menyatakan bahwa restorasi gambut perlu dilaksanakan di wilayah Kepenghuluan ini serta bersedia terlibat melalui proses pelaksanaan yang partisipatif.

Pada umumnya warga memberikan pendapat positif mengenai pembasahan lahan gambut melalui upaya penyekatan parit dan pembuatan sumur bor yang sudah dilakukan tahun 2018. Warga sudah melihat bahwa upaya pembasahan membantu mencegah terjadi kebakaran lahan. Terdapat pula warga yang berpendapat agar pembasahan melalui pembuatan sekat parit dan sumur bor ditingkatkan kualitasnya, dalam hal ini terutama berkaitan dengan kondisi fisik dari bahan yang digunakan untuk sekat kanal dan sumur bor yang telah dibuat.

Terdapat pendapat warga bahwa penyekatan parit menyebabkan lahan lebih basah sehingga sulit ditanami dengan tanaman yang telah dibudidayakan selama ini yaitu Sawit, dan dibutuhkan jenis tanaman budidaya yang sesuai dengan kondisi lahan. Mengenai jenis tanaman budidaya di lahan gambut, warga memberikan pendapat mengenai jenis-jenis tanaman yang cocok untuk dibudidayakan. Untuk buah-buahan warga berpendapat bahwa nanas, pisang dan mangga cocok untuk dibudidayakan di lahan gambut. Jenis tanaman lainnya berupa tanaman untuk obat dan bumbu masak berupa Lengkuas, Laos, dan Kencur juga dianggap memiliki kesesuaian untuk dibudidayakan di lahan gambut.

Program restorasi di lahan gambut berupa penabatan mulai dirasakan pengaruhnya oleh warga yaitu debit dan volume air di parit stabil, dimana air di parit menjadi penuh serta tidak mengalir sehingga parit menjadi lambat surut terutama ketika musim kemarau. Dengan penabatan dan pembuatan sumur bor lahan menjadi tetap basah dan tidak mudah terbakar sehingga kedepannya kebakaran lahan tidak mudah terjadi lagi. Pada musim hujan, penabatan juga menyebabkan lahan pertanian sedikit tergenang, tetapi sekat kanal yang jauh dari pemukiman menurut warga membantu mencegah terjadinya banjir pada area pemukiman. Selain itu terdapat keluhan warga bahwa penyekatan parit menyulitkan warga untuk menggunakan parit sebagai jalur transportasi untuk mengeluarkan hasil pertanian terutama buah sawit dari kebun.

Mengenai kualitas bangunan dari sekat dan sumur bor yang sudah ada, sebagian warga berpendapat bahwa kualitasnya sudah sesuai untuk pembasahan lahan gambut. Sedangkan sebahagian warga lain berpendapat bahwa kualitasnya perlu peningkatan terutama untuk sekat kanal karena menggunakan bahan kayu atau bambu, menurut warga penabatan akan lebih baik jika digunakan bahan permanen. Warga juga mengungkapkan pendapat bahwa sekat kanal dan sumur bor di Kepenghuluan Tanjung Leban masih perlu penambahan jumlahnya agar program restorasi gambut terutama dalam hal pembasahan lahan bisa tercapai.



Bab XIII

Penutup

13.1 Kesimpulan

Pada wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban yang memiliki luas sebesar 21.434,60 Ha, penguasaan tanah dan kekayaan alam pada dasarnya terbagi dalam dua penguasaan besar legal formal, yakni oleh negara dan masyarakat. Penguasaan tanah oleh negara pada dasarnya meliputi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 dengan luas 19.808,17 Ha atau 92,41% dari keseluruhan luas wilayah kepenghuluan ini. Penguasaan besar tanah yang kedua di wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban yang seluas $\pm 1.623,43$ Ha adalah merupakan Kawasan Area Penggunaan Lain (APL).

Tanah gambut di Kepenghuluan Tanjung Leban dapat ditemukan setelah radius 500 meter hingga lebih dari 3 km di sepanjang aliran sungai Kubu dan Sungai Tolang Kanan, Tanah gambut berada pada radius 500 meter hingga lebih 3 km dari sungai alam setelah tanah mineral. Pada umumnya tanah gambut di Kepenghuluan Tanjung Leban tutupan lahannya berupa semak belukar, lahan budidaya pertanian dan pemukiman masyarakat. Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif 2019, luas kawasan gambut di Kepenghuluan Tanjung Leban adalah 16.724,68 Ha atau seluas 78,03% dari luas kepenghuluan ini.

Pemanfaatan lahan beserta hasil-hasil hutan memperlihatkan adanya hubungan dalam proses degradasi keanekaragaman hayati. Pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat yang frekuensinya semakin tinggi serta pembukaan lahan hutan yang kemudian diikuti dengan budidaya pertanian monokultur pada awalnya merupakan upaya pemenuhan subsistensi masyarakat dengan pemanfaatan untuk konsumsi domestik rumah tangga. Ketika pola produksi pertanian yang monokultur semakin masif dalam menghasilkan komoditas pertanian yang dibutuhkan pasar, upaya perluasan lahan pertanian monokultur semakin mendesak ruang hidup bagi berbagai jenis flora dan fauna di wilayah ini. Hal ini diperparah dengan peristiwa kebakaran yang terus terjadi berulang-ulang.

Jenis-jenis tanaman budidaya penghasil komoditas pertanian dikembangkan di lahan gambut maupun lahan non-gambut oleh masyarakat Kepenghuluan Tanjung Leban. Pada awalnya Karet, Coklat, Kopi dan Kelapa adalah jenis tanaman yang dibudidayakan oleh masyarakat di wilayah Kepenghuluan ini. Perubahan jenis tanaman pada akhir dekade 1990-an dan awal dekade 2000-an karena tingginya permintaan pasar, harga menguntungkan petani, serta intensitas kerja dalam budidaya tanaman yang ringan dengan hasil melimpah, menjadi faktor pendorong beralihnya jenis tanaman yang dibudidayakan warga ke tanaman Kelapa Sawit. Dimulainya budidaya pertanian penghasil komoditas baru yaitu Sawit juga mendorong terjadinya pembukaan lahan baru yang semakin luas oleh masyarakat di wilayah kepenghuluan Tanjung Leban.

Peristiwa kebakaran lahan di Kepenghuluan Tanjung Leban telah terjadi berulang kali dan menurut penuturan warga yang mulai membuka lahan tahun 2001 di Dusun Mayang Sari, peristiwa kebakaran lahan mulai sering terjadi sejak tahun 2003-2004 hingga saat ini. Akibat kebakaran lahan berulang kali di Kepenghuluan ini, kerentanan kebakaran meningkat karena lahan bekas terbakar berubah menjadi area semak belukar yang tidak segera dikelola lagi oleh warga karena faktor keterbatasan modal.

Dalam pengelolaan lahan khususnya lahan gambut di Kepenghuluan Tanjung Leban warga melihat semua pemanfaatan lahan yang ada dalam wilayah ini memiliki potensi serta masalah yang harus diselesaikan. Pemanfaatan lahan yang ada di Kepenghuluan Tanjung Leban saat ini adalah berupa pemukiman, kebun sawit, kebun nanas dan semak belukar. Seluruh pemanfaatan ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut di masa yang akan datang.

Mata pencaharian utama warga Kepenghuluan Tanjung Leban masih bergantung pada tanah dan kekayaan alam, terlihat dari besarnya penduduk bermata pencaharian Pertanian dan Peternakan serta Nelayan, serta sangat dimungkinkan warga bermata pencaharian Pekerjaan lainnya merupakan Buruh Tani/Kebun pada sektor pertanian. Warga di Kepenghuluan Tanjung Leban sudah ada yang terserap sebagai tenaga kerja di sektor formal sebagai Aparat Sipil Negara (ASN), Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Pengajar. Mata pencaharian lainnya adalah Wiraswasta, yang umumnya terhubung dengan sektor pertanian dimana kegiatan perdagangan yang tumbuh adalah jual beli komoditas hasil pertanian serta perdagangan untuk pemenuhan konsumsi harian warga. Sedangkan usaha produksi yang berjalan adalah pembuatan batu bata, pembuatan atap nipah, usaha pertukangan kayu, dan budidaya sarang burung walet, serta pada sektor jasa terdapat beberapa bengkel alat transportasi.

13.2 Saran

Aktifitas Restorasi gambut perlu dikembangkan dengan menyelaraskan pada kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang telah mengelola lahan di kawasan gambut. Beberapa saran yang didapatkan selama proses penyusunan laporan ini untuk para pihak adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan kinerja Kepenghuluan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat di Kepenghuluan Tanjung Leban. Dimulai dengan proses musyawarah perencanaan pembangunan yang diperkuat substansi partisipasinya hingga proses pelaksanaan pembangunan yang transparan. Peningkatan kinerja administrasi Kepenghuluan juga diperlukan sehingga gambaran pembangunan di Kepenghuluan ini dapat terekam dengan baik yang akan membantu dalam merencanakan pembangunan ke depan.
- 2) Potensi-potensi yang terdapat di Kepenghuluan ini perlu didorong menjadi produk-produk yang memiliki nilai tambah melalui pengolahan produk setengah jadi atau produk jadi. Proses pemberian nilai tambah ini terutama pada hasil tanaman pertanian yang telah dibudidayakan warga dimana terdapat produk lain yang dihasilkan selain produk utama yang telah dipasarkan. Untuk Sawit terdapat lidi sawit dan pelepah yang belum diolah lebih lanjut, sedangkan Nanas untuk buah masih bisa diolah menjadi berbagai jenis produk makanan serta bagian selain buah dimanfaatkan untuk pupuk organik.
- 3) Dengan pemahaman pembasahan lahan gambut (*rewetting*) yang cukup baik di warga, dibutuhkan upaya meningkatkan pemahaman warga tentang penanaman kembali (*revegetating*) dan revitalisasi ekonomi warga (*revitalizing*). Dampak program restorasi gambut sudah dirasakan warga dengan adanya penabatan dan pembuatan sumur bor adalah lahan menjadi tetap basah dan tidak mudah terbakar sehingga kedepannya kebakaran lahan tidak mudah terjadi lagi. Warga mengharapkan penabatan kedepannya tetap dapat digunakan sebagai jalur transportasi untuk mengelola pertanian.
- 4) Penanaman kembali (*revegetation*) lahan gambut perlu dilakukan untuk mengurangi kerentanan kebakaran pada lahan gambut yang telah terbakar dan menjadi semak belukar sehingga ekosistem lahan gambut dapat pulih dan terjaga. Warga berpendapat jenis-jenis tanaman yang cocok dibudidayakan yaitu Nanas, Pisang, Mangga, Lengkuas, Laos, Kencur sesuai untuk dibudidayakan di lahan gambut.

- 5) Penyelesaian dan penetapan batas-batas definitif wilayah Kepenghuluan dan Kecamatan sangat diperlukan untuk memberikan kepastian wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban. Bukan hanya menghindari konflik wilayah dengan Kepenghuluan dan Kecamatan lain serta kelancaran proses pembangunan di Kepenghuluan ini, lebih jauh lagi para pihak yang melakukan intervensi pembangunan akan lebih mudah menentukan bentuk intervensi yang tepat. Selain itu kepastian batas wilayah Kepenghuluan akan membantu proses penanganan Karhutla jika terjadi kembali, serta proses restorasi gambut akan lebih terarah dalam wilayah Kepenghuluan Tanjung Leban.
- 6) Diperlukan peningkatan pengetahuan warga tentang tanah dan sumber daya alam, terutama berkaitan dengan aspek hukum, hak asasi manusia, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan pemahaman yang baik akan hal tersebut di warga, pengelolaan lahan gambut ke depannya akan menjadi lebih berkelanjutan dengan memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat yang telah mengelola lahan gambut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernstein, H. (2010). *Class Dynamics of Agrarian Change*. Halifax, Nova Scotia: Fernwood Publishing.
- BPS Kabupaten Rokan Hilir. (2012). *Kecamatan Kubu Dalam Angka 2017*. Kabupaten Rokan Hilir: BPS Kabupaten Rokan Hilir.
- BPS Kabupaten Rokan Hilir. (2013). *Kecamatan Kubu Dalam Angka 2017*. Kabupaten Rokan Hilir: BPS Kabupaten Rokan Hilir.
- BPS Kabupaten Rokan Hilir. (2014). *Kecamatan Kubu Dalam Angka 2018*. Kabupaten Rokan Hilir: BPS Kabupaten Rokan Hilir.
- BPS Kabupaten Rokan Hilir. (2015). *Kecamatan Kubu Dalam Angka 2017*. Kabupaten Rokan Hilir: BPS Kabupaten Rokan Hilir.
- BPS Kabupaten Rokan Hilir. (2016). *Kecamatan Kubu Dalam Angka 2018*. Kabupaten Rokan Hilir: BPS Kabupaten Rokan Hilir.
- BPS Kabupaten Rokan Hilir. (2017). *Kecamatan Kubu Dalam Angka 2017*. Kabupaten Rokan Hilir: BPS Kabupaten Rokan Hilir.
- BPS Kabupaten Rokan Hilir. (2018). *Kecamatan Kubu Dalam Angka 2018*. Kabupaten Rokan Hilir: BPS Kabupaten Rokan Hilir.
- Climate-Data.org. (2019, April 03). *Climate Tanjung Leban*. Dipetik April 04, 2019, dari Climate-Data.org: <https://en.climate-data.org/asia/indonesia/riau/tanjung-leban-580119/>
- Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. (2018, Desember 30). *Aplikasi Visualisasi Data Kependudukan*. Dipetik Maret 15, 2019, dari Portal Sistem Informasi Geografis Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri: <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>
- Dollah, L. (2017, Februari 23). *Lamku Sayang - Lamku "Menghilang" (Bagian II)*. Dipetik Maret 8, 2019, dari GoPesisir: <https://www.gopesisir.com/berita/2017/02/lamku-sayang-lamku-menghilang-bagian-ii>
- Junus, H. (2016). *Bab Al-Qawaid, Kitab Pegangan hukum dalam Kerajaan Siak*. Pekanbaru: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu (BKPBM).
- Kepenghuluan Tanjung Leban. (2017). *Profil Desa Tanjung Leban Dengan Penggunaan Dana Desa*. Kabupaten Rokan Hilir: Kepenghuluan Tanjung Leban.
- Kepenghuluan Tanjung Leban. (2019). *Profil Desa Tanjung Leban 2019*. Kabupaten Rokan Hilir: Kepenghuluan Tanjung Leban.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Rokan Hilir. (2018). *Data Camat, Lurah/Kepenghuluan dan RT/RW di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir*. Kabupaten Rokan Hilir: Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Rokan Hilir.
- Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN). (2019). *Informasi Modis & NPP*. (Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN)) Dipetik Februari 11, 2019, dari Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN): <http://modis-catalog.lapan.go.id/monitoring/#>
- Masyukri, & Kutoyo, S. (Penyunt.). (1983). *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Riau*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Suryadiputra, N. (2018). Restorasi dan Pengelolaan Lahan Gambut Bersama Masyarakat. *Bahan Training of Trainers (ToT) Program Desa Peduli Gambut Tahun 2018*. Bogor: Wetlands International- BRG.

LAMPIRAN

Dokumentasi

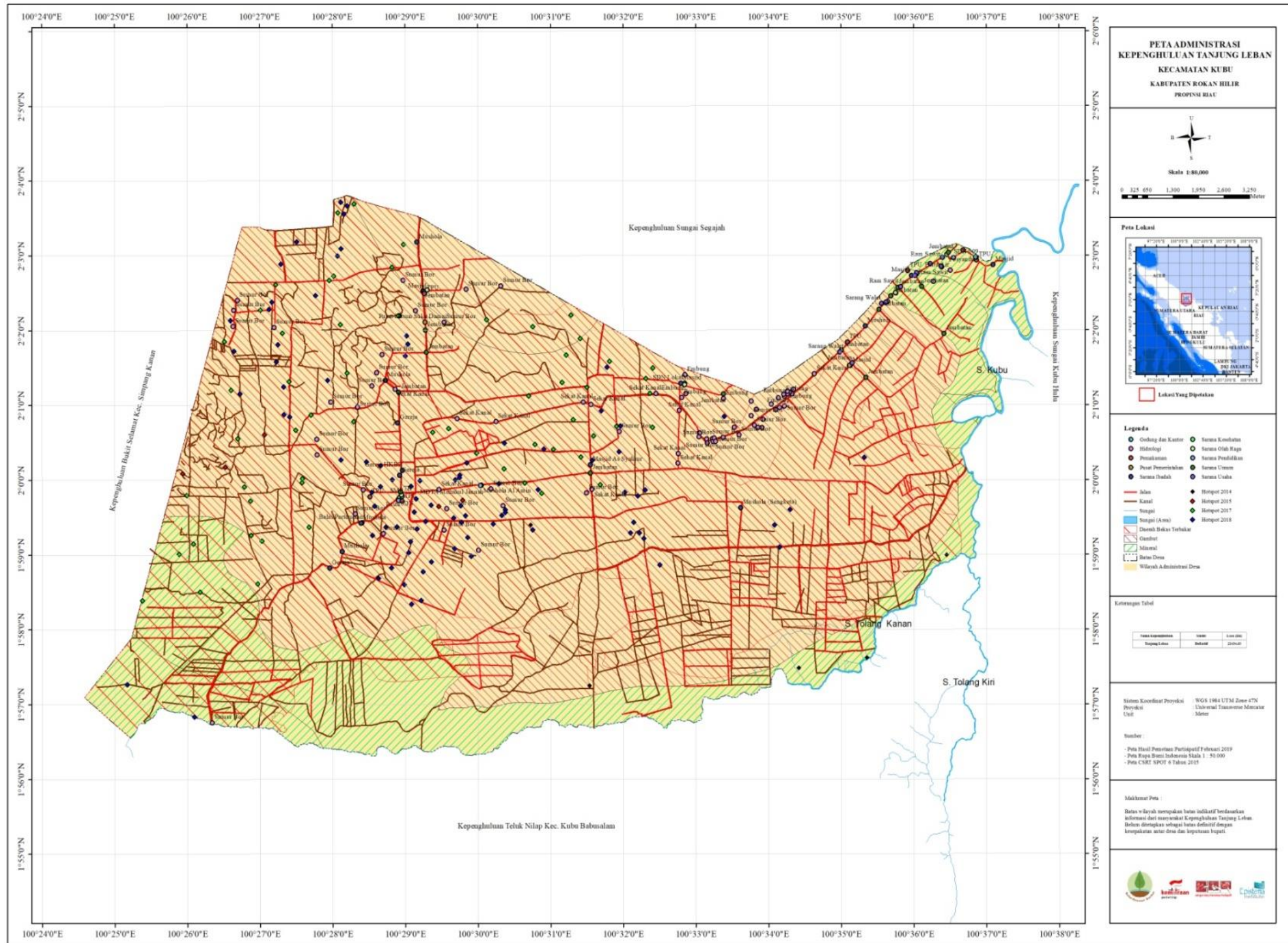
FGD I Kepenghuluan Tanjung Leban



FGD II Kepenghuluan Tanjung Leban



Peta Administrasi Kepenghuluan Tanjung Leban



Peta Pemanfaatan Lahan Kepenghuluan Tanjung Leban

